



**METODE PENDAMPINGAN KEPADA KEPALA RUMAH TANGGA
PEREMPUAN (KRTP) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR**

(Studi Deskriptif Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Bulurejo
Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

**METHODS OF ASSISTANCE TO THE FEMALE AS THE HEAD OF
HOUSEHOLD (KRTP) IN FULFILLMENT OF BASIC NEEDS**

*(Descriptive Study of Poverty Feminization Programs in Bulurejo Village Diwek Sud-
District Jombang Regency)*

SKRIPSI

Oleh :

Wandha Dini Arinta

150910301031

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**METODE PENDAMPINGAN KEPADA KEPALA RUMAH TANGGA
PEREMPUAN (KRTP) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR**
(Studi Deskriptif Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Bulurejo
Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

**METHODS OF ASSISTANCE TO THE FEMALE AS THE HEAD OF
HOUSEHOLD (KRTP) IN FULFILLMENT OF BASIC NEEDS**
(*Descriptive Study of Poverty Feminization Programs in Bulurejo Village Diwek Sud-
District Jombang Regency*)

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :
Wandha Dini Arinta
150910301031

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya untuk kemudahan dan kelancaran penyusunan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Bapak Muhammad Shobirin dan Ibu Yuni Setyowati yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang, memberikan motivasi serta berkorban banyak hal selama ini.
3. Adik saya Faizal Fajar Julvino yang teramat saya sayangi.
4. Bapak dan ibu guru yang sudah mendidik saya sejak duduk di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, beserta Bapak dan Ibu dosen selama saya menempuh perkuliahan di Universitas Jember.
5. Sahabatku Fafa Zawawi dan Teman seperjuangan Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2015.
6. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.

MOTTO

“Perhatikanlah orang yang memberikan nasehat kepadamu. Seandainya dia memulai dari sisi yang merugikan orang banyak, maka janganlah engkau menerima nasehatnya dan berhati-hatilah darinya. Akan tetapi, jika dia memulainya dari sisi keadilan dan kebaikanmu, maka terimalah nasehatnya itu”

(‘Ali bin Abi Thalib)¹



¹ ‘Ali bin Abi Thalib, *Tanyakan Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku: Kata-kata Mutiara ‘Ali bin Abi Thalib*, trj, Tholib Anis (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), hlm. 59.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wandha Dini Arinta

NIM : 150910301031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Metode Pendampingan Kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Studi deskriptif Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebut dengan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademis jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 15 Mei 2019

Yang menyatakan,

Wandha Dini Arinta

NIM. 150910301031

SKRIPSI

**METODE PENDAMPINGAN KEPADA KEPALA RUMAH TANGGA
PEREMPUAN (KRTP) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR**
(Studi Deskriptif Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Bulurejo
Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Oleh :

Wandha Dini Arinta
NIM 150910301031

Dosen Pembimbing:

Dr. Pairan, M. Si

NIP 196411121992011001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Metode Pendampingan Kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Studi Deskriptif Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 15 November 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
196106081988021001

Dr. Pairan, M.Si
196411121992011001

Anggota I

Anggota II

Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A
195806091985032003

Drs. Djoko Wahyudi, M.Si
195609011985032003

Mengesahkan,
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
196106081988021001

RINGKASAN

“Metode Pendampingan kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Studi Deskriptif Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)”; Wandha Dini Arinta, 150910301031, 148 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) memang dirancang untuk dapat membantu Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup sehari-hari serta membuat KRTP lebih berdaya sehingga kesejahteraan KRTP dapat lebih terjamin. Bantuan yang diberikan dalam program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) berjumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu per kepala rumah tangga yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan KRTP sehingga dapat tepat sasaran, maksud dari kesesuaian kebutuhan setiap KRTP adalah karena KRTP berhak menentukan bantuannya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan KRTP. Proses pendampingan program tak lepas dari adanya kerja sama antar pendamping yang baik, antara pendamping dan TP-PKK, Sekretariat desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam mendorong dan memotivasi KRTP untuk melakukan suatu metode kegiatan Pendampingan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui metode pendampingan kepada KRTP dalam pemenuhan kebutuhan dasar, mendayagunakan berbagai sistem sumber, meningkatkan akses klien pada pelayanan dasar, serta mendorong inisiatif KRTP dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi deskriptif. Teknik penentuan informan *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. teknis analisis data dengan menggunakan reduksi, display data dan verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi dengan sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pendampingan kepada KRTP dalam pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dalam lima tahap intervensi, yang pertama Intake dilakukan dalam tahapan sosialisasi, pra rembug warga dan rembug warga yang tujuannya untuk memperkuat dukungan. Kedua Asassment dilakukan dalam tahap klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan. Ketiga Planning dilakukan dalam tahapan pengajuan pencairan dana BKK dan rembug pokmas persiapan realisasi bantuan, tujuannya untuk dapat mendayagunakan berbagai sumber.

Keempat adalah intervensi yang dilakukan dalam tahap penyerahan bantuan barang kepada KRTP dan bimbingan teknis dengan tujuan untuk inisiatif pengambilan keputusan. Ke lima adalah Evaluasi & Terminasi yang dilakukan dalam tahap pengelola usaha yang tujuannya sama untuk inisiatif pengambilan keputusan, selanjutnya dilakukan dalam tahap monitoring & evaluasi, pelestarian dan keberlanjutan program yang tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pada pelayanan dasar. sehingga kebutuhan dasar KRTP terpenuhi, dapat memanfaatkan berbagai sumber, dapat mengambil keputusan secara mandiri dan meningkatkan kemampuan untuk pelayanan dasar.



PRAKATA

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Metode Pendampingan Kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Studi deskriptif Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)” dan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dan konstruktif dari semua pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Arif, S.Sos.,M.AP selaku dosen pembimbing akademik.
4. Dr. Pairan, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember .
6. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan atas bantuan untuk kelancaran penulis serta operator jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah membantu menyelesaikan urusan administratif.
7. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang telah memberikan informasi dan memfasilitasi dalam penulisan skripsi ini kepada penulis.
8. Sekretariat kabupaten, teman-teman pendamping kabupaten dan pendamping desa Bulurejo yang membantu penulis mendapatkan data selama melakukan penelitian.
9. Untuk bapak Muhammad Shobirin dan ibunda Yuni Setyowati, sebagai orang tua yang luar biasa yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk adikku, Faizal Fajar Julvino yang selalu memberikan semangatnya kepada penulis.

11. Untuk keluarga besar yang telah memberikan perhatian, doa dan dukungannya kepada penulis.
12. Untuk Fafa Zawawi yang selalu memberikan support, semangat, doa dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada penulis.
13. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan membantu mencari referensi teruntuk Melly, Ridha, Shofi, Siska, Yana, dan Anggi.
14. Teman seperjuangan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2015.
15. Teman-teman KKN 01 Kepanjen, Gumukmas. Jember khususnya Novia, dan Beryl yang telah mengajarkan arti kebersamaan kepada penulis selama KKN berlangsung.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 15 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep Pemenuhan Kebutuhan Dasar KRTP Melalui pemberdayaan Masyarakat	14
2.1.1 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	21
2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat KRTP	24
2.2 Metode Pendampingan Kepada KRTP.....	29
2.2.1 Metode Pendampingan	30
2.3 Penelitian Terdahulu.....	35
2.4 Kerangka Berpikir	39
BAB 3. METODE PENELITIAN	43
3.1 Pendekatan Penelitian.....	43

3.2 Jenis Penelitian	44
3.3 Metode Penentuan Lokasi	45
3.4 Teknik Penentuan Informan	46
3.4.1 Informan Pokok	46
3.4.2 Informan Tambahan.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5.1 Observasi	53
3.5.2 Wawancara.....	55
3.5.3 Dokumentasi	56
3.6 Teknis Analisis Data.....	57
3.7 Teknik Keabsahan Data	60
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Hasil Penelitian	63
4.1.1 Gambaran Umum Latar Penelitian	63
4.1.2 Profil Jalin Matra PFK Desa Bulurejo	64
4.1.3 Pemenuhan Kebutuhan Dasar KRTP	66
4.2 Penerapan Metode Casework dalam Program Jalin Matra PFK	83
4.2.1 Tahap Pengenalan (<i>Intake</i>)	85
4.2.2 Tahap Asessment	94
4.2.3 Tahap perencanaan (<i>Planning</i>)	97
4.2.4 Tahap Intervensi (<i>Intervention</i>)	104
4.2.5 Tahap Evaluasi dan Terminasi (<i>Evaluation and Termination</i>)	109
4.3 Pembahasan	125
4.3.1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar KRTP.....	128
4.3.2 Penerapan Metode <i>Case Work</i> dalam Program Jalin Matra PFK.....	133
4.3.3 Kesimpulan sementara	145
4.4 Triangulasi	147

BAB 5. PENUTUP	169
5.1 Kesimpulan	169
5.2 Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	171



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pikir Konsep Penelitian.....	42
Bagan 3.1 Metode Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Perbulan.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1 Informan Pokok.....	48
Tabel 4.1 Informan Tambahan.....	52
Tabel 5.1 Jadwal Observasi.....	54
Tabel 6.1 Jadwal Wawancara.....	56
Tabel 7.1 Proyeksi BPS Kabupaten Jombang.....	64
Tabel 8.1 Nama KRTP Desa Bulurejo.....	65
Tabel 9.1 Data KRTP Sasaran.....	77
Tabel 10.1 Daftar Susunan Sekretariat Desa.....	91
Tabel 11.1 Daftar Kelompok Masyarakat Bulurejo.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Jombang..... 63



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A TAKSONOMI PENELITIAN

LAMPIRAN B GUIDE INTERVIEW

LAMPIRAN C GUIDE INTERVIEW

LAMPIRAN D ANALISIS DATA

LAMPIRAN E DOKUMENTASI

LAMPIRAN F SURAT IZIN DARI LEMBAGA PENELITIAN

LAMPIRAN G SURAT REKOMENDASI DARI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP

LAMPIRAN H INSTRUMEN KLARIFIKASI DAN IDENTIFIKASI USULAN
KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SASARAN (RTS)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera atau yang disingkat Jalin Matra tahun 2018, disampaikan melalui peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Tujuan dari adanya program ini adalah untuk menjalankan program yang berkelanjutan, berpusat pada rakyat (*people centered*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi pada rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan pada ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) serta pengerusutan gender atau suatu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk dapat mencapai suatu kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan, melalui suatu kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Periode 2014-2019, yang mempunyai visi Pembangunan Jawa Timur yaitu “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” serta dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”. Program ini juga diharapkan dapat membantu serta memotivasi (*need for achivement*) ketahanan sosial dan ekonomi pada kepala rumah tangga perempuan untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, serta adanya kemampuan (*skill*) untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Didalam Program Jalin Matra ada tiga program turunan yaitu Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2).

Dalam program Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) merupakan kelanjutan dari Program Jalin Kesra dengan sasaran rumah tangga Sangat Miskin. Tujuan Jalin Matra BRTSM yang dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari pengupayaan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur yaitu dapat

memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin melalui pengoptimalisasian peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), memperluas akses pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap usaha-usaha produktif untuk peningkatan aset usaha atau pendapatan keluarga, membantu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin.

Selanjutnya Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan sasaran rumah tangga yang berada dalam kelompok Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin lazim digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang rapuh atau tidak memiliki suatu keahlian dalam menghadapi berbagai tekanan sosial ekonomi yang melanda kehidupannya. Melalui program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) diharapkan dapat menolong kelompok masyarakat rentan miskin agar tidak semakin terperosok kedalam jurang kemiskinan. (*Sumber: Pedoman Umum Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan 2018*)

Program turunan selanjutnya dan yang akan peneliti teliti adalah Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), sasarannya adalah Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). Permasalahan kemiskinan secara menyeluruh menjadikan perhatian oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Namun secara khusus saat ini lebih memfokuskan pada meningkatnya populasi perempuan yang hidup dibawah garis kemiskinan yang semakin tumbuh serta akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada KRTP. Maka perlu kita ketahui bahwa perempuan adalah penyumbang terbesar populasi kemiskinan pada aspek ekonomi.

Fenomena yang sering disebut sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan, membutuhkan upaya khusus untuk menanganinya. Maka dengan adanya permasalahan tersebut dijadikan sebuah dasar bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk memunculkan program kesetaraan gender tersebut, sehingga dibentuknya program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK).

Program Jalin Matra PFK pada dasarnya merupakan sebuah implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi serta mencukupi hak-

hak dasar warga miskin, yang khususnya tergolong dalam kriteria Kepala Rumah Tangga Perempuan agar mereka tetap dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap akan berdaya dan akhirnya keluar dari garis kemiskinan. Program ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip dasar “Membentuk dengan hati” yang mengedepankan pada empati sosial, dan *social compassion*.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan potensi pada ekonomi rumah tangga sangat miskin, namun juga harkat serta martabat, motivasi, harga diri, rasa percaya diri, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat, antara lain dengan tetap memberikan kesempatan pada KRTP untuk memberikan suatu keputusan terhadap jenis usulan pada kebutuhan anggota rumah tangga. Membantu warga miskin dengan hati, tidak dapat diukur menggunakan efisiensi, yang dapat digunakan hanyalah ukuran efektifitas, agar bantuan untuk KRTP dapat tepat sasaran serta tepat pemanfaatannya. (Sumber: *Pedoman Umum Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan 2018*)

Program PFK berpijak dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dalam pengupayaan untuk dapat menumbuh kembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama. Hal tersebut menjadi inisiasi pengupayaan jangka panjang dalam pemberian bantuan kepada Kepala rumah tangga perempuan namun lebih kepada proses pemberdayaan yang berkelanjutan, untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan atau jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang dapat menyebabkan kemiskinan terus ada dan apabila terus berlanjut dari generasi ke generasi dari keluarga pada penerima bantuan kepala rumah tangga perempuan efeknya dapat memperkuat KRTP sendiri yang terus berada pada siklus kemiskinan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika jumlah penduduk di Jawa Timur didominasi oleh kaum perempuan sebesar 51 % atau sebesar 19.674.951 juta jiwa. Meskipun perempuan adalah kaum mayoritas namun pada kenyataannya hingga saat ini masih menjadi kelompok marjinal akibat kuatnya budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai masyarakat kelas dua sehingga dibatasi oleh adanya hak-haknya. Berdampak akan memunculkannya permasalahan pada bidang finansial yang dikarenakan

perempuan tidak mempunyai akses yang luas pada lapangan pekerjaan dan masyarakat. Terutama kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang memiliki peran ganda dalam suatu keluarga akibat ditelantarkan, tidak diberi nafkah, bercerai atau suami sakit menahun atau meninggal dunia. (Sumber: <https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/04/29/331/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2015.html>)

Kemiskinan dengan cepat meningkat serta menjadi suatu masalah bagi perempuan berdasarkan pada analisa terhadap beban kerja, kemiskinan telah menyebabkan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibandingkan dengan laki-laki. Selain memberikan 66% dari jam kerjanya, perempuan miskin hanya mendapatkan 10% dari hasil kerjanya. Jam kerja perempuan ada sekitar 30-50% lebih lama dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pekerjaan yang dibayar serta tidak dibayar (Cahyono 2005). Disebabkan karena selain bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi keluarganya KRTP juga harus bekerja di dalam keluarga.

Feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan akan tetapi juga hasil dari perampasan kemampuan serta bias gender yang hadir dalam masyarakat dan pemerintahan, serta meningkatnya insiden “ibu” sebagai kepala rumah tangga tunggal. Prioritas pada kepala rumah tangga perempuan dikarenakan, meskipun seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin, namun kemiskinan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda dalam menyelesaikan dan menghadapinya. (Sumber: *Pedoman Umum Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2018*)

Perempuan mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya dan lebih mementingkan pada kebutuhan dasar keluarganya, dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar pendapatan perempuan maka semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi. Dengan maksud apabila berhasil dalam menanggulangi feminisasi kemiskinan maka akan memiliki dampak ganda atau dampak yang besar (*multiplier effect*).

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) yang bertanggung jawab penuh serta sebagai pendamping mengenai Program Jalin Matra dalam tingkat Kabupaten adalah Bupati, sedangkan Sekretariat Kabupaten di Ketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten (DPMD) yang bertugas memverifikasi dokumen pengajuan bantuan Jalin Matra dan melakukan pembinaan, pengendalian, serta monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra, melaporkan hasil pelaksanaan Program Jalin Matra di wilayahnya kepada Bupati dan Sekretariat Provinsi.

Selanjutnya pengelola dalam tingkat kabupaten adalah Tim Penggerak PKK kabupaten, dan Tenaga Pendamping Kabupaten. Tenaga pendamping kabupaten adalah tenaga yang ditugaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur dibawah manajemen Perguruan Tinggi pendamping untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di kabupaten, tim fasilitasi kecamatan, dan Tim Penggerak PKK kecamatan.

Pengelola dalam tingkat desa adalah Pemerintah desa yang bertugas sebagai penanggung jawab program serta membentuk Sekretariat desa sebagai pelaksana program PFK pada tingkat desa, selanjutnya adalah Tim Penggerak PKK desa, yaitu Mitra Kerja Pemerintah desa yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, tugas dan tanggung jawab salah satunya meliputi mendukung program PFK desa melalui program dan kegiatan TP-PKK desa yang relevan, membantu melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Program PFK, selanjutnya Pendamping desa atau yang disebut dengan (*Mother care*) adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah desa bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan PFK di desa, dan yang terakhir adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yaitu sekumpulan KRTP yang secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal sosial.

Program Feminisasi Kemiskinan memang dirancang untuk dapat membantu Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup sehari-hari serta membuat KRTP lebih berdaya sehingga

kesejahteraan KRTP dapat lebih terjamin. Dampak sosial yang diharapkan yaitu peningkatan derajat atau status sosial, peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga Pandangan negatif masyarakat desa tentang janda atau KRTP dapat mulai terpatahkan dengan adanya program.

Bantuan yang diberikan dalam program Feminisasi Kemiskinan ini berjumlah Dua Juta Lima Ratus ribu pada setiap KRTP yang di alokasikan sesuai dengan kebutuhan KRTP sehingga diharapkan dapat tepat sasaran. Maksud dari kesesuaian kebutuhan setiap KRTP adalah karena setiap KRTP berhak menentukan bantuannya yang sesuai dengan keperluan atau keinginannya.

Data meyebutkan di Kabupaten Jombang ada sebanyak dua puluh tujuh (27) desa yang mendapatkan Program bantuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dari 306 desa yang ada di Kabupaten Jombang. Dua Puluh Tujuh (27) desa tersebut diantaranya yaitu, Desa Bangsri, Desa Brodot, Desa Bulurejo, Desa Curahmalang, Desa Gadingmangu, Desa Gondang Manis, Desa Jatiganggong, Desa Kampung Baru, Desa Kedungpapar, Desa Klitih, Desa Menturo, Desa Pakel, Desa Pangklungan, Desa Penggaron, Desa Plabuhan, Desa Ploso Genuk, Desa Pucang Simo, Desa Puri Semanding, Desa Sambirejo, Desa Sepanyul, Desa Sidokerto, Desa Sidowarek, Desa Tampingmojo, Desa Tanjung Gunung, Desa Tengaran, Desa Tinggar, dan Desa Wonokerto dengan Jumlah semua KRTP di Kabupaten Jombang sebanyak 602 KRTP. (Sumber: *Pagu Program Jalin Matra PFK Kabupaten Jombang 2018*)

Dari 27 desa penerima program PFK salah satu desanya yaitu Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, yang mayoritas masyarakatnya adalah suku jawa yang biasanya dikenal dengan solidaritasnya yang tinggi dan rasa tanggung jawabnya kepada suatu hal yang diamanatkan. Program PFK yang dilaksanakan di Desa Bulurejo dapat dikatakan berhasil karena tingkat kesejahteraannya meningkat dari pada sebelum mendapatkan bantuan, seperti dampak pendapatan dalam kehidupan KRTP sehari-hari yang tercukupi, itu semua berkat adanya bantuan program dan semangat usaha dari KRTP sendiri untuk terus

mengembangkan usaha yang dijalankan. Berikut adalah tabel pendapatan perbulan KRTP sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan program JM PFK :

Tabel 1.1 pendapatan perbulan

No.	Nama KRTP	Pendapatan perbulan sebelum menerima program (Rp)	Pendapatan perbulan setelah menerima program (Rp)
1	KI	600.000	850.000
2	RH	500.000	950.000
3	SI	800.000	1.200.000
4	SH	600.000	800.000
5	SM	500.000	850.000

Sumber: Form Pemantauan Realisasi dan Perkembangan Usaha RTS Program PFK

Bantuan di Desa Bulurejo banyak dirupakan menjadi usaha seperti toko pracangan yang menjual aneka kebutuhan pokok, warung sayur-mayur, warung makan, penjual jus atau minuman segar, penjual beras, pedagang jamu yang bahan-bahannya diolah secara mandiri oleh KRTP, ternak hewan ayam dan kambing, pedagang lijo atau sayur keliling dan lain sebagainya. Ditambah dengan pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh pendamping dengan bekerja sama oleh TP-PKK atau stakeholder, dengan pelatihan seperti membuat olahan kue atau olahan makanan, membuat jamu tradisional, dan lain sebagainya yang dikelola secara langsung oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).

Keberhasilan dari adanya suatu pemberdayaan pada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) berhasil dengan adanya kesadaran kepada masyarakat Desa Bulurejo bahwa program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) yang mereka dapat bukan hanya sekedar program dari pemerintah pusat Jawa Timur, akan tetapi juga menjadi program mereka sendiri, sehingga KRTP dengan sungguh-sungguh membangun usaha mereka agar terus

berkembang dengan didukung oleh solidaritas masyarakat sekitar, pendamping atau stakeholder yang terus mendorong KRTP untuk tetap berkembang dan berusaha sehingga KRTP mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan sejahtera.

Awal sebelum adanya program PFK, Status kesejahteraan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) kurang mencukupi dengan berbagai kebutuhan sehari-hari. Rata-rata KRTP sebelum mendapatkan program bantuan PFK bekerja secara serabutan, bekerja menjadi buruh disawah atau bekerja dengan modal yang minim, sehingga pendapatan yang diperoleh sedikit dan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Seperti data pada tabel 1.1 pendapatan sebelum menerima bantuan PFK dan sesudah mendapatkan bantuan, perubahannya dilihat dari dampak ekonomi yaitu peningkatan pendapatan melalui kepemilikan usaha yang berkelanjutan sehingga menciptakan suatu ketahanan ekonomi. KRTP sasaran yang mampu mengelola dan mengembangkan usahanya mengungkapkan bahwa mereka lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, beberapa dari Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) bahkan dapat menggunakan hasil dari usahanya sebagai biaya pendidikan untuk anak atau cucunya.

Tujuan dari program PFK memang memberikan akses interaksi serta perlindungan kepada KRTP melalui optimalisasi peran pendamping atau yang biasa disebut dengan *mother care*, memperluas akses KRTP terhadap pengembangan usaha-usaha produktif untuk dapat meningkatkan aset usaha dan pendapatan keluarga, seperti memberikan pelatihan dan ketrampilan, Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan dasar, serta mendorong motivasi berusaha dan kemampuan KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Proses pendampingan dalam pelatihan dan ketrampilan dilakukan bersama TP- PKK desa, Sekretariat desa, dan pendamping desa, dengan tujuan akhir KRTP dapat mengembangkan usahanya lebih baik, mendorong kreativitas KRTP dalam mengolah berbagai makanan atau minuman dan berbagai ketrampilan yang lainnya. Setelah melakukan pelatihan, banyak dari KRTP mempunyai keahlian atau ketrampilan baru yang pada akhirnya mempunyai usaha sampingan atau pengembangan usaha selain usaha yang diperoleh dari program

PFK. Berhasilnya proses pendampingan program tak lepas dari adanya kerja sama antar pendamping yang baik, antara pendamping TP-PKK dan Sekretariat desa dalam mendorong dan memotivasi KRTP untuk melakukan suatu kegiatan pendampingan.

Data menyebutkan jumlah Pendamping Kabupaten di Jombang ada sebanyak Enam (6) orang yang masing-masing pendamping Kabupaten rata-rata memegang dua sampai tiga desa, sedangkan Pendamping desa ada sebanyak Empat Puluh Tujuh (47) pendamping yang masing-masing satu desa di dampingi satu pendamping hingga dua pendamping, pendamping mempunyai peran khusus dalam proses pendampingan KRTP yaitu sebagai fasilitator yang berkaitan dengan memberikan motivasi atau kesempatan untuk masyarakat, sebagai edukator atau yang memberikan ide atau masukan yang positif, sebagai broker atau penghubung, serta berperan sebagai peran-peran teknis atau suatu peran yang mengarah pada penerapan ketrampilan, serta dengan menggunakan metode pendekatan dalam pendampingan seperti *case work*. Setiap pendamping mempunyai cara atau trik tersendiri dalam pendampingannya meskipun pedoman pendampingannya sama, oleh karena itu hasil yang didapat juga beragam.

(Pagu program PFK Kabupaten Jombang 2018)

Berkat adanya program PFK para KRTP sasaran terbukti mampu memanfaatkan bantuan usaha sehingga mereka memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya jadi tingkat kesejahteraanya KRTP naik dan akan berdampak pada jumlah angka kemiskinan yang menurun. Kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan, menurut data BPS bulan September 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 4. 292.15 ribu jiwa dengan persentase 10,85%, berkurang sebesar 40,44 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2018 yang sebesar 4.332.59 ribu jiwa atau 10,98%.

Basis Data Terpadu (BDT) PPLS 2011 menyebutkan jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan berjumlah 152.343 sedangkan dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) berjumlah 144.951 rumah tangga, jadi jumlah penurunan kepala rumah tangga perempuan sebesar 7.392 jiwa, hal tersebut tak lepas dari adanya peran pendamping dalam proses realisasi program agar dapat

berjalan dengan tepat serta sesuai dengan keinginan. Dalam era otonomi daerah, fungsi serta peran pendamping sangat diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan serta sebagai pengendali di lapangan. Untuk dapat menunjang keberhasilan program diperlukan adanya tenaga-tenaga pendamping yang profesional, berdedikasi tinggi serta mampu melayani dengan baik. Pendampingan merupakan kegiatan yang mampu mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin secara optimal, dengan menggunakan metode-metode pendampingan yang bertujuan untuk mencapai titik kesejahteraan pada KRTP.

Latar belakang fenomena diatas yang sudah dijabarkan maka peneliti dapat mengeksplor secara ilmiah mengenai bagaimana Metode Pendampingan Kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar studi deskriptif Melalui Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, mengetahui proses atau cara pendampingannya sehingga dapat membuat KRTP lebih sejahtera dan pemenuhan kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Sejahtera dalam konteks kesejahteraan sosial adalah sebuah kondisi yang mempelajari tentang keberfungsian sosial baik individu, lembaga maupun masyarakat. Disamping itu kesejahteraan sosial merupakan kondisi atau keadaan sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup dengan cara yang terorganisir dan terencana agar kondisi sejahtera tersebut dapat tercapai. Pemerintah selaku pelayan publik memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya, dalam hal ini lahirlah program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera atau disingkat (Jalin Matra). Metode pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap KRTP dapat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan dari program yaitu membuat Jawa Timur lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing dan berakhlak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba memaparkan bahwa semakin banyaknya feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan di Jawa Timur maka pemerintahan pusat membuat program

khusus untuk menanggulangi masalah Kepala Rumah Tangga Perempuan, yaitu dengan program Penanggulangan Feminisasi kemiskinan (PFK) yang merupakan turunan dari program Jalin Matra. Program PFK sendiri memfokuskan kepada penerima bantuan Kepala Rumah Tangga Perempuan, guna membantu perekonomian serta meningkatkan derajat serta kesejahteraan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).

Keberhasilan suatu program, tentu adanya suatu proses dalam pendampingan, karena dalam proses berjalannya suatu program perlu adanya pendamping untuk dapat memfasilitasi pengelolaan program, pembinaan realisasi usaha, serta pengelolaan bantuan kepada KRTP sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme dan sistem yang sudah ditentukan. Dari penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Metode Pendampingan Kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar”?.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam suatu penelitian adalah ingin mengetahui suatu hal yang ingin dicapai dan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang telah ditetapkan, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan mengenai metode pendampingan kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Program tersebut dapat dikatakan berhasil atau berjalan sesuai dengan keinginan, Karena dalam suatu keberhasilan program pendampingan, terdapat suatu metode dan proses didalamnya yang dapat menunjang keberhasilan program tersebut. Agar bantuan dapat tepat sasaran maka perlu adanya pendamping yang mengontrol serta memantau jalannya program agar berjalan dengan semestinya.

Tujuan pendampingan yaitu memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, mendayagunakan berbagai sistem sumber, meningkatkan akses klien pada pelayanan-pelayanan dasar, serta mendorong inisiatif Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dalam pengambilan keputusan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta akademisi.

- a. Bagi Intitusi sebagai media informasi dan literatur perpustakaan serta dapat memberikan kontribusi mengenai Metode Pendampingan kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), sehingga dapat memberikan sebuah wawasan.
- b. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi kepada masyarakat mengenai Metode Pendampingan Dalam Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) Melalui Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk wilayah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jombang.
- c. Bagi Akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi serta pihak-pihak yang lain yang berkepentingan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dalam megkaji penelitian dengan topik yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan suatu konsep serta kajian teori yang digunakan sebagai landasan teoritis sebagai penjabar dari konseptual kerangka berfikir dari peneliti sehingga dengan adanya tinjauan pustaka fenomena yang ada pada rumusan masalah dapat dipaparkan secara teoritis dan sistematis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memiliki dasar pembuktian karena tinjauan pustaka yang berguna bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan secara ilmiah. Menurut Irawan (2006: 38), kerangka teoritis adalah suatu penjelasan ilmiah mengenai konsep yang akan digunakan dalam suatu penelitian, tidak menutup kemungkinan akan saling berkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya.

Penjelasan tersebut digunakan untuk memberikan asumsi sementara pada hasil penelitian. Kerangka teoritis dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk menjelaskan serta memahami suatu makna (*meaning*), dengan latar belakang yang bersifat alami akan dapat memberikan arti pada subjek yang sesuai dengan pandangan subjek. Selanjutnya dalam penjelasan suatu fenomena sosial yang hendak di teliti tentunya sangat penting untuk memperoleh dasar-dasar untuk dapat menghindarkan peneliti dari kekaburan dalam proses pengumpulan data dilapangan.

Adanya program pengentasan kemiskinan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran program Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), diharapkan adanya peningkatan dari waktu ke waktu, kemajuan pada tingkat ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar dari KRTP. Adanya peningkatan ekonomi tersebut secara otomatis masyarakat akan sejahtera, dalam proses penanggulangan feminisasi kemiskinan tak lepas adanya campur tangan dari seorang pendamping dalam proses pendampingannya. Oleh sebab itu, berikut merupakan uraian dari konsep yang akan digunakan dalam melakukan pengkajian terhadap Metode Pendampingan Kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dalam

pemenuhan kebutuhan dasar Melalui Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK).

2.1 Konsep Pemenuhan Kebutuhan Dasar KRTP Melalui pemberdayaan Masyarakat

Manusia memiliki suatu kebutuhan dasar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri akan tetapi kebutuhan dasarnya sama. Sebagaimana yang dikutip oleh Alwisol (2007:218) menurut Murray kebutuhan (*Needs*) adalah sebuah konstruk mengenai otak yang mengorganisir berbagai proses seperti berfikir, persepsi, berbuat untuk mengubah suatu kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Dapat dibangkitkan oleh proses internal, namun lebih sering di bangkitkan dari faktor lingkungan, biasanya kebutuhan dibarengi oleh perasaan atau emosi khusus dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan.

Menurut Maslow dalam (Minderop, 2011:49) mengungkapkan bahwa setiap manusia adalah satu kepribadian secara keseluruhan yang khas, terstruktur dan terorganisasi yang menunjukkan keberadaan manusia bahwa memiliki kebebasan untuk memilih suatu tindakan, menentukan sendiri nasib atau wujud dari keberadaannya dan bertanggung jawab pada pilihan serta keberadaannya, karena tingkah laku manusia lebih ditentukan oleh kecenderungan dari individu untuk mencapai suatu tujuan agar kehidupan dari individu dapat lebih bahagia dan memuaskan.

Maslow dalam (Minderop, 2011:49) mengungkapkan teorinya mengenai kebutuhan bertingkat yang tersusun dari: fisiologis, rasa memiliki, aktualisasi diri, pakaian, istirahat dan tempat tinggal harus lebih dulu dipenuhi sebelum beralih pada pemenuhan kebutuhan psikis seperti cinta, rasa aman dan harga diri.

a. Kebutuhan Dasar Fisiologis (Fisik)

Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan fisiologis adalah suatu sekumpulan kebutuhan dasar yang paling penting atau mendesak dengan pemenuhannya dikarenakan saling berkaitan dengan keberlangsungan hidup individu, suatu kebutuhan yang penting dan tidak dapat ditunda.

Misalnya makan dan minum, istirahat, baju atau pakaian, dan tempat tinggal, intinya kebutuhan fisiologis adalah suatu kebutuhan yang penting sehingga paling diusahakan pemuasannya oleh individu.

Kebutuhan fisiologis termasuk dalam kebutuhan paling dasar dan akan menimbulkan masalah sangat penting apabila tidak dipenuhi. Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi maka seseorang akan lebih mengarah untuk berusaha bergerak mencapai sebuah kebutuhan yang berada ditingkat selanjutnya untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar ditingkat selanjutnya, karena kemungkinan besar bahwa dorongan motivasi adalah yang paling besar adalah kebutuhan fisiologis. Individu yang mengalami kekurangan dalam ekonomi pasti termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan ini.

Ketika dalam kebutuhan ini belum terpenuhi, maka individu atau seseorang tidak akan beralih mencapai kebutuhan selanjutnya dan cenderung mengalami masalah kejiwaan dan kesenjangan pada perilaku yang dapat menyebabkan kehidupan individu tidak mengalami perubahan dan perkembangan bahkan bisa jadi dapat mengalami penyimpangan yang lebih negatif.

Adapun kebutuhan-kebutuhan fisiologis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan Makanan dan Minuman

Individu selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari kawan atau dihargai. Individu akan mengabaikan kebutuhan yang lain sampai pada kebutuhan fisiologisnya terpuaskan, agar mendapatkan keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan yang selanjutnya.

- 2) Kebutuhan Pakaian

Kebutuhan yang lain adalah pakaian untuk memudahkan dalam melakukan rutinitas sehari-hari. Kebutuhan pakaian adalah termasuk kebutuhan yang mendesak dan diusahakan memang harus terpenuhi sebisa mungkin, karena kalau tidak terpenuhinya kebutuhan ini manusia akan merasa tidak percaya

diri dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi tidak selamanya bisa terpuaskan atau minimal dapat dibatasi.

3) Kebutuhan istirahat

Kebutuhan istirahat termasuk dalam kebutuhan dasar fisiologis. Maksudnya adalah keadaan rileks tanpa ada tekanan emosional, bukan ketika tidak beraktifitas saja melainkan juga kondisi yang memang membutuhkan ketenangan. Ada beberapa spesifik dari istirahat, diantaranya yaitu merasa segala sesuatu dapat diatasi, dapat merasa diterima, mengetahui apa yang sedang terjadi, bebas dari rasa ketidaknyamanan, mempunyai beberapa kepuasan pada aktivitas yang mempunyai tujuan, mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan. Kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan yang paling mendesak pemenuhannya agar seseorang dapat berpikir dengan baik demi kelangsungan hidupnya.

4) Kebutuhan tempat tinggal

Tempat tinggal yaitu suatu kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan tempat tinggal adalah paling mendesak untuk didahulukan oleh setiap seseorang agar dapat memudahkan untuk memperoleh kedamaian dalam bertahan hidup secara fisik. Tanpa adanya tempat tinggal seseorang pasti akan merasa terganggu dan terusik kehidupannya dari keadaan sekelilingnya, seperti merasa tidak tenang karena tidak merasa terlindungi secara fisik.

Seseorang pasti akan berusaha dengan cara apapun untuk bisa mendapatkan ketenangan dalam berpikir untuk dapat mencukupi kebutuhan yang selanjutnya dengan harapan dapat mencapai kebutuhan yang lebih baik lagi.

b. Kebutuhan psikis

Kebutuhan psikis adalah suatu kebutuhan yang akan diusahakan individu setelah kebutuhan dasar fisiologisnya terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan dasar fisiologis adalah suatu motivasi untuk dapat bergerak mencukupi kebutuhan yang lebih baik lagi. Salah satu cara untuk dapat mencapai kebutuhan yang lebih baik lagi yaitu dengan cara kebutuhan yang ada dibawahnya itu harus sudah terpenuhi, selain kebutuhan fisik, seseorang akan mengusahakan pemenuhan sejumlah kebutuhan psikisnya untuk bisa lebih mudah mencapai kebutuhan yang lebih tinggi atau lebih baik. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kebutuhan Rasa Aman

Selain adanya kebutuhan-kebutuhan fisiologis yang terpuaskan secara cukup, dalam individu akan muncul satu kebutuhan yang lainnya sebagai kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menuntut kepuasan, yaitu kebutuhan rasa aman. Seperti kebutuhan rasa aman secara fisik, stabilitas atau kestabilan, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari sesuatu yang dapat mengancam seperti penyakit, rasa takut, cemas, bahaya, bencana alam dan kerusuhan.

Kebutuhan ini akan dipenuhi oleh seseorang setelah kebutuhan fisiologisnya tercukupi. Kebutuhan rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mendapatkan ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan sekitarnya. Kebutuhan rasa aman tidak berbeda dengan kebutuhan fisiologis dikarenakan kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan.

Maka dari itu, kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak selau dapat terpenuhi karena manusia tidak pernah bisa dilindungi secara sepenuhnya dari ancaman atau perilaku berbahaya orang lain yang tidak

dikenal atau tidak diketahui kedatangannya, tetapi kebutuhan akan rasa aman akan tetap dipenuhi oleh individu sebisa mungkin demi mencapai ketentraman, kenyamanan, dan kesejahteraan guna untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya.

2) Kebutuhan Rasa Cinta dan Memiliki

Ketika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman sudah terpenuhi, maka lahirlah kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki dan dimiliki. Yang meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan untuk mempunyai pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk bisa dekat dengan keluarga, dan kebutuhan secara pribadi yaitu kebutuhan untuk menerima cinta dan memberi cinta.

Kebutuhan individu tentang rasa cinta dan memiliki yaitu suatu kebutuhan yang memotivasi individu untuk melakukan hubungan efektif (baik) atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis ataupun dengan lawan jenis, di lingkungan keluarga atau di lingkungan kelompok masyarakat. Seseorang berhak mencintai dan dicintai oleh individu lain. Kebutuhan rasa cinta adalah suatu kebutuhan untuk saling menghargai, menghormati, dan saling mempercayai. Menurut Maslow cinta adalah hubungan sehat antara pasangan manusia yang melibatkan perasaan yang saling menghargai, menghormati, dan mempercayai.

Dicintai dan diterima adalah jalan menuju pada perasaan yang sehat dan berarti atau penting, sebaliknya tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan dan kemarahan.

Oleh karena itu kebutuhan ini tidak bisa ditolak oleh individu sebab dalam menjalani kehidupan baik dilingkungan keluarga ataupun lingkungan bermasyarakat diperlukan hubungan yang baik dan erat kaitannya dengan perasaan saling

menghargai, menghormati dan saling mempercayai, apabila kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki ini sudah tercukupi dengan baik maka individu akan merasa percaya diri, dengan perasaan yang sehat dan berharga atau berarti untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya.

3) Kebutuhan Harga Diri

Setelah kebutuhan mencintai dan dimiliki sudah terpenuhi, individu atau seseorang bebas untuk mengejar kebutuhan-kebutuhannya akan penghargaan. Kebutuhan selanjutnya adalah akan rasa harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap individu memiliki dua golongan mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan kebutuhan lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah adalah suatu kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan pada status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat atau harga diri bahkan penghargaan dari orang lain.

Kebutuhan yang lebih tinggi adalah kebutuhan akan penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi atau kemampuan, prestasi, penguasaan, kemandirian dan kebebasan. Maslow menekankan bahwa rasa harga diri yang sehat lebih didasarkan pada prestasi, status, atau keturunan. Dengan perkataan lain rasa harga diri individu yang baik adalah hasil dari usaha individu yang bersangkutan. Akan tetapi, penghargaan yang dimaksud disini adalah bukan berarti harus selalu dipuaskan dengan materi karena harga diri seseorang tidak pernah dapat diukur dengan apapun yang ada di dunia.

Kebutuhan akan harga diri adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh individu baik secara penghormatan

atau penghargaan dari diri sendiri ataupun dari orang lain guna mengetahui atau yakin bahwa dirinya itu berharga dan mampu mengatasi segala tantangan dalam menjalani kehidupan.

4) Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan yang terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah kebutuhan atas aktualisasi diri. Kebutuhan ini yang tidak melibatkan keseimbangan, namun melibatkan keinginan yang terus menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini juga memotivasi individu untuk dapat mengungkapkan diri atau aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri dapat diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya dan menjadi kreatif untuk bebas mencapai puncak prestasi atau hasil potensinya menjadi orang yang sesuai dengan keinginannya dan potensi atau kemampuan yang dimilikinya untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap kemampuan yang dimiliki.

Oleh karena itu, kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk dapat memperlihatkan potensi dirinya yang dimiliki setelah kebutuhan-kebutuhan lainnya tercukupi. Kebutuhan aktualisasi diri menuntut individu untuk dapat mengembangkan potensinya menurut kemampuan yang dimilikinya untuk memperoleh kepuasan terhadap dirinya sendiri dengan hal-hal yang dapat individu lakukan untuk lebih memahami perkembangan kepribadian secara keseluruhan agar individu mampu mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dengan manfaat potensi-potensi yang berkembang.

2.1.1 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Menurut buku pedoman Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan beberapa kriteria seperti ditinggalkan suami tanpa adanya kejelasan, menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, serta berpenghasilan kurang. Dalam hal ini contoh dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Adalah Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang mana KRTP ini adalah sasaran dari program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK).

a. Kepala Rumah Tangga Perempuan

M.I.Soelaeman (1978:4-5) mengutarakan pendapat para ahli mengenai keluarga: Menurut F.J Brown berpendapat bahwa melihat dari sudut pandang sosiologis, keluarga adalah meliputi semua pihak yang ada hubungan darah dan dapat dibandingkan dengan “*clan*” atau marga. Selanjutnya menurut Undang-undang Perkawinan berbunyi:

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3), yaitu: “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”.

Pengertian diatas sesuai dengan pengertian kepala rumah tangga itu sendiri, yaitu orang yang mempunyai tanggung jawab besar baik mengenai ekonomi dan sosial keluarganya. Perubahan dalam keluarga yang bermula lengkap dan menjadi tidak lengkap disebabkan karena adanya perceraian, kematian, suami sakit menahun atau suami cacat, sehingga seorang ibu harus menjalankan peran sebagai orang tua tunggal atau kepala rumah tangga perempuan (KRTP) yang juga berperan sebagai ayah sehingga

mempunyai tanggung jawab yang besar tentang perekonomian, sosial dan keluarganya.

b. Feminisasi Kemiskinan

Menurut Astuti (2011:8) Feminisme menjelaskan suatu kesetaraan dan ketimpangan gender, teori tersebut menjelaskan mengenai hakikat ketimpangan gender dengan menyaksikan peran sosial perempuan dan pengalaman dalam hidupnya. Gerda Lerner (1986:236) mengatakan, ada beberapa definisi feminisme yaitu, (a) feminisme adalah sebuah teori yang membantu hak-hak sosial dan politik yang seimbang bagi perempuan; (b) menyusun suatu pernyataan perempuan sebagai sebuah kelompok dan sejumlah teori yang sudah diciptakan oleh perempuan; (c) kepercayaan pada pentingnya dan perlunya perubahan sosial yang luas dan berfungsi untuk meningkatkan daya perempuan.

Lebih lanjut Lerner (1986:235-237) mengemukakan mengenai feminisme dapat mencakup baik gerakan hak-hak pada perempuan ataupun emansipasi perempuan. Didefinisikan jadi kedua posisi tersebut sebagai gerakan hak-hak perempuan yang peduli dengan kemenangan bagi kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam segala aspek masyarakat dan memberi akses pada semua hak-hak serta kesempatan yang dapat dinikmati laki-laki dalam institusi-institusi dari masyarakat tersebut.

Feminisasi kemiskinan menurut Moghadam (2005:7) ialah populasi pertumbuhan perempuan yang hidup dibawah garis kemiskinan secara bersama. Menurut para peneliti mengatakan dalam sebuah keluarga miskin, peran perempuan atau ibu adalah sebagai sumber penyelamat bagi perekonomian keluarga. Ollenburger & Moore (2002:124) menambahkan bahwa perempuan dianggap sebagai penyelamat, dikarenakan berbagai peran perempuan yang diambil oleh perempuan miskin dalam keluarga. Perempuan yang mengalami kemiskinan dan harus menanggung

beban ekonomi karena bercerai, meninggal dunia, suami sakit menahun atau cacat (Schaefer, 2012:236). Feminisasi kemiskinan diartikan sebagai perubahan pada tingkat kemiskinan yang menyerang perempuan atau kepala rumah tangga perempuan.

Whitehead (dikutip Cahyono dalam JP.45 2005:11) telah mendata bahwa lebih dari setengah penduduk miskin di negara berkembang adalah kaum perempuan. Feminisasi kemiskinan atau kemiskinan berwajah perempuan dapat diketahui dari beberapa aspek, diantaranya seperti akses perempuan terhadap pekerjaan, akses terhadap gaji atau upah yang sama, akses dalam pendidikan, dan beban kerja. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang kuat agar dapat meningkatkan kemampuan kepala rumah tangga perempuan untuk lebih menguasai lingkungan serta memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatnya jumlah perempuan bekerja, melainkan lebih pada kesetaraan dalam pemberian upah kerja.

Prioritas terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) karena meskipun seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin, kemiskinan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda pula dalam menghadapinya. Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar penghasilan perempuan, maka semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi.

Program PFK tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi lebih dari pada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*) yang dapat

memperkuat diri KRTP dan menyebabkan kemiskinan tetap ada dari generasi ke generasinya.

Memberikan semangat dan memupuk harapan untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan dan dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan kebutuhan tersebut kader dari Tim Penggerak PKK adalah figur yang tepat untuk berposisi sebagai pendamping bagi KRTP. Jejaring PKK dapat menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsung, karena sudah terbentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma. Sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam Jalin Matra PFK diharapkan dapat secara riil memecahkan permasalahan problematika kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang berwujud perempuan di tingkat keluarga.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat KRTP

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu tindakan untuk memberikan suatu daya atau penguatan kepada masyarakat. Proses Pemberdayaan dalam Nanih & Safei (2001:43), menyebutkan pemberdayaan adalah menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan dalam hal meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pembangunan, dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi diri sendiri.

Menurut Anwar (2007:1) pemberdayaan juga sebuah langkah atau proses mengupayakan unsur-unsur keberadaan masyarakat sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat serta keluar dari ketergantungan yang membuat mereka terperangkap dalam kemiskinan

dan keterbelakangan, istilah lainnya adalah memandirikan masyarakat. Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan serta ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk bisa menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Konteks pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras pemberdayaan (*empowerment setting*) mikro, mezzo, dan makro.

- a. Aras Mikro. Dalam aras mikro melakukan pemberdayaan yang dilakukan pada klien secara individu melalui bimbingan, wawancara, *stress management*, *crisis intervention* atau intervensi krisis. Bertujuan untuk membimbing serta melatih dalam menjalankan tugas-tugas dalam kehidupannya.
- b. Aras Mezzo. Pada level ini pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien. Pemberdayaan dilakukan melalui kelompok sebagai media intervensinya. Dinamika kelompok, pendidikan dan kepelatihan, yang biasanya digunakan untuk strategi dalam peningkatan kesadaran, ketrampilan, pengetahuan serta sikap-sikap klien agar mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut dengan Strategi Sistem Besar (*large-system strategi*), karena pada tahapan ini sasaran perubahannya diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perencanaan sosial, perumusan kebijakan, aksi sosial, kampanye, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, itu semua adalah beberapa strategi dalam pendekatan Makro.

Pelaksanaan dalam proses dan pencapain tujuan pemberdayaan diatas dapat di capai dengan beberapa penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P, yaitu: Pemungkin, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219) dalam Suharto (2010: 67):

- 1) Pemungkinan. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari batas-batas kultural dan struktural yang menghambat.
- 2) Penguatan. Yaitu memperkuat kemampuan dan pengetahuan yang masyarakat miliki dalam memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu membangkitkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang dapat menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan. Melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara pihak yang kuat dan yang lemah, serta mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Dalam pemberdayaan ini diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan. Memberikan dukungan dan bimbingan pada masyarakat agar mampu menjalankan tugas dan peranan di kehidupannya. Pemberdayaan ini harus mampu membantu masyarakat agar tidak lagi terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin melemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan. Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan yang memungkinkan setiap orang mendapatkan kesempatan berusaha.

Dubois dan Miley (1992:211) dalam Suharto (2010: 68) memberikan beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a) Membangun relasi pertolongan: merefleksikan respon empati, menghargai pilihan serta hak dari klien untuk menentukan

nasibnya sendiri (*self determination*), menghargai perbedaan serta keunikan dari individu, menekankan kerjasama klien (*client partner ships*).

- b) Membangun komunikasi: menghormati martabat klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, menjaga kerahasiaan klien.
- c) Terlibat dalam pemecahan masalah: memperkuat partisipasi klien dalam segala aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak klien, menyusun tantangan-tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, melibatkan klien dalam pembuatan suatu keputusan dan evaluasi.
- d) Merefleksikan sikap dan nilai profesi: taat kepada kode etik profesi, terlibat dalam pengembangan profesional, riset dan dalam perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk-bentuk deskriminasi serta ketidak setaraan kesempatan.

Berhasilnya dari suatu pemberdayaan didalamnya terdapat empat prinsip yang sering dilakukan menurut Najati dkk (2005:54) yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian dan berkelanjutan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- (1) Prinsip kesetaraan. Adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat. Dinamika atau semangat yang dibangun adalah sebuah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan suatu mekanisme dari berbagai pengetahuan, pengalaman dan keahlian dari seseorang satu dengan yang lain, hal ini adalah prinsip utama yang harus dipegang dalam proses kesetaraan.
- (2) Partisipasi. Yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah suatu program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Maka

perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan dari unsur pendamping yang bisa berkomitmen kepada pemberdayaan masyarakat.

(3) Keswadayaan atau kemandirian. Dasar dari keswadayaan atau kemandirian yaitu menghargai kemampuan masyarakat dari pada bantuan dari pihak lain. Mereka memiliki kemampuan untuk dapat menabung, pengetahuan yang banyak mengenai kendala usahanya, mengetahui kondisi di lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan mempunyai kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang memang sudah lama dipatuhi. Bantuan dari orang lain yang bersifat materil harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak malah membuat semakin lemah.

(4) Berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk proses berkelanjutan, meskipun pada awalnya peran pendamping yang lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sasaran sendiri. Akan tetapi secara perlahan dan pasti peran pendamping akan semakin berkurang karena masyarakat sendiri sudah mandiri atau mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan begitu merupakan salah satu program pemerintah Jawa Timur yang di desain khusus untuk mengurangi permasalahan kemiskinan yang semakin berwajah perempuan (Feminisasi Kemiskinan). Dengan sasaran program untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang keadaan perekonomiannya dan pemenuhan kebutuhan dasarnya belum tercukupi. Selain memberikan bantuan sejumlah dua juta lima ratus yang diberikan berupa barang yang sesuai dengan keinginan klien, serta dengan melakukan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan KRTP.

Kemampuan dalam sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri (KRTP). Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan pemberdayaan pada setiap pendampingan. Pendamping membantu memecahkan persoalan yang dihadapi, maka pendamping dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pendamping untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan.

2.2 Metode Pendampingan Kepada KRTP

Menurut Suriasumantri (2009:119). Metode berasal dari kata *methodos* yang dalam bahas Yunani berarti cara atau jalan. Sedangkan Pendamping adalah suatu kegiatan yang dapat mendorong terjadinya pemberdayaan secara optimal. Pentingnya dalam pendampingan dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan dalam pemahaman antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan dari adanya berbagai perbedaan serta keterbatasan kondisi ekonomi, kondisi sosial dan budaya. Sumodiningrat, (2009:106) Maka dari itu peran pendamping harus dapat dipersiapkan dengan baik agar memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dengan sumber-sumber baik formal dan informal.

Suharto (2010:93-95), menguraikan bahwa pendampingan merupakan salah satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan sebuah program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip dari pendamping yaitu membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri. Peranan pendamping dalam proses pendampingan diwujudkan dalam bentuk sebagai pendamping bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah. Pendampingan merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, memperkuat dukungan, mendaya gunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien pada pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Pengertian tersebut pendamping dapat diartikan sebagai suatu proses relasi sosial antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, pemenuhan kebutuhan dasar, mendayagunakan berbagai sumber serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga klien dapat mandiri secara berkelanjutan dan dapat diwujudkan.

Menurut Susanto (2014:77), pendamping yaitu orang yang kategorinya sebagai pengantar perubahan (*Agent of change*), baik yang berada dalam sistem masyarakat (*Insider change agents*) ataupun yang berada pada luar sistem sosial masyarakat bersangkutan (*outsider change agents*). Suharto (2010:93) juga menjelaskan, pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi diri sendiri sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berusaha dalam mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi pendamping adalah sebagai suatu profesi yang mempunyai metode serta pendekatan dalam melakukan intervensi kepada klien atau yang didampingi, baik itu individu, keluarga dan masyarakat. Maka dapat diartikan pendamping sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pendamping untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan.

2.2.1 Metode Pendampingan

Pendampingan adalah sebuah proses pemberian kemudahan yang berupa fasilitas dan memberikan pendampingan kepada klien dalam mengidentifikasi suatu kebutuhan serta memecahkan sebuah masalah dan mendorong tumbuhnya kemauan dalam proses pengambilan suatu keputusan sehingga klien dapat mandiri secara berkelanjutan. Salah satu cara memberdayakan dan meningkatkan kemampuan KRTP adalah melalui pendampingan dengan metode *Case Work*.

Metode *Social case work* dalam sebuah pemberian bantuan kepada seseorang atau individu yang didasarkan atas sebuah pengetahuan, pemahaman serta penggunaan teknik-teknik secara terampil yang dirancang untuk membantu orang-orang untuk dapat memecahkan masalahnya serta mengembangkan dirinya. (Wibhawa 2010:97).

Metode *social case work* bersifat individual karenanya dikatakan pendekatan mikro yaitu dapat membantu individu yang memiliki suatu masalah, yang bersifat eksternal atau yang berasal dari lingkungan sosialnya, masalah internal atau yang berasal dari diri sendiri. Prinsip dasar bimbingan sosial individu adalah :

- a. Penerimaan, pekerja sosial harus dapat menerima dan menghormati klien dalam setiap kondisi yang dialami oleh klien atau individu yang didampingi.
- b. Komunikasi, antara klien dan pendamping harus dapat saling memberi dan menerima informasi atau bertukar informasi.
- c. Individualisasi, pendamping harus dapat memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang berbeda, yang unik antara individu satu dengan individu yang lain.
- d. Partisipasi, pendamping harus ikut secara langsung dalam membantu untuk mengatasi permasalahan klien.
- e. Kerahasiaan, pendamping juga harus mampu untuk menjaga dan merahasiakan informasi yang diberikan oleh klien.
- f. Kesadaran diri, sebagai manusia, pendamping menyadari akan respon klien serta motivasi dan relasi bantuan profesional.

Langkah-langkah dalam proses pendampingan selama kurun waktu dua belas Bulan mempunyai beberapa tahapan dalam proses pendampingannya dimana proses pendampingan melakukan pengawasan dan pengendalian, hal tersebut merupakan tahap manajemen untuk dapat mencapai keberhasilan dari target yang ingin

dicapai. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan permasalahan.

Dalam hal ini *casework* memusatkan perhatiannya kepada aspek-aspek yang diindividualisasikan. Proses tersebut terdiri dari serangkaian usaha dalam pemecahan masalah yang dilakukan melalui hubungan yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu untuk dapat mempengaruhi pribadi seseorang sehingga dapat mengembangkan kemampuannya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya dan mempengaruhi masalah tersebut agar dapat segera diselesaikan. Ada enam tahapan proses pertolongan dalam metode *casework*, yaitu

1) Tahap Intervensi

Max Siporin (1975) mengklarifikasikan proses intervensi dalam lima tahap yaitu:

a) *Engagement, Intake and Contract* adalah suatu keterlibatan pekerja sosial dalam situasi, menciptakan komunikasi yang terbuka dan merumuskan asumsi permasalahan dengan mendefinisikan peranan masing-masing yang didasarkan atas aspirasi klien dan hal yang ditunjukkan oleh pekerja social, pada tahap ini klien melakukan kontrak dengan pekerja sosial terkait persetujuan mengenai proses pada tahap intervensi selanjutnya. (Sukoco, 2011:150)

b) *Assesment* (pengungkapan dan pemahaman masalah) adalah tahap yang pertama dalam proses penyelesaian masalah serta proses dalam mendapatkan pemahaman mengenai masalah tersebut. Sebelum masuk dalam tahap *assesment* lebih lanjut ada hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu:

(1) Melibatkan klien adalah sesuatu yang sangat esensial.

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya pernyataan masalah yang terlalu awal.

(2) *Assesment* selalu melibatkan pengambilan keputusan.

- (3) Tidak selalu satu kamus yang memuat jawaban dari setiap masalah yang ditemui, *case worker* harus tetap membuat keputusan pada setiap masalah.
 - (4) *Assesment* selalu mempertimbangkan potensi atau kekuatan klien, pengetahuan pada potensi atau kekuatan klien dapat mempermudah untuk pencarian solusi.
 - (5) Didalam *assesment* tidak selalu ditemukan sebuah definisi masalah jelas dan tunggal. Jadi membuat identifikasi dan prioritas yang terbaik dari masalah.
 - (6) *Assesment* merupakan suatu proses berkelanjutan. Karena semua situasi, potensi dan kekuatan klien bukanlah sesuatu yang tetap atau statis melainkan selalu berubah-ubah secara dinamis.
- 3.) *Planning* (perencanaan) adalah suatu proses rasional yang melibatkan design untuk dapat melakukan tindakan agar mencapai tujuan yang spesifik pada masa yang akan datang. Perencanaan dalam proses intervensi merupakan perubahan dari definisi masalah kepada solusi masalah, tentang apa yang akan dilakukan, oleh siapa, bagaimana dan dalam sequence apa. Dalam tahapan ini pula ditetapkan tujuan yang ingin dicapai.
 - 4.) *Intervention* (Intervensi) adalah pekerja sosial dengan klien menjalankan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kontrak, intervensi dilakukan berdasarkan atas assesment yang telah diperoleh, pekerja sosial melakukan apa yang memang klien tidak dapat lakukan sendiri.
 - 5.) *Evaluation and termination* (Evaluasi dan terminasi) adalah proses pengawasan klien (Pendamping) dan klien pada pelaksanaan pemecahan masalah yang sedang dilakukan atau yang sedang berjalan. Apakah tujuan dari proses intervensi yang diinginkan sudah tercapai atau

belum. Sedangkan Termination adalah pemutusan hubungan pekerja sosial (pendamping) dengan klien yang sesuai dengan kontak yang telah disepakati bersama. Namun apabila tujuan tidak dapat tercapai atau belum tercapai, maka pekerja sosial (pendamping) dan klien menentukan kembali ke proses awal atau mengakhiri.

Seorang pendamping dalam melakukan pendampingan program mempunyai peranan penting dalam proses pendampingan kepada KRTP, Peran pendamping sangat menentukan keberhasilan dari suatu program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan.

Pendamping Dalam hal ini mempunyai peran dalam metode pendampingan dengan menggunakan berbagai ketrampilan yang bervariasi tergantung pada tahap perkembangan individu atau kelompok. Mengacu pada Ife (1995) Peran pendamping diantaranya adalah:

- (a) Fasilitator. Sebagai bentuk tanggung jawab untuk membantu klien agar menjadi mampu menangani tekanan situasional atau tradisional. Dalam fasilitator mempunyai suatu peran yang berkaitan dengan memberikan motivasi, kesempatan, serta dukungan untuk masyarakat. Bentuknya seperti melakukan mediasi, negoisasi, membangun konsensus bersama, melakukan pengorganisasian, pemanfaatan sumber, dan memberikan dukungan.
- (b) Pendidik (*Educator*). Peran aktif pendamping sebagai agen yang memberikan ide serta masukan yang positif dan kreatif yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, serta bertukar masukan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampingi. Dapat membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat.

- (c) **Broker.** menjadi perantara atau menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.
- (d) **Peran-peran teknis.** Peran ini lebih mengarah kepada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis. Pendamping diharuskan mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasi kelompok, serta melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan berbagai ketrampilan dasar seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberikan konsultasi dan mencari serta mengatur sumber dana.

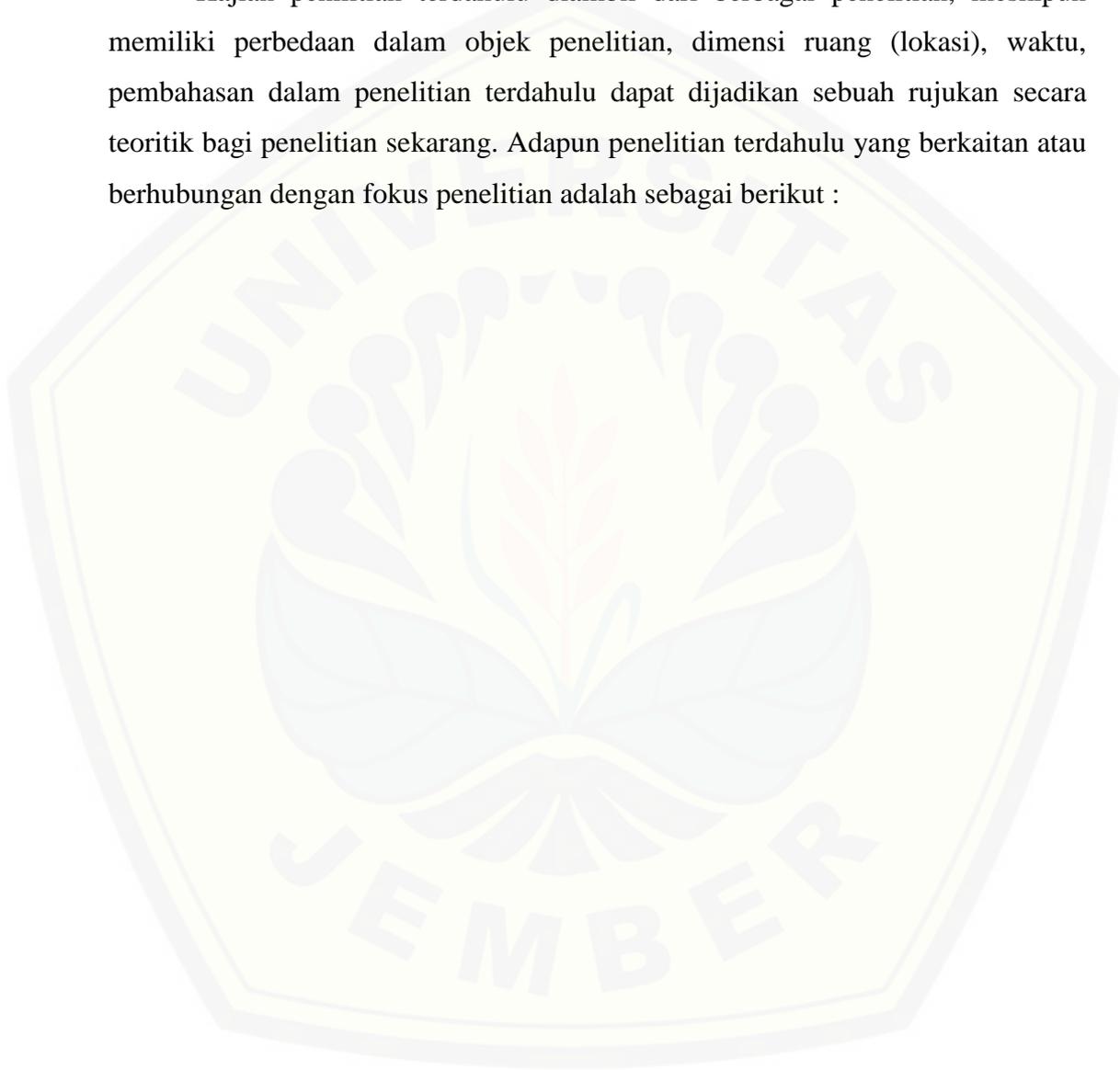
Pengertian lain dari Pendamping yaitu tenaga pendukung serta mitra program pemberdayaan dari Sekretariat Provinsi dalam mengelola kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) yang berasal dari lembaga yang ditunjuk oleh instansi pemerintah lain yang mengelola kegiatan pendampingan, didukung dengan tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Maka dari itu pendamping sangat mempunyai peran aktif dalam membantu, memberdayakan, dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta membuat klien lebih mandiri dan sejahtera.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan serta acuan kerangka berfikir untuk dapat mengkaji suatu masalah atau fenomena, sehingga menjadi suatu penelitian. Untuk bisa mendapatkan informasi yang dapat mendukung suatu penelitian, maka perlu dilakukan penelaahan tinjauan

kepastakaan terdahulu. Adanya tinjauan penelitian terdahulu diperlukan untuk menjadi sebuah acuan penelitian yang akan dilakukan nantinya, sehingga dapat diketahui persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan penelitian sekarang.

Kajian penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian, meskipun memiliki perbedaan dalam objek penelitian, dimensi ruang (lokasi), waktu, pembahasan dalam penelitian terdahulu dapat dijadikan sebuah rujukan secara teoritik bagi penelitian sekarang. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan atau berhubungan dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut :



No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan
1.	Moh. Zanuvar Zarkasi/ 2014	Peran Janda Dalam Memperoleh Kebutuhan Keluarga di Perumahan Mastrip RW 21 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember	Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	mengenai status seorang janda menimbulkan peran baru dan semua tanggung jawab yang semula ditanggung bersama suami namun kini harus ditanggung sendiri oleh janda. masalah keuangan yang semula bisa bergantung kepada suami kini perempuan harus mencari nafkah sendiri. Pemenuhan kebutuhan primer keluarga menjadi terhambat hak asuh yang dipegang oleh janda tersebut menjadi tanggung jawabnya, pemenuhan kebutuhan menjadi berlipat. Harus memenuhi kebutuhan untuk makan keluarga sehari-hari, untuk biaya sekolah, dan mengurus keluarganya. Hal tersebut menuntut janda harus dapat mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.	Penelitian tersebut dapat menjadi sebagai masukan dalam penelitian ini dimana terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas terkait mengenai janda (kepala rumah tangga perempuan), yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.
No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan
2.	Susetyo Arie Wibowo/ 2015	Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Peran perempuan yang menjadi ganda karena harus bekerja pada sektor domestik dan sebagai buruh pabrik Deppo Triplek Dengan bekerjanya istri tersebut mempunyai peran ganda yakni pada sektor domestik (dalam keluarga) dan public, dalam pengupayaan kebutuhan keluarga.	Dalam penelitian ini dimana terdapat kesamaan terkait membahas mengenai ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang bekerja pada sektor domestik dan publik. Namun

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan
3.	Oktiano Regian Zufri/2007	Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang	Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Peran pendamping Program Keluarga Harapan merupakan seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota atau peserta PKH dapat berdaya untuk membangun hidup mereka dari kemiskinan menjadi hidup secara mandiri.	Penelitian tersebut dapat menjadi sebagai masukan dalam penelitian ini dimana terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai peran pendamping dalam mendampingi program Penanggulangan Kemiskinan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat perbedaan-perbedaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan yang pertama diantaranya adalah perbedaan dalam segi lokasi penelitian serta fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada Peran Janda dalam Memenuhi Kebutuhan keluarga. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada Metode Pendampingan Kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Perbedaannya yang kedua adalah penelitian terdahulu membahas mengenai Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun disini peran ibu membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari, sedangkan peneliti membahas mengenai metode pendampingan melalui program penanggulangan feminisasi kemiskinan yang mana sasaran dari penelitian ini adalah Kepala Rumah Tangga Perempuan (Janda) yang harus mencukupi kebutuhan dasar keluarganya sendiri.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian dahulu memilih fokus pada peran pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan penelitian ini lebih fokus pada metode pendampingan kepala rumah tangga perempuan melalui program Feminisasi Kemiskinan (PFK) dalam penelitiannya.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menjelaskan mengenai alur logika penelitian dalam memaparkan sebuah fenomena yang sedang dikaji. Fenomena yang peneliti angkat adalah bermula dari berhasilnya suatu program sosial Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) yang mempunyai Program turunan yaitu Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), program yang di desain khusus bagi masyarakat belum beruntung secara ekonomi, sosial dan budaya, terutama bagi kepala rumah tangga perempuan (KRTP).

Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) berfokus untuk mengentaskan kemiskinan yang semakin berwajah perempuan (Feminisasi

Kemiskinan) di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jombang. Sasaran dari program PFK adalah Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dengan tujuan dari pelaksanaan program Jalin Matra PFK adalah mengoptimalkan serta mengefektifkan program PFK dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Peneliti berfikir program PFK ini penting yang nantinya dapat sangat berpengaruh untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), karena perempuan yang selama ini banyak dipandang sebelah mata dan dirugikan dalam berbagai aspek, misalnya kasus perceraian, ditinggalkan oleh suami dalam kurun waktu minimal enam bulan tanpa diberi nafkah lahir dan batin, dengan begitu yang dirugikan adalah kaum perempuan, disebabkan karena perempuan secara gender lebih dinomorduakan.

Tujuan dari adanya program PFK yaitu memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap kepala rumah tangga perempuan (KRTP) melalui optimalisasi peran kader TP-PKK sebagai pendamping. Memperluas akses rumah tangga sasaran dengan KRTP terhadap usaha-usaha produktif untuk dapat meningkatkan aset usaha atau pendapatan keluarga, Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, Serta mendorong motivasi berusaha dan kemampuan KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pelaksanaan program PFK, pendamping mempunyai peran khusus dalam proses pendampingan KRTP yaitu berperan sebagai fasilitator, educator, Broker dan peran-peran teknis. Dengan tujuan untuk memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, mendayagunakan berbagai sistem sumber, meningkatkan akses klien pada pelayanan dasar, serta mendorong inisiatif pengambilan keputusan.

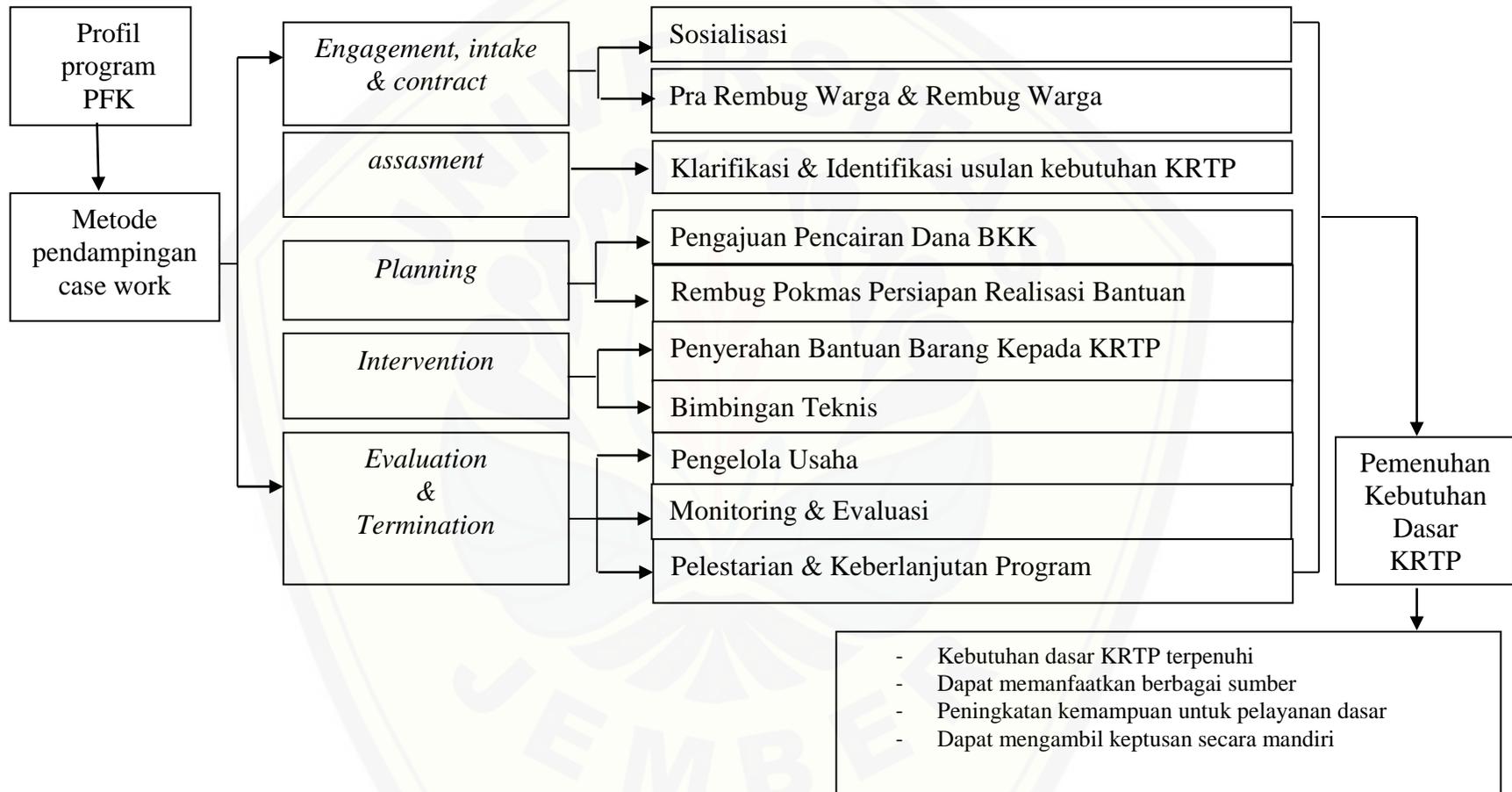
Menggunakan metode sebagai dasar penerapannya yaitu metode *Case Work* dengan lima tahap intervensi yaitu intake, assessment, planning, intervensi, evaluasi dan terminasi.

Adanya program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dari tahun 2014-2019 di Jawa Timur angka Kamiskinan pada perempuan menunjukkan penurunan pada setiap tahunnya. Dengan hasil yang dicapai yaitu pemenuhan kebutuhan dasar KRTP terpenuhi, dapat memanfaatkan berbagai sumber,

peningkatan kemampuan untuk pelayanan dasar dan KRTP dapat mengambil keputusan secara mandiri. Kesimpulanya Dari hasil data tersebut dapat dikatakan bahwa program PFK berhasil dan kesejahteraan KRTP menjadi meningkat.



Bagan 2.1 Alur Pikir Konsep Penelitian



Sumber: Dikelola Peneliti 19 Juli 2019

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk mejabarkan sebuah fenomena-fenomena, untuk memahami suatu fenomena tersebut dan menghubungkan fenomena satu dan fenomena yang lain. Penelitian pada hakikatnya merupakan usaha untuk dapat menemukan suatu kebenaran dari fenomena yang diteliti, yang kemudian dapat menjelaskan fenomena yang diteliti, sedangkan dalam penelitian dibutuhkan sebuah metode penelitian. Adapun metode penelitian pada dasarnya dimaknai sebagai cara ilmiah yang berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional (penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal), empiris (dapat diaamati langsung atau dapat diamati oleh indra manusia), dan sistematis (proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis).

Oleh sebab itu penggunaan metode dalam penelitian sangat penting dan sangatlah mendasar untuk mengawali sebuah proses penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri dimaksudkan untuk dapat memahami serta mencari makna di balik fakta untuk menemukan kebenaran (Sujarweni, 2014:21).

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2012:4) mengungkapkan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan atau dari orang-orang yang sedang diamati.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mampu menggambarkan keadaan yang nyata dan secara ilmiah di lapangan. Alasan dalam penelitian kualitatif ini juga dikarenakan dapat digunakan memahami sebuah fakta atau kebenaran yang tersembunyi dibalik fenomena secara jelas. Pemaknaan terhadap sebuah fenomena yang dikaji dalam hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan menjadi sebuah pertimbangan. Karena sering kali fakta atau apa yang ditampakkan dari data-data

yang diperoleh tidak selalu data tersebut benar atau valid tanpa adanya kajian yang mendalam pada fenomena yang dikaji.

Dalam penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui metode dalam pendampingan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) pada program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK). Dengan sasaran KRTP Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Jawa Timur. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan, peneliti selanjutnya akan mengkaji secara mendalam untuk dapat mendeskripsikan mengenai metode pendamping dalam pendampingan KRTP yang hasilnya membuat pendapatannya bertambah dan KRTP sejahtera.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan serta memahami kondisi dari fenomena atau penelitian secara menyeluruh. Menurut Bungin (2012:68) penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat dan menjadi objek penelitian serta berupaya untuk menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu yang ditemukan dalam masyarakat.

Sehingga melalui penelitian ini dapat dilakukan pengumpulan data dan penjelasan terkait fakta yang berada di lapangan mengenai fenomena yang diteliti secara keseluruhan dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Hasil yang diperoleh akan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yaitu metode pendampingan kepada kepala rumah tangga perempuan (KRTP) melalui program penanggulangan feminisasi kemiskinan di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

3.3 Metode Penentuan Lokasi

Pada tahap penelitian tahap awal yang dilakukan adalah penentuan lokasi, hal tersebut adalah salah satu tahapan utama yang dilakukan saat penelitian. Ketepatan dalam penentuan lokasi sangatlah penting dalam penelitian ilmiah. Subagyo (1997:35) memaparkan :

“Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Intinya, lokasi penelitian yang baik atau objek penelitian yang sesuai dengan objek permasalahannya”

Dalam penentuan Lokasi penelitian dapat dikatakan menjadi salah satu elemen yang penting untuk diperhatikan, karena menyangkut pencarian data-data penting yang diperlukan dalam penelitian. Ketepatan dalam menentukan lokasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan, karena berkaitan dengan kebenaran suatu temuan yang digali di lapangan.

Penelitian dalam menentukan lokasi penelitian menggunakan teknik *purposive area*, yaitu lokasi yang memang sengaja dipilih dari awal dengan pertimbangan yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini berlokasi di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Jawa Timur. Pertimbangan peneliti memilih Desa Bulurejo menjadi lokasi penelitian ialah karena Desa Bulurejo adalah salah satu Desa penerima program PFK yang tingkat pendapatan KRTP meningkat dilihat dari pendapatan perbulan sebelum mendapatkan program yaitu sebesar Rp 500.000 – 800.000 menjadi Rp 750.000 – 1.050.000 perbulan. Kemudian KRTP mampu mengembangkan usaha-usaha produktif lainnya seperti membuat jamu, olahan makanan, ketrampilan menjahit, pedagang makanan dan lain sebagainya yang dikelola langsung oleh KRTP, serta adanya kerja sama pendampingan yang baik antara pendamping, TP-PKK dan Sekretariat Desa.

Dari ketiga alasan diatas yang menjadi dasar peneliti untuk memilih lokasi di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang dirasa tepat dalam penelitian mengenai Metode Pendampingan Kepada Kepala Rumah Tangga

Perempuan (KRTP) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar. studi Diskriptif melalui Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK).

3.4 Teknik Penentuan Informan

Menurut Bungin (2012:111), Informan adalah orang yang berperan penting dalam penelitian, yang akan membantu kita dalam memberikan informasi mengenai fenomena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Informan sebagai subyek yang dapat dimintai informasi, diwawancarai atau fakta dari suatu objek penelitian. Moleong (2012:132) menyatakan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk dapat memberikan sebuah informasi serta kondisi latar belakang dari penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa informan merupakan sumber data yang menyediakan informasi ataupun data yang dibutuhkan serta yang berkaitan dengan fenomena penelitian.

Informan penelitian adalah suatu subjek yang memahami informasi subjek penelitian sebagai pelaku yang memahami betul objek penelitian (Bungin, (2012:78)). Informan diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Mempunyai informasi artinya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta memahami permasalahan. Sehingga penelitian ini memberikan kemudahan bagi peneliti untuk dapat menentukan informan yang akan diwawancarai sesuai dengan tujuan dalam penelitian.

Terkait dengan teknik penelitian penentuan informan, terdapat dua tipe informan yang digunakan yaitu informan pokok (*Primary informan*) dan informan tambahan (*Secondary informan*).

3.4.1 Informan Pokok

Informan pokok (*primary informan*) adalah orang yang memiliki dan mengetahui informasi atau data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan secara langsung juga terlibat dalam fenomena penelitian, yang sebagai fungsi utama dalam melakukan

penelitian. Menurut Sugiyono (2015:47) Informan kunci sebagai informan pokok harus mencakup kriteria sebagai berikut:

- a. Subjek yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan. Seseorang yang akan dipilih sebagai informan pokok harus mempunyai pengalaman mendampingi atau mengelola program penelitian minimal satu tahun;
- b. Subjek yang masih terlibat secara penuh dan aktif dalam kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. Keterlibatan secara aktif di lokasi penelitian menentukan kualitas informasi data yang diberikan terhadap peneliti. Maka dari itu, seorang peneliti harus benar-benar memastikan bahwa informan yang akan dipilih itu aktif dalam kegiatan yang sedang diteliti;
- c. Subjek mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi. Informan pokok harus memiliki waktu yang cukup untuk memberikan keterangan dan informasi penelitian kepada peneliti sehingga diharapkan penelitian selesai dalam waktu yang efektif serta menghasilkan data yang benar-benar asli di lapangan;
- d. Subjek dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu. Peneliti harus memastikan bahwa informan pokok dapat memberikan keterangan dan informasi yang objektif dan sesuai dengan realita atau fakta yang ada.

Dari beberapa kriteria diatas maka informan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pendamping desa yang berpengalaman dalam melakukan pendampingan pada KRTP
- 2) Pendamping kabupaten, pendamping yang berada di tingkat kabupaten yang membantu memfasilitasi pelaksanaan pendampingan di tingkat desa.
- 3) Rumah tangga sasaran, Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).

Berdasarkan kriteria diatas, maka informan pokok diatas dapat memberikan informasi yang akurat dan faktual mengenai metode pendampingan kepada kepala rumah tangga perempuan (KRTP) melalui program penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK). Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 5 informan pokok. Berikut ini diskripsi atau gambaran umum mengenai informan pokok :

Tabel 3.1 Informan Pokok

No	Nama	Jenis kelamin	pendidikan	Pekerjaan
1	LY	Perempuan	S1	Pendamping kabupaten
2	SQ	Perempuan	SMK	Pendamping desa
3	MA	Perempuan	SMK	Pendamping desa
4	SI	Perempuan	SMP	KRTP
5	RH	Perempuan	SMP	KRTP

Sumber : Data lapangan diolah peneliti 2019

Nama : SQ
 Umur : 33 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Jabatan : PD desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
 Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Kejuruan
 Alamat : Dsn. Kedaton, Ds. Bulurejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang

Beliau merupakan tenaga pendamping desa yang mendampingi program Jalin Matra PFK di desa Bulurejo tahun 2018. Sebelum SQ menangani program Jalin Matra PFK, beliau merupakan Pendamping

desa dari program jalin matra BRTSM ditahun 2017, beliau juga merupakan salah satu anggota aktif di PKK desa Bulurejo.

Nama : MA
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jabatan : PD desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas
Alamat : Dsn. Kedaton, Ds. Bulurejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang

Informan MA juga merupakan tenaga pendamping desa yang mendampingi program Jalin Matra PFK di desa Bulurejo pada tahun 2018. Informan MA adalah lulusan SMA sederajat yang ada di Jombang, beliau juga aktif didalam hal sosial masyarakat dan juga mahir dalam mengoperasikan teknologi sehingga dapat mempermudah pelaporan data KRTP setiap saatnya.

Tenaga pendamping kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh dinas PMD Provinsi Jawa Timur di bawah manajemen Perguruan Tinggi pendamping untuk memfasilitasi pelaksanaan JM PFK di kabupaten. Tenaga pendamping kabupaten adalah tenaga yang direkrut oleh kabupaten secara swakelola ataupun kontraktual. Dibawah ini adalah biodata dari pendamping kabupaten antara lain :

Nama : LY
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jabatan : Tenaga Pendamping Kabupaten
Pendidikan terakhir : S1 Matematika

Alamat : JL.Kh.Mansyur RT.03 RW.05 Ds Jatirejo,
Diwek Jombang

Beliau ini merupakan tenaga pendamping Kabupaten yang mendampingi program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di desa Bulurejo tahun 2018. Beliau juga sudah menjadi pendamping kabupaten dari tahun 2017. Beliau merupakan lulusan sarjana S1 di perguruan tinggi swasta dan juga beliau pernah mengikuti pendidikan non formal yaitu pelatihan konseling bagi pelaku KDRT, pelatihan menjahit tingkat pertama, pelatihan Co dan pelatihan pembuatan dodol salak dan lain sebagainya.

Beliau juga merupakan salah satu anggota aktif di Badan Kewaspadaan Masyarakat (BKM) karang taruna di desa Jatirejo diwek, dan juga warga yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, pengabdian atau pemberdayaan kepada masyarakat, seperti pernah menjadi Forum penanggulangan aid (FPA) yang menjabat sebagai bendahara, pernah menjadi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang menjabat sebagai Co cab Jombang dan Jaka Jatim yang menjabat sebagai devisi perempuan.

Beliau juga aktif dalam kegiatan penelitian seperti riset penyusunan model VERVAL yang menjabat dalam tim tenaga lapang kecamatan pada tahun 2015 dan riset PIPA JKN yang menjabat sebagai Kord jabupaten pada tahun 2016. Beliau juga mempunyai pengalaman kerja profesional sebagai Co di program Mencare pada tahun 2015.

Nama : SI
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama
Alamat : Dsn. Kedaton, Ds. Bulurejo, Kec. Diwek,
Kab. Jombang

Beliau merupakan sasaran kepala rumah tangga produktif dari program PFK yang biasa disebut dengan KRTP. Setiap harinya beliau berjualan makanan atau minuman, dan mempunyai anak sebanyak 6 orang.

Nama : RH
Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama
Alamat : Dusun Bulurejo RT/RW 004/01, Diwek, Jombang

Beliau merupakan sasaran program kepala rumah tangga produktif dari program PFK yang biasa disebut dengan KRTP. Setiap harinya beliau berjualan di warung makan, beliau mempunyai anak sebanyak 5 orang.

3.4.2 Informan Tambahan

Selain informan pokok (*primary informan*), dalam penelitian terdapat informan tambahan (*secondary informan*) yaitu mereka yang dapat memberikan sebuah informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Bagong dan Sutinah, 2005:172). Dalam kaitannya mengenai informan sekunder, ada kriteria yang menjadi pedoman

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bahwa informan dapat digunakan oleh peneliti mengetahui tentang adanya segala sesuatu mengenai fenomena yang sedang dikaji meskipun dalam fenomena yang dikaji keberadaan informan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah :

- a. Ketua seksi bidang pemberdayaan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mana termasuk dalam sekretariat kabupaten yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jawa Tmur.

Tabel 4.1 Informan Tambahan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	EP	Laki-laki	S1	Sekretariat Kabupaten DPMD

Sumber : data lapangan diolah peneliti 2019

1) Informan EP

Informan EP merupakan Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di DPMD kabupaten Jombang, beliau berumur 45 tahun. Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan berada di bidangnya sehingga beliau tahu mengenai gambaran program Jalin Matra khususnya wilayah Kabupaten jombang. Selain itu, beliau juga yang memonitoring dan mengevaluasi langsung program Jalin Matra PFK pada tingkat kabupaten. Alamat beliau berda di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, yang tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang diharapkan dan ditetapkan. Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, jadi teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai metode pengumpulan data akan dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah salah satu teknik dari pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Penelitian dengan judul “Metode pendampingan kepada kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dalam pemenuhan kebutuhan dasar” salah satu teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan observasi atau melakukan pengamatan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang berkaitan dengan tema penelitian. Berdasarkan dari tema penelitian maka observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah yang berkaitan mengenai metode atau proses pendampingan. Observasi yang pertama dilakukan peneliti adalah mengenai proses pelaksanaan program dari tahap awal sampai tahap akhir, dan observasi kedua mengamati proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping pada KRTP.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dilakukan secara langsung dan melihat pada realita pada saat dilapangan. Observasi yang dilakukan tidak terjadwal, akan tetapi dilakukan setiap saat peneliti melakukan penelitian agar menemukan data yang valid. Observasi yang dilakukan oleh peneliti, tidak semuanya peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan. Akan tetapi, beberapa kali peneliti berpartisipasi secara langsung dalam observasi, sebagai contoh pada saat melakukan *asassment* pada klarifikasi dan identifikasi, *intervensi* penyerahan bantuan dan pada saat evaluasi dan terminasi melakukan monitoring dan evaluasi. Observasi yang tidak terlibat secara langsung sebagai contoh pada saat melakukan bimtek, pengelola usaha, pengajuan pencairan dana BKK, melakukan pendampingan rembug pokmas, dan saat pendampingan pelestarian program.

Hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berupa catatan peneliti. Selain catatan, data yang diperoleh hanya berupa prespektif peneliti dari hasil melihat dari fenomena yang ada di

lapangan yang berkaitan dengan metode atau proses pendampingan pada KRTP. Data hasil pengamatan atau observasi dapat digunakan sebagai pembanding dalam melakukan analisis data dan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Hasil data penelitian yang sudah dikatakan valid apabila data yang didapat dari ketiga teknik pengumpulan data benar dan apabila dibandingkan hasilnya sama. Maka sebab itu, peneliti melakukan teknik pengumpulan data salah satunya dengan tehnik observasi atau melakukan pengamatan. Berikut pelaksanaan Observasi yang dilakukan peneliti :

Tabel 5.1 Jadwal Observasi

No	Waktu	Tempat	Keterangan
1	15 Februari 2019	DPMD Kabupaten Jombang	Melakukan izin penelitian dengan tema program PFK yang dinaungi oleh dinas PMD kabupaten
2	18 Februari 2019	Desa Bulurejo RT/RW 003/01	Ikut melakukan pendampingan pada KRTP
3	18 Februari 2019	Desa Bulurejo RT/RW 004/01	Melakukan pengamatan pada proses pendampingan KRTP
4	21 Februari 2019	Desa Bulurejo RT/RW 009/02	Melakukan pengamatan pada proses pendampingan KRTP
5	21 Februari 2019	Desa Bulurejo RT/RW 010/02	Melakukan pengamatan pada proses pendampingan KRTP
6	21 Februari 2019	Desa Bulurejo RT/RW 001/03	Melakukan pengamatan pada proses pendampingan KRTP
7	25 Februari 2019	Balai desa Bulurejo	Melakukan pengamatan bimtek
8	5 Maret 2019	Desa Bulurejo	Melakukan pengamatan pengelola usaha
9	20 Maret 2019	Desa Bulurejo	Melakukan pengamatan pengelola usaha
10	22 Maret 2019	Desa Bulurejo	Ikut melakukan monitoring dan evaluasi bersama sekretariat kabupaten dan pendamping

Sumber : data lapangan diolah peneliti 2019

3.5.2 Wawancara

Selain dengan observasi atau pengamatan langsung, dalam ilmu sosial data dapat juga diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara. Wawancara sendiri adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden, menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dokumentasi.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada informan yang kemudian dijawab oleh informan tersebut dan direkam dengan alat perekam serta ditulis sebagai catatan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan disesuaikan dengan tema penelitian agar wawancara berjalan terarah. Wawancara dilakukan dengan dengan cara tidak selalu menggunakan bahasa formal, maka peneliti menyesuaikan bahasa yang digunakan informan agar informan lebih leluasa dalam menyampaikan jawabannya.

Proses wawancara akan menghasilkan data yang berupa rekaman audio dan catatan-catatan. Alat yang digunakan selama wawancara adalah *handphone* untuk merekam dan buku untuk mencatat poin-poin wawancara yang dilakukan. Hasil rekaman tersebut yang diolah oleh peneliti dengan cara ditranskrip sesuai kategorisasi data dan kemudian dilakukan analisis data. Data hasil wawancara ini juga berguna untuk keabsahan data melalui triangulasi.

Teknik pengumpulan data kedua ialah wawancara, dalam penelitian yang objek penelitiannya ialah metode pendampingan KRTP dalam program PFK. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah pendamping desa dan pendamping kabupaten. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ialah data tentang profil dan tujuan program JM PFK, metode pendampingan dan peran pendamping. Semua data tersebut diperoleh dari proses wawancara kepada sejumlah

informan yang bersangkutan dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Berikut jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 6.1 Jadwal Wawancara

No	Waktu	Informan	Tempat
1	22 Februari 2019	LY	Rumah informan LY
2	27 Februari 2019	EP	Kantor dinas PMD
3	13 Maret 2019	SQ	Rumah informan SQ
4	24 Maret 2019	MA	Rumah informan MA
5	24 Maret 2019	SI	Rumah informan SI
6	24 Maret 2019	RH	Rumah informan RH

Sumber : data lapangan diolah peneliti 2019

3.5.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga dalam penelitian ini adalah dokumentasi. teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang berupa catatan, buku pedoman, transkrip, majalah, notulen rapat, agenda, foto, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian ini “Metode pendampingan kepada kepala rumah tangga perempuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar”. Dengan melakukan teknik ini dapat memperoleh data yang mendorong data yang lain. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan meminta dan melihat arsip-arsip, buku pedoman, dan lembar atau form assessment KRTP yang berkaitan dengan tema penelitian. Selain meminta secara langsung kepada pendamping, peneliti juga menggunakan kamera untuk mendokumentasikan objek-objek penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ialah berbentuk buku profil program JM PFK, dan foto-foto proses pendampingan. Data hasil dokumentasi bisa digunakan sebagai pembandingan dengan sumber data lainnya. Selain itu data dokumentasi juga berguna sebagai data pendukung dari sumber data yang lain sehingga data yang didapat bisa

akurat dan valid. Sebagai contoh data yang didapat dari hasil wawancara bisa didukung dengan hasil dokumentasi pendamping, sehingga data tersebut bisa dikatakan valid.

3.6 Teknis Analisis Data

Dalam analisa data yang berbentuk deskriptif, data diperoleh dari berbagai sumber, menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya tuntas. Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus mengakibatkan variasi data sangat tinggi sekali. Didukung oleh Boghdan dalam Sugiyono (2015:244) mengatakan:

“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you to present what you have discovered to others”

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Miles dan Hubermen (1984) dalam Sugiyono (2015:246) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Pada saat melakukan wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban dari yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai pada tahap tertentu sampai dianggap data yang diperoleh kredibel. Aktivitas dalam analisis data mempunyai tahapan-tahapan terdiri dari: pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan. Dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Idrus (2009:147):

a. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pada tahapan ini peneliti mulai melakukan pengumpulan data yang diperlukan, dimana data yang di akumulasi adalah data yang

telah ditentukan dalam perencanaan sebelumnya melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang secara terperinci tercatat dalam catatan lapangan yang meliputi dua unsur yaitu unsur deskriptif dan unsur reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan yang memuat data alami yang dirasakan, dilihat, didengar, disaksikan ataupun yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian. Sedangkan catatan reflektif merupakan catatan yang memuat mengenai kesan, komentar, anggapan, maupun penafsiran mengenai temuan penelitian yang dikemukakan, hal tersebut digunakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. (Idrus, 2009:148)

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Miles dan Huberman (1992) dalam Idrus (2009:62), reduksi data (*data reduction*) merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga didefinisikan sebagai kegiatan merangkum data yang telah terkumpul, yang kemudian memilih hal-hal yang pokok atau memfokuskan pada hal yang penting. Pada tahapan yang kedua, peneliti mereduksi data dengan mencermati data-data mentah hasil dari wawancara yang dicatat secara terperinci untuk dipilih dengan cara memilah-milah, disederhanakan dan difokuskan data yang telah diperoleh oleh peneliti.

Dalam reduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu apabila peneliti menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Maka hasil dari reduksi data kemudian akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan

yang akan mempermudah peneliti dalam penelitian untuk memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Usman, 2002:85).

c. Penyajian data (*Display Data*)

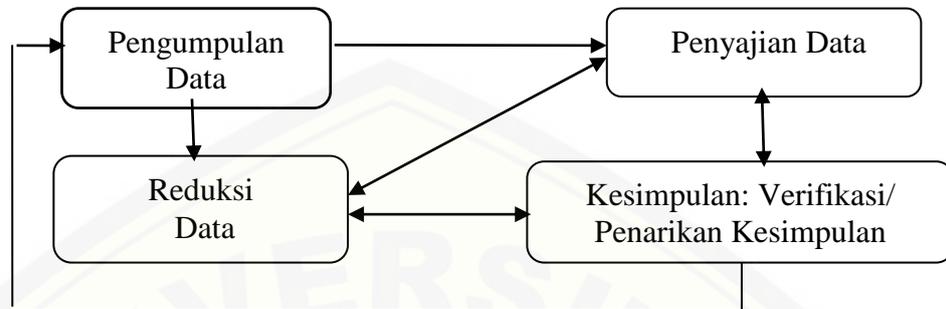
Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bagan. Bentuk penyajian tersebut diorientasikan agar informasi yang ada dapat dipahami dan dimengerti tanpa mengurangi kualitas data yang dapat membuat pembaca salah menafsirkan maksud dari hasil kajian yang diuraikan.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Pengambilan kesimpulan yang dilakukan didasarkan pada data yang telah diperoleh dalam kegiatan penelitian, yang mana didalamnya, pada awal penarikan kesimpulan masih bersifat sementara. Kesimpulan awal yang bersifat sementara dapat berubah apabila tidak ditemukannya bukti-bukti penguat dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015:252).

Sugiyono (2015:252-253) menjelaskan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau belum jelas sehingga

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



Bagan 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (Idrus, 2009:151)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian sangatlah diperlukan dalam sebuah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan disetiap informasi yang diterima oleh peneliti mempunyai makna dan tidak dapat diterima begitu saja oleh peneliti, sehingga harus benar-benar mengkroscek data sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid. Moleong (2012:104) yang dimaksud dengan keabsahan data adalah setiap keadaan harus memenuhi: (1) mendemonstrasi nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan (3) memperoleh keputusan luas yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan serta keputusan-keputusannya.

Menurut Denzim dalam Moleong (2012:124) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu:

a. Triangulasi dengan sumber

Digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan serta mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda dalam sebuah penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

- 1.) Membandingkan data hasil penelitian dengan hasil wawancara;

- 2.) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- 3.) Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- 4.) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang sebagai rakyat biasa. Orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- 5.) Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi menggunakan metode

Menurut Patton (Moleong, 2012:120), menjelaskan terdapat dua strategi yaitu:

- 1) Melakukan pengecekan atau peninjauan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data;
- 2) Melakukan peninjauan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi menggunakan teori

Menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2012:122), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat dipaksakan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Berdasarkan penelitian diatas maka dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data. Proses triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melalui cara mengecek kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara. Langkah yang dilakukan mengkompilasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi. Dalam teknik ini membandingkan dari data sumber satu dengan

sumber yang lain yaitu informan pokok dan informan tambahan. Tujuannya untuk membandingkan data dengan menggunakan triangulasi sumber adalah untuk dapat mencari kebenaran dari sebuah data. Karena kadang kala data yang didapat tidak terlepas dari subjektifitas informan. Dengan adanya perbandingan data tersebut maka data yang didapatkan akan bersifat objektif dan valid.



diajak bekerja sama. Ditambahkan oleh informan MA yang juga menjelaskan :

“KRTP Desa Bulurejo pernah melakukan pelatihan pembuatan olahan makanan yang bekerja sama dengan PKK desa, ini juga sebagai salah satu bentuk untuk memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, dengan adanya ketrampilan baru tersebut diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, bisa diolah untuk dijual kembali atau sekedar buat makan sehari-hari sehingga kebutuhan dasar tercukupi dan asupan gizi nya juga ada”. (MA : 24 Maret 2019)

Kutipan wawancara informan tersebut adalah salah satu bentuk untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah memberikan pelatihan kepada kepala rumah tangga sasaran..

Kesimpulan dari beberpa pernyataan informan diatas adalah dari total semua bantuan yang diberikan, 10% nya adalah bantuan bahan dasar pokok agar KRTP dapat tetap mendapatkan asupan apabila usahanya belum jalan maksimal. Banyak usaha dari KRTP yang berkembang sehingga banyak juga dari KRTP yang merasa bersyukur mendapatkan bantuan program karena dengan ini kebutuhan dasar dapat terpenuhi. KRTP juga mendapatkan pelatihan olahan makanan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan KRTP dan agar dapat di manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dijual atau untuk olahan sendiri, setidaknya agar dapat terpenuhinya gizi dalam tubuh. Dengan berkembangnya usaha, pendamping menchannelingkan pada perbankan untuk penguatan modal.

b. Mendayagunakan berbagai sumber

Mengarahkan KRTP agar lebih sadar dengan kemampuan yang dimiliki dan dapat memanfaatkan kemampuannya untuk bisa menjadi berdaya dan dapat

dimanfaatkan untuk aktifitas yang berguna. Dijelaskan mengenai mendayagunakan sumber oleh informan EP yang menyatakan :

“Sebenarnya salah satu intervensi yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Mereka ada sedikit pekarangan yang bisa dimanfaatkan, ada beberapa sumber yang bisa dilakukan atau kalau memang ada pemerintah daerah atau pemerintah desa memiliki aset desa misalnya ada tanah lapang atau lahan kosong yang bisa didirikan warung-warung yang kemudian bisa mereka tempati dengan harga subsidi, lebih murah sumber daya yang ada baik yang dimiliki mereka atau yang dimiliki oleh pemerintah, itu adalah bagaimana mendayagunakan berbagai sumber. (EP : 13 Maret 2019)

Kutipan wawancara informan EP menjelaskan bahwa mereka dapat meningkatkan kapasitas kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Ditambahkan oleh informan MA yang menyatakan :

“Penanaman sayur-sayuran atau obat herbal di pekarangan rumah termasuk sumber daya yang dimiliki KRTP. Pekarangan rumah dapat dimanfaatkan secara bijak melalui pelatihan yang di adakan oleh PKK Desa, kini KRTP biasa mengimpelementasikan pengetahuan yang di dapat seperti menanam sayur-mayur serta obat herbal di pekarangan rumah masing-masing”. (MA : 24 Maret 2019)

Hampir sama dengan yang dikatakan oleh informan MA yang juga memanfaatkan berbagai sumber seperti pelatihan yang dilaksanakan oleh PKK desa. Ditambahkan oleh informan SQ yang menyatakan :

“Kita memanfaatkan berbagai sumber, karena saya pengurus PKK, kalau ada kegiatan kepelatihan

pasti saya usahakan para KRTP ini bisa mengikuti kepelatihan-kepelatihan tersebut, lumayan bisa buat menambah peningkatan usahanya dari pengetahuan yang didapat dari bimtek”. (SQ : 24 Maret 2019)

Kutipan wawancara informan diatas mengatakan bahwa pendamping berusaha memanfaatkan berbagai sumber. Dan diperjelas oleh informan LY selaku pendamping kabupaten yang mendampingi desa Bulurejo mengatakan:

“Mencarikan link-link yang dapat diajak kerjasama. Karena pemberdayaan yang menciptakan suatu kondisi masyarakat dapat meraih kondisi keberkuasaan, sehingga dirinya tidak termasuk dalam bagian kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai struktur penindasan terjadi dan memberikan sarana dan keterampilan agar mencapai perubahan secara efektif”. (LY : 22 Februari 2019)

pernyataan informan LY yang menjelaskan bahwa pendamping mencarikan jaringan-jaringan yang dapat diajak untuk bekerja sama agar dapat menciptakan kondisi keberkuasaan dan lepas dari lingkaran masyarakat yang kurang beruntung. Ditambahkan oleh informan SI yang menjelaskan :

“Kelemahannya secara sosial perempuan masih dinomor duakan. Kebanyakan KRTP di desa sini bekerja di sawah atau pabrik pasti gajinya juga lebih sedikit kalau dibandingkan dengan gaji laki-laki. Terus kemudian didominasi usahanya itu laki-laki, kalau perempuan yang tidak terbiasa berwirausaha biasanya merasa minder, tapi ada keuntungan juga, KRTP disini mereka ulet. Mangkanya butuh pelatihan menumbuhkan jiwa berwirausaha, karena sukses dalam berwirausaha itu sangat erat dengan kemampuan untuk bisa meraih kepercayaan dari banyak orang”. (SI : 24 Maret 2019)

Kutipan wawancara informan SI menyatakan bahwa perempuan atau KRTP butuh adanya pelatihan untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha agar kemampuan kepercayaan diri mereka dapat terbentuk dan meningkat sehingga dapat membantu perekonomian KRTP. Ditambahkan oleh informan RH yang mengungkapkan :

“Saya sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya yang saya miliki seperti lahan didepan rumah ini saya manfaatkan buat membuka warung”. (RH : 24 Maret 2019)

Kesimpulan dari beberapa penjelasan informan diatas menyatakan bahwa, mereka dapat meningkatkan kapasitas kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki, sumber daya yang ada disekitar atau sumber daya yang ada pada diri KRTP sendiri. Pendamping juga berusaha untuk mencarikan jaringan-jaringan yang dapat diajak bekerja sama untuk meningkatkan keberdayaan KRTP meningkatkan kepercayaan diri KRTP dalam mengelola usaha produktinya.

c. Meningkatkan akses pada pelayanan dasar

Akses terhadap pelayanan dasar adalah sebuah hal yang penting. Ketidak merataan akses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan ditandai dengan tidak meratanya tenaga medis dan fasilitasi kesehatan serta pelayanan pendidikan, karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang berarti bahwa pemberian layanan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah masyarakat dan keluarga. dalam hal ini informan LY menyatakan :

“Saya sampaikan bahwa sebenarnya akses ke pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan lain lain sudah ada melalui kegiatan-kegiatan yang lain,

tapi melalui kegiatan ini dengan kerja sama dengan PKK atau TKSK kecamatan bisa lebih mungkin ada yang terlewat, kita kadang-kadang lihat temen-temen ternyata tidak terjangkau dengan pelayanan jombang sehat sehingga ketika berobat BPJS nya harus bayar gitu kan, melalui kegiatan ini bisa lebih terorganisir ya yang belum diupayakan segera mendapat pelayanan, terutama dibantu oleh PD yang difasilitasi oleh pemerintahan desa atau pemerintah kabupaten tapi insya allah, kalau desil satu pasti menerima”. (LY : 22 Februari 2019)

Dari kutipan informan diatas, ditambahkan oleh informan MA yang menyatakan bahwa :

“KRTP yang tidak punya atau belum mempunyai kartu KIS jadi kita mencoba membantu ke pihak desa supaya bagaimana caranya KRTP ini mempunyai JKN KIS ada yang tidak punya, tapi mereka hampir semuanya punya untuk pelayanan kesehatan, ada juga yang kayak bedah rumah RTLH (rumah tidak layak huni) jadi KRTP yang memang rumahnya tidak layak huni bisa kita usahakan atau ajukan”. (MA : 24 Februari 2019)

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh informan SQ yang menjelaskan :

“Alhamdulillah kebanyakan yang menerima bantuan program JM PFK banyak yang sudah punya KIS, cuman kalau pendidikan kan KIP kalau ada kartu pendidikan kan lebih enak bisa buat tambahan membayar biaya sekolah, KIP tergantung tingkat sekolahnya kalau SMA 1 juta kalau tidak salah SMP 700 ribu kalau SD 250 kelas 4 atau 5 sekitar 300 atau 500 ribu. Kita membantu mengusahakan agar mendapatkan KIS atau KIP”. (SQ: 24 Maret 2019)

Dari kutipan diatas ditambahkan juga oleh informan SI yang mengungkapkan:

“Kalau akses pada pelayanan dasar alhamdulillah saya sudah mendapatkan kartu jombang sehat, dan

rata-rata KRTP sudah mempunyai kartu jombang sehat. Dan juga disini ada beberapa KRTP yang dapat bantuan biaya pendidikan buat anaknya, kita minta dibantu sama pendamping biasanya dan pendamping bekerja sama dengan TKSK kecamatan. Jadi itu cukup membantu meringankan ya”. (SI : 24 Maret 2019)

Dari beberapa pernyataan informan diatas menyatakan bahwa hampir semua KRTP mendapatkan akses pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan karena desil satu pasti mendapatkan akses pada pelayanan dasar. selanjutnya bagi KTRP yang memang belum mandapatkan akses tersebut akan dibantu oleh pendamping dan TKSK untuk memproses mendapatkan pelayanan dasar.

d. Mendorong inisiatif pengambilan keputusan

Inisiatif sendiri adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam membentuk unit usaha yang lebih efisien dan mandiri. Mendorong untuk mengambil inisiatif serta mau mencoba suatu hal yang baru akan dapat memupuk pencapaian sukses pribadi ataupun kelompok. Begitupun juga dengan kepala rumah tangga perempuan, sebagaimana diungkapkan oleh informan MA selaku pendamping desa Bulurejo yang mengungkapkan :

“Dari awal pendamping berusaha memupuk inisiatif pengambilan keputusan dan memang mereka kita bantu, kita memberikan stimulus biar mereka bisa mengucapkan sendiri keinginannya mereka seperti apa, mereka sendiri yang minta. Dan biasanya kalau mereka sendiri yang minta kebanyakan lebih berhasil lagi”. (MA : 24 Maret 2019)

Senada dengan yang diutarakan oleh informan MA mengenai inisiatif pengambilan keputusan KRTP, ditambahkan oleh informan LY yang menyatakan :

“PD hanya membantu mendorong KRTP untuk bisa mengutarakan apa yang diinginkan, mengutarakan semua masalah atau problem yang sedang dihadapi dan bagaimana KRTP mengambil keputusan tersebut”. (LY: 22 Februari 2019)

Dari pernyataan kedua informan tersebut menjelaskan bahwa pendamping sedari awal membiasakan KRTP untuk inisiatif pengambilan keputusan, pendamping terus mendorong KRTP agar dapat mengutarakan apa yang diinginkan KRTP itu sendiri. Ditambahkan oleh informan SI yang mengutarakan :

“Dari awal kita dibantu agar bisa mengutarakan keinginan kita sendiri mbak jadi pendamping kayak mendorong kita biar kita itu berani ngomong, apalagi kalau di forum pokmas, karena memang awal-awal malu dan takut mau saran atau kasih masukan tapi lambat laun sudah terbiasa dan berani mengutarakan keinginan”. (SI: 24 Maret 2019)

Informan RH yang juga menambahkan mengenai mendorong inisiatif pengambilan keputusan yang mengungkapkan :

“Kita dibantu dengan pendamping untuk pengusulan bantuan usaha, jadi sangat membantu sekali karena membuka pemikiran kita yang masih bingung mau usaha apa, kita diberi dorongan yang pada akhirnya kita bisa memberikan keputusan mengenai usulan bantuan”. (RH : 24 Maret 2019)

Ditambahkan oleh informan SQ yang juga menambahkan mengenai mendorong inisiatif pengambilan keputusan dari KRTP yang mengungkapkan :

“Kemarin ada yang ingin dibelikan kulkas kita memberikan pertimbangan-pertimbangan juga seperti, ibu minta kulkas buat jualan minuman-minuman, es batu dan gorengan, supaya nanti tidak beli es batu diluar, kita memberi pertimbangan listriknya ibu berapa agar tidak memberatkan

kedepannya karena bantuan ini untuk meringankan bukan untuk memberatkan, dikasih pengetahuan juga kalau nanti langsung di iyakan tanpa diberi pertimbangan-pertimbangan iya kalau nanti bisa ngangkat listrik dirumahnya, nanti kalau misal malah kena listriknya banyak kan jadi memberatkan. Pikir-pikir kalau mau minta bantuan ini, ada yang minta bantuan sepeda motor buat apa? Buat belanja gitu katanya, kita memberi pertimbangan kembali apakah modal ibu sudah cukup kalau belum ya didahulukan modal usahanya dulu, kalau buat sepeda ya uangnya buat sepeda motor aja buk tidak cukup meskipun sepeda kan kita juga harus mikir kedepannya sepeda juga harus tetep hidup seperti surat-suratnya kan bayar lagi buat bayar pajak dan lain-lain kan bisa memberatkan nantinya jadi lebih baik pakai sepeda kecil saja, separuh dari pembelian sepeda bisa dipakai buat modal gitu dan mereka merespon oh iya juga ya gitu. Kan kita mikir keberlanjutannya gitu. Tapi KRTP memang kita dorong terus untuk inisiatif sendiri untuk pengambilan keputusan”. (SQ : 24 Maret 2019)

Informan SQ mengungkapkan bahwa KRTP memang berinisiatif untuk pengambilan keputusan bantuan apa yang nanti mau dijadikan usaha, namun pendamping juga masih tetap memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai apa yang dipilih oleh KRTP agar dapat sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi pada akhirnya KRTP lah yang memutuskan mengenai bantuan usahanya.

Kesimpulan dari semua pernyataan di atas menyatakan bahwa KRTP dari awal sudah dipupuk untuk inisiatif pengambilan keputusan, dan KRTP mampu mengutarakan apa yang mereka inginkan, pendamping hanya mendorong KRTP untuk bisa mengutarakan apa yang diinginkan. Sedangkan dari sudut pandang pemerintah kabupaten, inisiatif pengambilan keputusan bupati adalah inisiatif untuk pelestarian program selanjutnya, setelah program JM PFK selesai.

Pada penelitian ini tingkat keberhasilan dipemenuhan kebutuhan KRTP pada program penanggulangan feminisasi kemiskinan di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. KRTP yang mengalami kehidupan yang cukup sulit dengan memiliki beberapa tanggungan seorang anak yang harus dibesarkan atau seorang cucu dan juga tanggungan untuk menyekolahkan. Sehingga untuk mengantisipasi adanya perangkat kemiskinan pada KRTP maka harus ada pelestarian pada usaha KRTP oleh berbagai pihak dari stakeholder pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Penelitian yang dilakukan ini mengambil 5 sampel KRTP penerima program PFK, bagaimana sistem pengelolaannya, kondisi saat dilaksanakan penelitian, kesesuaian bantuan dan kegiatan KRTP, kemanfaatan usaha bagi KRTP, dan perkembangan usaha KRTP selama ini.

Berikut sampel data KRTP penerima bantuan pada program penanggulangan feminisasi kemiskinan provinsi Jawa Timur 2018 di Desa Bulurejo Kabupaten Jombang :

Tabel 9.1 Data KRTP Sasaran

No : 1)

No	DATA KRTP SASARAN	
1	ID RTS	3517084305700002
2	Nama	KI
3	Alamat	Dusun Bulurejo RT 003 RW 01 Kecamatan Bulurejo Kabupaten Jombang
4	Jenis usaha	Warung makan/kopi
5	Ketepatan bantuan	Iya tepat sasaran karena KRTP ini termasuk dalam RTS PBDT 2015 bukan sebagai KRTP pengganti. Karena faktor suami meninggal. RTS masih produktif, dengan jumlah ART sebanyak 3 orang.
6	Kesesuaian bantuan	Jenis bantuan sudah sesuai dengan jenis usulan usaha KRTP, rincian bantuan yang diberikan juga sesuai dengan usulan KRTP.

7	Kemanfaatan bantuan	Usaha sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki KRTP, bantuan yang diberikan juga bermanfaat bagi KRTP. Bentuk kemanfaatan bantuan seperti penambahan modal/aset usaha. Untuk kebutuhan pokok, bantuan yang diberikan ini dapat mengurangi pengeluaran KRTP
8	Kondisi saat penelitian dan Perkembangan bantuan	Perkembangan usaha saat ini masih berkembang dan berjalan.
9	Perkiraan perkembangan nilai usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan peningkatan modal sebelum dapat bantuan Rp. 300.000, saat mendapatkan bantuan Rp. 850.000, dan saat pemantauan RP. 1.000.000. - Perkiraan aset usaha sebelum dapat bantuan Rp. 400.000, saat dapat bantuan jadi Rp. 1.200.000 dan saat pemantauan menjadi Rp. 1.400.000. - Perkiraan peningkatan pendapatan perbulannya, Rp. 550.000, saat ada bantuan Rp. 700.000, dan saat pemantauan sudah menjadi Rp. 850. 000. - Pengeluaran rumah tangga sebelum mendapat bantuan Rp. 600.000 dan saat pemantauan menjadi Rp. 550.000.
10	Pasca program	Adanya pengembangan usaha pelatihan pada KRTP, dan mendapatkan fasilitasi akses JKN/KIS.
11	Kesimpulan	BERKEMBANG

No : 2)

No	DATA KRTP SASARAN	
1	ID RTS	3517085205590001
2	Nama	RH
3	Alamat	Dusun Bulurejo RT 004 RW 01 Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
4	Jenis usaha	Warung makan/kopi dengan pelaksana usaha oleh KRTP sendiri. KRTP juga menerima bantuan kebutuhan pokok berupa beras.
5	Ketepatan bantuan	Tepat sasaran karena KRTP ini termasuk dalam RTS PBDT 2015 bukan sebagai KRTP pengganti. Karena faktor suami meninggal. RTS masih produktif, dengan jumlah ART sebanyak 5 orang.
6	Kesesuaian bantuan	Jenis bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan jenis usulan usaha KRTP. Rincian

		bantuan yang diterima juga sudah sesuai dengan usulan KRTP dia (RAB)
7	Kemanfaatan bantuan	Usaha yang diberikan menurut KRTP sudah sangat sesuai dengan kemampuan. Persepsi KRTP pada kemanfaatan bantuan bermanfaat. Dengan bentuk kemanfaatan bantuan dapat menjadi penambahan modal atau aset usaha dan mengurangi pengeluaran.
8	Kondisi saat penelitian dan perkembangan bantuan	Untuk saat ini usaha KRTP masih terus berkembang dan berjalan.
9	Perkiraan perkembangan nilai usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Perkiraan peningkatan modal sebelum mendapatkan bantuan Rp. 300.000, saat dapat bantuan Rp. 400.000, dan saat pemantauan meningkat menjadi Rp. 750.000. - Perkiraan peningkatan aset usaha sebelum dapat bantuan sejumlah Rp. 200.000, pada saat dapat bantuan naik menjadi Rp. 2.150.000 dan saat pemantauan menjadi Rp. 2.200.000. - Perkiraan peningkatan pendapatan perbulan sebelum dapat bantuan sejumlah Rp. 500.000, saat dapat bantuan Rp. 0 dan saat pemantauan menjadi Rp. 950.000. - Pengeluaran rumah tangga sebelum mendapat bantuan Rp. 600.000, saat dapat bantuan Rp. 0 dan saat pemantauan pengeluaran menjadi Rp. 550.000.
10	Pasca program	Adanya pengembangan usaha pinjaman permodalan untuk KRTP dan mendapatkan fasilitasi akses JKN/KIS.
11	Kesimpulan	BERKEMBANG

No : 3)

No	DATA KRTP SASARAN	
1	ID RTS	3517086710810006
2	Nama	SI
3	Alamat	Dusun Bulurejo RT 009 RW 02 Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang
4	Jenis usaha	Warung makan/kopi. Pelaksana dari bantuan langsung dari KRTP. Dan juga mendapatkan bantuan kebutuhan pokok sembako beras.

5	Ketepatan bantuan	Tepat sasaran karena KRTP ini termasuk dalam RTS PBDT 2015 bukan sebagai KRTP pengganti. Alasan menjadi KRTP karena bercerai. RTS masih produktif, dengan jumlah ART sebanyak 6 orang.
6	Kesesuaian bantuan	Jenis bantuan yang diberikan pada KRTP sudah sesuai dengan jenis usulan usaha KRTP. Rincian bantuan yang diterima juga sudah sesuai dengan usulan KRTP sebelumnya.
7	Kemanfaatan bantuan	Usaha yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan KRTP. Bantuan yang diberikan juga bermanfaat menurut KRTP. Bantuan ini bermanfaat sebagai penambahan modal atau aset usaha KRTP dan dapat mengurangi pengeluaran.
8	Kondisi saat penelitian dan perkembangan bantuan	Perkembangan usaha saat ini masih terus berkembang dan dijalankan oleh KRTP.
9	Perkiraan perkembangan nilai usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Perkiraan peningkatan modal sebelum mendapatkan bantuan Rp. 350.000, saat dapat bantuan Rp. 200.000, dan saat pemantauan meningkat menjadi Rp. 600.000. - Perkiraan peningkatan aset usaha sebelum dapat bantuan sejumlah Rp. 200.000, pada saat dapat bantuan naik menjadi Rp. 2.150.000 dan saat pemantauan menjadi Rp. 2.350.000. - Perkiraan peningkatan pendapatan perbulan sebelum dapat bantuan sejumlah Rp. 800.000, saat dapat bantuan Rp. 0 dan saat pemantauan menjadi Rp. 1.050.000. - Pengeluaran rumah tangga sebelum mendapat bantuan Rp. 950.000, saat dapat bantuan Rp. 0 dan saat pemantauan pengeluaran menjadi Rp. 750.000.
10	Pasca program	Adanya pengembangan seperti usaha pinjaman permodalan untuk KRTP dan mendapatkan fasilitas akses JKN/KIS
11	kesimpulan	BERKEMBANG

No : 4)

No	DATA KRTP SASARAN	
1	ID RTS	3517085907480001
2	Nama	SH

3	Alamat	Dusun Bulurejo RT 010 RW 02 Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang
4	Jenis usaha	Pedagang obrong/mlijo. Pelaksana usaha langsung dari KRTP sendiri. Serta mendapatkan kebutuhan pokok sembako beras.
5	Ketepatan bantuan	Iya tepat sasaran karena KRTP ini termasuk dalam RTS PBDT 2015 bukan sebagai KRTP pengganti. Alasan menjadi KRTP karena suami meninggal. RTS masih produktif, dengan jumlah ART sebanyak 4 orang.
6	Kesesuaian bantuan	Jenis bantuan yang diberikan pada KRTP sudah sesuai dengan jenis usulan usaha KRTP. Rincian bantuan yang diterima juga sudah sesuai dengan usulan KRTP sebelumnya.
7	Kemanfaatan bantuan	Usaha yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan KRTP. Bantuan yang diberikan juga bermanfaat menurut KRTP. Bantuan bermanfaat sebagai penambahan modal atau aset usaha KRTP serta dapat mengurangi pengeluaran.
8	Kondisi saat penelitian dan perkembangan bantuan	Untuk saat ini usaha KRTP masih terus berkembang dan berjalan.
9	Perkiraan perkembangan nilai usaha	<p>Perkiraan peningkatan modal sebelum mendapatkan bantuan Rp. 300.000, saat dapat bantuan Rp. 700.000, dan saat pemantauan meningkat menjadi Rp. 880.000.</p> <p>Perkiraan peningkatan aset usaha sebelum dapat bantuan sejumlah Rp. 300.000, pada saat dapat bantuan naik menjadi Rp. 1.200.000 dan saat pemantauan menjadi Rp. 1.400.000.</p> <p>Perkiraan peningkatan pendapatan perbulan sebelum dapat bantuan sejumlah Rp. 600.000, saat dapat bantuan Rp. 0 dan saat pemantauan menjadi Rp. 800.000.</p> <p>Pengeluaran rumah tangga sebelum mendapat bantuan Rp. 750.000, saat dapat bantuan Rp. 0 dan saat pemantauan pengeluaran menjadi Rp. 700.000.</p>
10	Pasca program	Adanya pengembangan seperti usaha pinjaman permodalan untuk KRTP dan mendapatkan fasilitasi akses JKN/KIS
11	Kesimpulan	BERKEMBANG

No : 5)

No	DATA KRTP SASARAN	
1	ID RTS	3517086808760003
2	Nama	SM
3	Alamat	Dusun Bulurejo RT 001 RW 03 Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang
4	Jenis usaha	Pedagang keliling yang dijalankan sendiri oleh KRTP. Bantuan juga berupa sembako beras
5	Ketepatan bantuan	Tepat sasaran karena KRTP ini termasuk dalam RTS PBDT 2015 bukan sebagai KRTP pengganti. Alasan menjadi KRTP karena suami meninggal. RTS masih produktif, dengan jumlah ART sebanyak 4 orang.
6	Kesesuaian bantuan	Jenis bantuan yang diberikan pada KRTP sudah sesuai dengan jenis usulan usaha KRTP. Rincian bantuan yang diterima juga sudah sesuai dengan usulan KRTP sebelumnya.
7	Kemanfaatan bantuan	Usaha yang diberikan sudah sangat sesuai dengan kemampuan KRTP. Bantuan yang diberikan juga sangat bermanfaat menurut KRTP. Bantuan bermanfaat sebagai usaha baru KRTP serta dapat mengurangi pengeluaran.
8	Kondisi saat penelitian dan perkembangan bantuan	Untuk saat ini usaha KRTP masih terus berkembang dan berjalan.
9	Perkiraan perkembangan nilai usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Perkiraan peningkatan modal sebelum mendapatkan bantuan Rp. 0,- saat dapat bantuan Rp. 1.100.000, dan pada saat pemantauan meningkat menjadi Rp. 1.300.000. - Perkiraan peningkatan aset usaha sebelum dapat bantuan sejumlah Rp. 0,- pada saat dapat bantuan naik menjadi Rp. 950.000 dan saat pemantauan menjadi Rp. 1.100.000. - Perkiraan peningkatan pendapatan perbulan sebelum dapat bantuan sejumlah Rp. 600.000, saat dapat bantuan Rp. 0 dan saat pemantauan menjadi Rp. 800.000. - Pengeluaran rumah tangga sebelum mendapat bantuan Rp. 700.000, saat dapat bantuan Rp. 0 dan saat pemantauan pengeluaran menjadi Rp. 600.000.

10	Pasca program	Adanya pengembangan seperti usaha pinjaman permodalan untuk KRTP dan mendapatkan fasilitasi akses JKN/KIS.
11	Kesimpulan	BERKEMBANG

Sumber : data lapangan diolah peneliti 2019

4.2 Penerapan Metode Casework dalam Program Jalin Matra PFK

Pendamping dalam praktiknya menggunakan metode perubahan sosial yang sudah terencana guna untuk membantu KRTP dalam mengatasi problem dan permasalahannya. Dalam hal ini ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu RTS dalam pelaksana di lapangan metodenya adalah Metode *Casework*. Metode *casework* adalah metode bimbingan sosial individu yang menekankan pada pertolongan secara khusus terhadap individu, dan membantu untuk menangani masalah dan situasinya mengkaitkan mereka pada berbagai sumber.

Dalam proses pendampingan program pada KRTP, didalamnya terdapat tahapan-tahapan intervensi yang harus dilakukan agar dapat mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai, hal tersebut sesuai dengan ungkapan dari informan SQ yang mengatakan :

“Pendamping menggunakan salah satu metode individu, gunanya itu untuk mempermudah proses pendampingan saja, misalnya pada tahap klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP pendamping menggunakan metode individu artinya pendamping dan KRTP saja, kita datang kerumah-rumah KRTP, biasanya itu kita memberikan masukan, pengetahuan atau gambaran secara langsung agar KRTP itu merasa jelas.” (SQ: 24 Maret 2019)

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh informan MA yang juga berperan sebagai pendamping desa di bulurejo yang mengungkapkan :

“Pendamping melakukan metode individu yang gunanya itu untuk membantu KRTP agar dapat beradaptasi sosial, dan mengembalikan fungsinya sebagai makhluk sosial dengan cara berbicara secara langsung kepada KRTP.” (MA: 24 Maret 2019)

Dari kutipan wawancara diatas menyebutkan bahwa pendamping menggunakan metode individu, yang berguna untuk memberikan motivasi dan berbicara secara langsung pada KRTP, mengenai bantuan yang akan diberikan hal tersebut diperjelas oleh informan SI selaku KRTP desa Bulurejo yang mengungkapkan :

“Kita didatangi sama pendamping desa, kita ditanya soal bantuan yang nantinya akan diberikan itu kita minta apa, kalau saya kan sudah jualan dari dulu jadi saya minta penambahan modal aja buat ngisi warung. Tapi ada juga KRTP yang belum punya usaha karena memang tiap harinya kerjanya di sawah, ada yang bingung juga mau diberikan bantuan apa sampai ada yang pasrah mau dikasih apa aja boleh. Tapi setahu saya bu SQ selalu bantu KRTP untuk pemecahan masalah misalnya yang masih bingung soal usaha apa yang sesuai sama KRTP.” (SI: 24 Maret 2019)

Dari hasil wawancara informan SI mengatakan pendamping desa mendatangi rumah-rumah KRTP secara langsung untuk mendata bantuan usaha apa yang ingin KRTP lakukan serta memberikan arahan mengenai bantuan usaha yang memang pas dan sesuai dengan KRTP. Ditambahkan oleh informan RH yang mengungkapkan :

“Waktu pendataan jenis usulan usaha, pendamping datang kerumah saya menanyakan, saya ingin bantuannya dirupakan menjadi apa, dengan beberapa pertimbangan dibantu oleh pendamping dan karna saya ada sedikit halaman didepan rumah jadi saya ingin membuka warung makan saja”. (RH : 24 Maret 2019)

Pernyataan yang sama dengan informan SI informan RH juga menyatakan bahwa pendamping secara langsung mendata dari rumah kerumah untuk mengetahui jenis usulan usaha apa yang diinginkan oleh KRTP dengan cara komunikasi pendamping memberikan masukan atau pandangan kepada KRTP.

Kesimpulannya adalah pendamping menggunakan metode *casework* atau individu untuk membantu mendata bantuan usaha KRTP serta membantu KRTP mengatasi permasalahannya dan memberikan pertolongan secara khusus per individu dengan mendatangi secara langsung KRTP dari rumah kerumah.

Pendamping juga melakukan pengawasan serta pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan meminimalkan permasalahan. Berikut adalah tahapan intervensi dalam metode *casework* pada program penanggulangan feminisasi kemiskinan yang ditemukan dilapangan.

4.2.1 Tahap Pengenalan (*Intake*)

Tahap *Intake* adalah dimana pendamping memulai untuk berorientasi. Awal keterlibatannya pada suatu tahapan program yang menyebabkan pendamping mempunyai tanggung jawab untuk menjalin suatu hubungan dengan masyarakat sekitar sasaran, stakeholder, PKK, pendamping desa, sekretariat desa dan KRTP. Pendamping mulai menjalin relasi, mengidentifikasi permasalahan dari RTS dan menentukan apakah KRTP sasaran layak untuk mendapatkan bantuan.

a. Tahap Sosialisasi program

Tahapan sosialisasi yaitu penyebarluasan informasi pelaksanaan PFK untuk dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Tahapan persiapan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk penumbuhan komitmen dan penyiapan sumber daya manusia organisasi pelaksana dan pemahaman kepada mekanisme dan teknis pelaksanaan kegiatan secara berjenjang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada awal pelaksanaan Jalin Matra dan penyelenggaranya adalah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, dengan narasumbernya yaitu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Narasumber pusat, Dewan Riset Daerah dan perguruan tinggi. Sasaran peserta Provinsi Terdiri dari dinas atau Instansi Provinsi terkait, seperti TP-PKK Provinsi, Bappeda Kabupaten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten (DPMD

Kabupaten), TP-PKK Kabupaten, Pendamping Provinsi dan Perguruan Tinggi, sedangkan, Sosialisasi Kabupaten yaitu tindak lanjut dari Sosialisasi Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jalin Matra PFK Kabupaten dan dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping Kabupaten dalam mensosialisasikannya.

Sosialisasi Kabupaten bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai PFK dan menjalin komitmen dari berbagai Dinas atau Instansi sektoral maupun pelaku pembangunan lainnya agar dapat mendukung program PFK kabupaten. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilaksanakan secara formal dalam bentuk forum khusus, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan forum kegiatan lainnya dan melalui kegiatan informal.

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan tahapan kegiatan, sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang menyeluruh serta mendapatkan dukungan terhadap program yang akan dijalankan. Dalam hal ini informan LY sebagai pendamping kabupaten menjelaskan mengenai tahapan sosialisasi yang masuk dalam metode intervensi *intake* yang dilaksanakan seperti:

“Ada sosialisasi kabupaten dulu, baru setelah itu ke tingkat kecamatan, kalau dalam satu kecamatan ada dua desa baru kita ke desa-desanya untuk sosialisasi, memberi tau kalau didesa sudah mendapatkan bantuan PFK pasti tidak hanya pengajuan itu harus kita kasih keterangan apa itu PFK karena kadang masih kurang respek mau dapat bantuan ini kadang responnya itu “olah bantuan opo maneh iki mbak, kakean ruwet-ruwet” itu biasanya di desa, kalau kecamatan selalu welcome. Disitu kita terangkan kita sosialisasikan dan jelaskan kegiatannya seperti apa, ini nanti siapa yang mengerjakan di desa, itu

kita jelaskan jadi perannya desa itu apa kepala desa itu untuk apa”. (LY: 22 Februari 2019)

Dari informan Ly menjelaskan bahwa dalam tahap sosialisasi dilakukan dari tingkat provinsi, setelah itu sosialisasi ditingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Untuk menginformasikan bahwa lokasi tersebut mendapatkan bantuan program PFK dan menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam program JM PFK dan menjelaskan mengenai pedoman umum atau PTO jalin matra. Pembahasan mengenai sinkronisasi dan integrasi program atau kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program PFK serta penyamaan persepsi dan rencana pelaksanaan program. Seperti yang diinformasikan oleh informan EP selaku Ketua bidang pemberdayaan desa yang menjelaskan:

“Salah satu peran DPMD adalah sebagai fasilitator tingkat kabupaten yang pertama memberikan sosialisasi tentang program PFK, tujuan sosialisasi memberi pemahaman yang sama kepada semua stakeholder pelaksana kegiatan dari pengambilan kebijakan pada tingkat kabupaten kemudian camat sampai pemerintah desa, tema sama tujuannya bersama langkah bersama biar nanti lancar kegiatannya”. (EP: 13 Maret 2019)

Dari hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa peran dari sekretariat kabupaten adalah sebagai fasilitator yang memberikan sosialisasi mengenai program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan memberikan pemahaman yang sejalan dan sama kepada semua stakeholder mengenai pengambilan kebijakan dari pemerintah kabupaten hingga pada tingkat desa agar program dapat berjalan sesuai dengan keinginan.

Kesimpulan dari semua pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas adalah bahwa

sosialisasi dilakukan dalam empat tahap yaitu sosialisasi provinsi, sosialisasi Kabupaten, sosialisasi kecamatan dan sosialisasi desa. Tahap sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan mengenai kebijakan umum, pedoman umum dan penyamaan persepsi mengenai program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan. Peran dari DPMD adalah sebagai fasilitator tingkat kabupaten yang pertama memberikan sosialisasi, yang selanjutnya pendamping kabupaten yang juga berperan sebagai fasilitator ditingkat kecamatan dan desa.

b. Tahap Pra Rembug Warga dan Rembug Warga

Pra Rembug Warga adalah sebuah pertemuan khusus yang dilakukan sebelum rembug warga, dalam rangka pembentukan dan penetapan Sekretariat desa serta penjaringan dan penetapan pendamping desa, sedangkan Rembug Warga adalah forum pertemuan perwakilan warga dalam rangka sosialisasi program Jalin Matra PFK pada tingkat desa.

Pra Rembug Warga dilaksanakan setelah pelaksanaan mobilisasi pendampingan oleh perguruan tinggi. Penyelenggara dalam Pra Rembug Warga adalah pemerintah desa difasilitasi oleh Pendamping Kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan, dengan pesertanya adalah pemerintahan desa, BPD, LPMD, dan TP-PKK desa. Agenda Pra Rembug Warga adalah pembentukan serta penetapan Sekretariat desa, penjaringan dan penetapan Pendamping desa dan rencana pelaksanaan Rembug Warga. Hal ini dijelaskan oleh informan EP yang menjelaskan :

“Pra rembug menjalankan pada tingkat desa mulai dari pembentukan sekretariat desa, kemudian membentuk atau menunjuk PD, fasilitatornya itu DPMD dan pendamping kabupaten” (EP : 13 Maret 2019)

Informan EP menjelaskan bahwa dalam pra rembug warga ini adalah tahapan awal untuk pembentukan sekretariat desa dan pendamping desa dengan dibantu oleh DPMD dan pendamping kabupaten sebagai fasilitatornya. Hal ini diperjelas oleh informan LY yang menjelaskan:

“Setelah perkenalan kita melakukan tahapan pra rembug warga. Kita menentukan siapa sekretariat desa dan siapa pendamping desa dan kita juga menyampaikan pagu, jumlah KRTP apabila kurang dari dua puluh pendamping desanya cukup satu kalau lebih dari dua puluh pendamping desanya dua. Desa Bulurejo ada sebanyak 22 KRTP jadi pendamping desanya dua. Kita juga menyampaikan bahwa di desa mendapatkan BOP sesuai aturan pedum juga. Kita juga menyampaikan bahwa bantuan yang kita berikan ini berupa barang yang nominalnya sebesar dua setengah juta rupiah”. (LY: 22 Februari 2019)

Informasi diatas menjelaskan mengenai bagaimana pendamping kabupaten dalam tahap intervensi intake, pendamping mensosialisasikan dan mendampingi proses tahapan pra rembug warga, serta menyampaikan pagu bahwasanya di desa Bulurejo ada sebanyak 22 KRTP yang mendapatkan bantuan sehingga membutuhkan dua pendamping desa dan juga menjelaskan, mengenai BOP dan bantuan hibah yang diberikan sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah per KRTP.

Tahapan atau proses kegiatan dalam pra rembug warga seperti pendamping kabupaten dan pendamping desa menyiapkan daftar nama calon KRTP sasaran dari Basis Data Terpadu (BDT) program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) pada tahun 2015, dan daftar rumah tangga PPFM keseluruhan dan Form verifikasi KRTP. Dijelaskan kembali oleh informan LY yang menjelaskan:

“Dalam tahap ini selain sosialisasi mengenai program dan pembentukan sekretariat desa dan PD, juga menjelaskan sasaran dalam program bantuan PFK ini, kita menjangkau atau memverifikasi kira-kira dari nama-nama yang sudah diberikan dari provinsi, mana yang layak dan yang tidak layak sesuai dengan versi pemerintah desa dan sekretariat desa, yang diundang yaitu pemerintah desa terus tingkat kecamatan kasi DPMD perwakilan dari KRTP dan juga RT/RW setempat yang ada KRTP nya disitu kan mereka pasti tau kondisi faktual dari KRTP kita mengacu kepada kondisi faktual bukan karena itu kelihatannya rumah itu bagus dan berada, rumah itu enggak tidak kita mengacu pada kondisi faktual dilapangan yang mana memang benar-benar terjadi”. (LY: 22 Februari 2019).

Dari kutipan informan diatas menjelaskan bahwa output dalam pelaksanaan pra rebug warga adalah terbentuknya sekretariat desa dan pendamping desa yang selanjutnya adalah memverifikasi data calon KRTP mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan kriteria program jalin matra PFK yang mana mengacu kepada kondisi faktual dilapangan. Ditambahkan oleh informan SQ yang menjelaskan:

“Pra rebug menentukan siapa yang jadi pendampingnya siapa sekretariatnya juga ditentukan integritasnya. (SQ : 24 Maret 2019)

Inti dari informan diatas adalah tahapan ini selain menentukan pendamping desa dan sekretariat desa dengan integritasnya di desa selama ini dan menentukan anggota dalam sekretariat desa yang mewakili bendahara, sekretaris, dan anggota. Dibawah ini adalah tabel dari sekretariat desa :

Tabel 10.1 Daftar Susunan Sekretariat Desa

No	Nama	Jabatan
1	AR	Kepala desa
2	ST	Ketua TP-PKK
3	AR	Ketua BPD
4	MA	LPMD
5	BS	Sekretaris desa
6	AR	Bendahara desa

Sumber : data lapangan diolah peneliti 2019

Selanjutnya tahap rembug warga yang mana ini adalah forum pertemuan perwakilan warga dalam rangka sosialisasi program ditingkat desa. Dijelaskan oleh informan SQ yang menjelaskan :

“Rembug warga dilaksanakan sebagai media untuk sosialisasi PFK di tingkat desa, rembug warga juga menjelaskan kepada Stakeholder mengenai program PFK itu seperti apa, mensosialisasikan Sekretariat Desa dan Pendamping Desa, sekaligus memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sudah dianggarkan dalam APBDDesa. Rembug warga ini di ikuti dari unsur, sekretariat desa, BPD, kasun lokasi KRTP, perwakilan KRTP, tokoh masyarakat dan pendamping desa dan dapat mengundang perwakilan RT/RW juga dari lokasi KRTP”. (SQ: 24 Maret 2019)

Informan SQ menjelaskan bahwa tahapan ini adalah bentuk sosialisasi tingkat desa yang menghadirkan tokoh masyarakat, calon KRTP, sekretariat desa, BPD, kasun dan lain sebagainya. Diperjelas oleh informan MA yang menjelaskan :

“Pelaksanaannya itu dari sekretariat desa difasilitasi oleh pemerintahan desa, tim fasilitasi kecamatan dan tenaga pendamping kabupaten, dengan narasumbernya dari Dinas PMD atau tim fasilitasi kecamatan, tenaga pendamping kabupaten dan pemerintahan desa”. (MA: 24 Maret 2019)

Dari kutipan diatas menyebutkan bahwa dalam rembug warga dilaksanakan oleh sekretariat desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan pendamping kabupaten dalam melaksanakan rembug warga. Pemateri atau yang memberikan informasi kepada warga desa adalah dari dinas PMD juga dari tim fasilitasi kecamatan, pendamping kabupaten dan pemerintahan desa. Ditambahkan oleh EP yang menjelaskan:

“Rembug direncanakan dan PD wajib menyusun rencana kapan klarifikasi, kapan usulan kapan jenis-usulan itu, kita pantau terus misalnya belum masuk ya kita tanya kenapa kok gak jalan jadi kita memang memantau terus disetiap tahapan jadi dipantau terus sama DPMD”. (EP: 13 Maret 2019)

Kutipan diatas menjelaskan bahwa DPMD selaku sekretariat kabupaten terus memantau pada setiap tahapan di desa, maka dari itu pendamping desa wajib menyusun agenda kegiatan program kedepannya untuk terus melaporkan kesekretariat desa, misalnya kapan dilaksanakannya verifikasi, jenis usulan usaha hingga tahap akhir PD wajib menyusun. Mengenai verifikasi penerima bantuan hal ini juga dijelaskan oleh informan LY yang menjelaskan :

“Pendamping kabupaten dan pendamping desa memimpin rembug warga dalam pelaksanaan verifikasi dan juga menyampaikan data *by name by address* untuk calon penerima bantuan. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai status kelayakan calon penerima program (KRTP) berdasarkan kriteria program, kriteria KRTP yang layak menjadi sasaran itu, telah bercerai, suami meninggal dunia, ditinggal suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin atau ditelantarkan, memiliki suami difabel dan atau suami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas secara produktif dan terakhir

KRTP sebatang kara usia produktif yang mampu mengelola usaha dan belum menerima bantuan Jalin Matra yang lainnya yaitu BRTSM dan PK2”. (LY: 22 Februari 2019)

Dari hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap verifikasi ini calon KRTP memang harus benar-benar dipastikan masuk dalam kriteria program bantuan, yang mana tingkat kemiskinan yang berada pada tingkat bawah, dengan kriteria lain yaitu suami meninggal dunia, serta memiliki suami yang difabel atau cacat dan atau mengalami sakit yang menahun dan tidak bisa menafkahi keluarga atau memang ditelantarkan oleh suami tidak diberi nafkah. Diperjelas oleh informan SQ yang menjelaskan :

“Rembug warganya itu menentukan KRTP, kita melakukan klarifikasi data yang diberikan oleh pusat setelah itu menyeleksi, nanti ini tidak layak, ini lebih layak, ini sudah mapan ini sudah tidak memungkinkan menerima bantuan usaha bisanya konsumtif ya ganti kan sudah tua, satu KK itu apakah ada ART apa tidak, kalau ada kan nantinya bisa di bantu oleh ART”. (SQ: 24 Maret 2019)

Inti dari wawancara diatas adalah dalam memverifikasi calon RTS pendamping dibantu dengan sekretariat desa menyeleksi data calon RTS dari pusat apakah kondisinya sekarang sudah membaik dan masih perlu mendapatkan bantuan atau data dari pusat ada yang sudah meninggal dalam proses ini pendamping wajib memverifikasi kembali dan mengganti dengan RTS yang sesuai. Ditambahkan oleh informan MA selaku pendamping desa yang menjelaskan :

“Proses verifikasi ini adalah melihat apakah orang yang akan mendapatkan bantuan program ini itu benar-benar miskin atau janda, dan ada penyuluhan terkait dengan dana bantuan yang nantinya akan diterima. Bahwa bantuan yang akan diterima nanti

itu berupa bantuan modal usaha”. (MA : 24 Maret 2019)

Kesimpulan dari semua pernyataan diatas adalah dalam tahap pra rembug warga menghasilkan terbentuknya sekretariat desa dan ditetapkannya pendamping desa serta pelaksanaan rembug warga. Sedangkan dalam rembug warga menghasilkan pengetahuan masyarakat mengenai pemahaman program JM PFK yang sudah dijelaskan oleh sekretariat kabupaten, dan pendamping kabupaten, didapatkannya daftar hasil verifikasi KRTP yang layak dan tidak layak untuk menerima bantuan, serta terbentuknya rembug pokmas yang setiap pokmas didampingi oleh satu pendamping desa.

4.2.2 Tahap Asassment

Tahap asassment adalah tahapan pengumpulan data dan analisis data serta kondisi mengenai rumah tangga sasaran (RTS).

a. Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP

Klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP dilakukan dengan cara berdialog dan berinteraksi secara langsung dengan KRTP sasaran untuk mengecek kondisi secara faktual KRTP serta mendalami jenis kebutuhan KRTP yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran (RTS). Waktu dilaksanakannya setelah rembug warga dengan pelaksananya dari pihak pendamping desa difasilitasi oleh sekretariat desa dan pendamping kabupaten. Sasarannya KRTP berdasarkan hasil verifikasi dalam rembug warga beserta anggota rumah tangga sasaran (RTS).

Proses pelaksanaannya atau kegiatan ini akan dipaparkan oleh informan LY yang menjelaskan bahwa :

“Pendamping desa dengan pendamping kabupaten melakukan koordinasi untuk menyiapkan daftar nama calon para KRTP sasaran yang sudah berdasarkan hasil verifikasi, selanjutnya menyiapkan form instrumen klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP, dan setelah itu membagi lokasi tugas klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP. pendamping terjun ke KRTP setelah rebug warga nanti pendamping desa turun dari rumah kerumah seperti biasa membawa dua blanko, satunya identifikasi satunya klarifikasi kebutuhan. Kita melihat sejauh mana kebutuhannya KRTP apa saja. Jadi klarifikasi dan identifikasi itu membutuhkan waktu cukup lama, kadang itu gak cukup datang satu kali bahkan bisa dua kali tiga kali biar tepat sasaran gitu, jadi pendamping desa tidak hanya menyampaikan program tapi juga memberi motivasi membuka wawasan”. (LY: 22 Februari 2019)

Pernyataan informan LY tersebut menjelaskan bahwa pendamping desa dan pendamping kabupaten berkoordinasi untuk menyiapkan daftar nama calon KRTP yang sudah di verifikasi. Setelah itu melakukan klarifikasi dan identifikasi ke rumah-rumah KRTP yang dibagi menjadi dua blanko yaitu identifikasi dan klarifikasi bantuan. Diperjelas oleh informan MA yang menjelaskan:

“PD menyiapkan perangkat observasi lapangan seperti peralatan tulis, instrumen klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan form instrumen yang sudah ada. pendamping desa melakukan kunjungan langsung ke rumah tangga sasaran untuk melakukan klarifikasi kelayakan KRTP dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan form instrumen. PD difasilitasi oleh pendamping kabupaten untuk melakukan input data hasil klarifikasi dan identifikasi pada usulan kebutuhan, jadi nantinya setiap KRTP akan ditanyakan kira-kira nanti akan membuka usaha apa, dalam pendataan ini juga ada dokumentasi yang nantinya

akan dikirim ke pemerintah Provinsi. Tapi biasanya ada saja RTS yang tidak bisa untuk membuka usaha jadi solusi dari pemerintah desa atau PD ditanyakan terlebih dahulu bisanya apa, kalau RTS bisanya bertenak ayam atau kambing jadi dana bantuannya dirupakan ternak tersebut jadi memang tergantung dengan keahlian yang dipunya oleh RTS.” (MA : 24 Maret 2019)

Pernyataan dari informan MA tersebut sama dengan pernyataan dari informan SQ yang mengatakan :

“Kegiatan ini itu untuk memastikan ke calon sasaran hasil verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP masih layak untuk memperoleh bantuan apa tidak. Tapi apabila ada calon KRTP yang tidak memenuhi persyaratan maka dilakukan pergantian RTS dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam kegiatan verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP dengan kriteria calon KRTP yang layak memenuhi syarat itu seperti suami sudah meninggal, bercerai, ditinggal oleh suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah, memiliki suami difabel atau suami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktivitas yang produktif”. (SQ: 24 Maret 2019)

Kesimpulan pernyataan dari ketiga informan tersebut yang merupakan pendamping desa dan pendamping kabupaten menyatakan bahwa dalam tahap ini pendamping desa dan pendamping kabupaten bekerja sama menyiapkan berkas-berkas untuk melakukan klarifikasi kelayakan KRTP dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP secara langsung dari rumah ke rumah dari satu KRTP ke KRTP yang lain.

Sasarannya yang dinilai tidak layak yaitu suami meninggal dunia, sakit menahun, difabel, istri ditelantarkan tidak diberi nafkah lahir dan batin selama kurun waktu minimal enam bulan. Apabila dalam melakukan klarifikasi dan

identifikasi ada calon RTS yang menolak program bantuan dapat dialihkan atau dicarikan calon KRTP yang lain.

4.2.3 Tahap perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan atau *planning*, pendamping dengan sekretariat desa mencoba untuk mengeksplorasi berbagai cara yang dapat dipergunakan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh kepala rumah tangga perempuan (KRTP), misalnya pendamping mengajukan dokumen pencairan dana bantuan keuangan khusus (BKK) pada Gubernur Jawa Timur. Pendamping juga menghubungkan kebutuhan dengan sumber-sumber yang ada yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan untuk pemenuhan kebutuhan melalui serangkaian kegiatan, misalnya melakukan rebug pokmas realisasi bantuan pada KRTP.

a. Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) (*Planning*)

Pengajuan pencairan dana BKK dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur.

Bantuan keuangan khusus (BKK) kabupaten dilaksanakan pada awal berjalannya program tahun 2018, BKK desa pelaksanaannya setelah klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP. Dengan tim pelaksana dari pemerintah kabupaten serta pemerintah desa dan sekretariat desa yang difasilitasi oleh pendamping kabupaten.

Bertujuan untuk menyusun kelengkapan dokumen pencairan BKK kabupaten, menyusun kelengkapan dokumen pencairan BKK desa, verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BKK desa dan pengajuan dokumen pencairan BKK desa. Berikut

ini pernyataan dari beberapa informan mengenai pengajuan pencairan dana BKK, yang pertama dari informan LY yang mengungkapkan:

“Sekretariat kabupaten dengan kita pendamping kabupaten melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas pencairan dana dan apabila sudah dinyatakan lengkap dan semua benar, segera membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana pada Gubernur yang ditandatangani sama kepala DPMD kabupaten”. (LY : 22 Februari 2019)

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana keuangan khusus, pihak desa segera membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana pada gubernur yang diketahui oleh dinas PMD kabupaten. Ditambahkan oleh informan MA yang menjelaskan :

“Untuk pengajuannya sesuai dengan dipedum mengenai surat-surat apa yang harus dilengkapi, apa saja yang dibutuhkan dicetak apa yang perlu dari kepala desa kita yang membantu yang maju mengurus terutama yang mondar mandir ke DPMD juga pendamping desa”. (MA : 24 Maret 2019)

Dari kutipan wawancara tersebut MA selaku pendamping desa membantu sekretariat desa untuk mengurus berkas pengajuan pencairan dana BKK program JM PFK ke dinas PMD selaku sekretariat kabupaten. Ditambahkan oleh informan EP selaku Ketua seksi bidang pemberdayaan dinas PMD kabupaten yang menjelaskan :

“Pengajuan pencairan BKK dilakukan oleh pemerintah yang disampaikan pada Gubernur Jawa Timur melalui DPMD Provinsi Jawa Timur. persyaratan untuk dokumen pencairan BKK pada kabupaten, surat permohonan pengajuan BKK

yang dari Bupati kepada Gubernur, terus kwitansi yang jumlahnya sesuai dengan jumlah BKK, fotocopy DPA dan fotocopy rekening kas daerah, itu semua harus rangkap dua”. (EP : 13 Maret 2019)

Dari wawancara tersebut diperjelas oleh informan SQ yang menjelaskan :

“Pengajuan pencairan BKK ditingkat desa, pemerintah desa mengajukan surat permohonan pencairan pada Gubernur Jatim yang diketahui oleh kepala DPMD. Kita menyiapkan rencana anggaran dan biaya, jadwal kegiatannya, keputusan kepala desa tentang sekretariat desa dan pendamping desa, keputusan kepala desa tentang penerimaan bantuan JM PFK, surat tanggung jawab mutlak integritas kades dan ketua sekretariat yang bermaterai 6000, terus juga menyiapkan kwitansi, fotocopy SK pengangkatan kepala desa yang dilegalisir, fotocopy pengangkatan bendahara desa itu juga dilegalisir, fotocopy KTP kepala desa dan bendahara, fotocopy rekening kas desa di bank Jatim sama bank Jombang terus surat pernyataan dari kepala desa tentang rekening resmi kas desa, rekeningnya yang masih aktif dan bermaterai, terus fotocopy NPWP pemerintah desa sama fotocopy APBDesa. Jadi itu semua pendamping desa di bantu dengan sekretariat desa dan pendamping kabupaten mangkanya kita juga bolak balik ke DPMD buat ngurusi itu semua”. (SQ : 24 Maret 2019)

Informan SQ mengungkapkan bahwa pengajuan pencairan BKK ditingkat desa, difasilitasi oleh pendamping desa dan pendamping kabupaten untuk menyusun dokumen pencairan berdasarkan ruang lingkup anggaran BKK dari pemerintah Provinsi kepada pemerintah desa. Pemerintah desa mengajukan surat untuk permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur yang diketahui oleh kepala dinas PMD kabupaten.

Kesimpulan dari pernyataan semua informan diatas mengenai pengajuan pencairan dana bantuan keuangan khusus atau BKK adalah dalam tahapan ini pemerintah desa dan sekretariat desa yang difasilitasi oleh pendamping desa dan pendamping kabupaten mengajukan dokumen pencairan BKK pemerintah desa ke Gubernur Jawa Timur yang diketahui oleh dinas PMD kabupaten.

Isi dokumen pencairan BKK yang meliputi, rencana anggaran dan biaya, jadwal pelaksanaan kegiatan, keputusan kepala desa mengenai sekretariat desa dan pendamping desa, surat keputusan desa mengenai penerima bantuan JM PFK, surat tanggungjawab mutlak integritas kepala desa dan ketua sekretariat yang bermaterai Rp. 6000, melampirkan kwitansi, (fotocopy SK pengangkatan Kepala desa yang dilegalisir, pengangkatan bendahara desa yang dilegalisir, KTP kepala desa dan bendahara, rekening bank jombang dan surat pernyataan kepala desa tentang rekening resmi kas desa yang masih aktif dan bermaterai Rp.6000, NPWP pemerintah desa, dan foto copy APBDesa) itu semua difoto copy. Selanjutnya salinan foto copy proposal permohonan bantuan BKK desa.

b. Rembug Pokmas Persiapan Realisasi Bantuan

Rembug pokmas adalah forum pertemuan anggota pada masing-masing pokmas dalam rangka melakukan review rincian usulan kebutuhan. Peserta yang dihadirkan adalah KRTP dan atau anak rumah tangga (ART) yang nantinya akan mengelola usaha. Rembuk pokmas persiapan realisasi bantuan dilaksanakan setelah pengajuan dokumen pencairan atau sebelum pengadaan barang bantuan KRTP. Pendamping desa

berperan sebagai fasilitator yang difasilitasi oleh sekretariat desa dan pendamping kabupaten.

Agenda dalam rembuk pokmas persiapan realisasi bantuan yaitu melakukan pendalaman review pada jenis usulan kebutuhan dari KRTP, mengkoordinasikan perkembangan kondisi KRTP dan kebutuhan jika ada perubahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dan menyepakati rencana lebih lanjut. Dijelaskan oleh informan SQ yang menjelaskan:

“Kegiatan dalam rembuk pokmas realisasi bantuan meliputi pendamping desa menyelenggarakan rembuk pokmas yang difasilitasi oleh sekretariat desa dan pendamping kabupaten. PD juga mempersiapkan bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan rembuk pokmas kayak daftar hadir peserta, daftar nama KRTP beserta rincian usulan kebutuhan, tempat pelaksanaan rembuk pokmas yang berada dilingkungan tempat tinggal KRTP, Form review usulan kebutuhan belanja KRTP dan dokumentasi. Disini PD juga menjelaskan mengenai tujuan diadakannya rembuk pokmas kepada KRTP seperti apa, kita pendamping desa juga dibantu oleh pendamping kabupaten melakukan review usulan kebutuhan pada KRTP”. (SQ : 24 Maret 2019)

Dari wawancara informan SQ menjelaskan bahwa dalam rembuk pokmas PD mempersiapkan keperluan dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan rembuk pokmas, PD juga menjelaskan mengenai maksud dan tujuan diadakannya rembuk pokmas pada KRTP, dan PD dibantu oleh pendamping kabupaten untuk melakukan review usulan kebutuhan KRTP, Dalam hal ini informan MA menjelaskan :

“Rembug pokmas itu aslinya dikumpulkan semua KRTP untuk persiapan realisasi, setelah itu kita musyawarahkan bersama dengan pokmas agar

nanti bisa siap-siap ketika pengangkutan pendistribusian barang bantuan, itu persetujuan gimana bawa sendiri-sendiri atau handel jadi satu nanti diantarkan, kita berusaha agar pokmas ini dapat lebih mudah untuk membawakan barang bantuannya. Jadi ya pendamping membantu pokmas untuk dapat mencapai tujuan yang disepakati bersama". (MA: 24 Maret 2019)

Hasil kutipan wawancara tersebut menjelaskan bahwa rembug pokmas adalah forum dikumpulkannya warga untuk membahas mengenai realisasi bantuan apakah di koordinir dan diantarkan kerumah-rumah KRTP atau langsung dibawa sendiri oleh KRTP sesuai dengan hasil diskusi yang telah disepakati bersama pokmas. Hal ini diperjelas oleh informan LY yang menjelaskan mengenai review terhadap rincian usulan kebutuhan KRTP sebagai berikut :

"Review rincian usulan kebutuhan KRTP meliputi jenis volume, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh KRTP, sehingga bantuan tersebut tepat kebutuhan dan sesuai dengan kebiasaan dari KRTP. Hasil review rincian usulan kebutuhan KRTP ini juga menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan bantuan barangnya, untuk rencana tindak lanjut disepakati dalam rembug pokmas yang berupa kegiatan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian bantuan program, yang akhirnya hasil dari review rincian usulan usaha KRTP diserahkan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya disampaikan kepada tim pengelola kegiatan sebagai acuan pengadaan barang". (LY: 22 Februari 2019)

Dari pernyataan informan LY menyebutkan bahwa dalam tahap ini melakukan pendalaman review rincian usulan kebutuhan dan mengkoordinasikan perkembangan kondisi KRTP serta kebutuhan jika ada perubahan sesuai ketentuan dan menyepakati rencana lebih lanjut.

Apabila dalam perjalanan tahapan program ada perubahan kondisi KRTP yang telah ditetapkan oleh kepala desa, biasanya perubahan status KRTP seperti, KRTP yang dimaksud telah menikah lagi, meninggal dunia atau pindah dan menolak bantuan, perubahan jenis usulan kebutuhan KRTP karena suatu hal dengan alasan yang jelas dan rasional misalnya, sakit yang menyebabkan tidak bisa mengelola usaha yang pernah diusulkan, adanya perubahan rencana pelaksana pengelola usaha antar anggota rumah tangga, adanya kesamaan jenis usaha yang diminta oleh KRTP yang lokasinya berdekatan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha dan lain sebagainya.

Kondisi lingkungan atau geografis dari tempat tinggal yang tidak memungkinkan bagi perkembangan usaha, dan terjadinya peristiwa luar biasa yang mengakibatkan usulan usaha tidak dapat dilaksanakan. Terhadap perubahan tersebut maka pendamping melakukan pergantian melalui berita acara dan perubahan keputusan kepala desa mengenai perubahan penerimaan bantuan sesuai dengan ketentuan. Tahapan ini menghasilkan daftar review rincian jenis usulan kebutuhan usaha KRTP agar sesuai tepat sasaran, jumlah dan manfaatnya.

Kesimpulan dari semua pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan pada tahap rembug pokmas persiapan realisasi bantuan adalah bahwa pada tahap ini fasilitatornya adalah pendamping desa difasilitasi oleh sekretariat desa dan pendamping desa untuk dapat melakukan pendalaman review jenis usulan kebutuhan KRTP dan menyiapkan semua kebutuhan dalam tahap rembug pokmas dari tempat, daftar hadir peserta, daftar nama KRTP dan nama rincian usulan kebutuhan, form review usulan kebutuhan belanja KRTP dan dokumentasi.

PD juga menjelaskan mengenai diadakannya rembug pokmas dan pendamping untuk mengkoordinasikan perkembangan kondisi KRTP serta menyepakati rencana lebih lanjut untuk dapat mendukung pengelolaan dan pelestarian program. Nanti hasil dari review rincian usulan usaha diserahkan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya disampaikan pada TPK sebagai acuan pengadaan barang.

Tabel 11.1 Daftar Kelompok Masyarakat Bulurejo

No	Nama pokmas	Jumlah anggota	Nama ketua	Nama pendamping
1.	Melati	11	KW	SQ
2.	Mawar	11	SS	MA

Daftar Kelompok Masyarakat (POKMAS)

4.2.4 Tahap Intervensi (Intervention)

Tahap intervensi ini adalah implementasi dari tahap perencanaan (*Planning*) tahap intervensi ini dapat berhasil dan berjalan lancar apabila RTS mau bersungguh-sungguh mengelola bantuan usaha produktif yang sudah KRTP tentukan serta melakukan pelatihan-pelatihan guna menunjang pengetahuan RTS dalam pemenuhan kebutuhan dasar KRTP.

a. Penyerahan Bantuan Barang Kepada KRTP

Waktu dilaksanakannya penyerahan bantuan barang pada KRTP setelah serah terima hasil pengadaan barang dari TPK kepada pemerintah desa, yang dilaksanakan dalam forum pertemuan pokmas yang dihadiri oleh KRTP secara langsung dan atau bersama ART pengelola usaha. Dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu dari sekretariat desa, pendamping desa dan pendamping kabupaten dengan peserta dari KRTP atau anak

rumah tangga (ART) sasaran program. Informan SQ menambahkan :

“Dalam tahap penyerahan bantuan barang kepada KRTP, kita memberikan informasi mengenai bantuan yang nantinya akan diberikan, kita juga memberikan arahan, motivasi atau bimbingan teknis mengenai pengelolaan usaha KRTP nantinya, dan penyerahan bantuan”. (SQ : 24 Maret 2019)

Selanjutnya informan LY menambahkan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam penyerahan bantuan barang kepada KRTP yang menjelaskan:

“Pelaksanaan kegiatan dalam penyerahan bantuan barang kepada KRTP dari sekretariat desa difasilitasi oleh pendamping kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan untuk menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan pada DPMD kabupaten soal rencana atau agenda penyerahan bantuan KRTP. Sekretariat desa juga difasilitasi oleh pendamping kabupaten menyiapkan berkas serah terima bantuan barang pada KRTP seperti undangan kepada anggota pokmas, berita acara penyerahan bantuan, daftar nama KRTP penerima serta rincian barang bantuan, spanduk pencairan, dan dokumentasi biasanya”. (LY : 22 Februari 2019)

Inti dari hasil kutipan wawancara diatas informan LY menyatakan penyerahan barang bantuan kepada KRTP, dari sekretariat desa dibantu dan difasilitasi oleh pendamping kabupaten dan tim fasilitasi dari kecamatan untuk melengkapi berkas-berkas serah terima yang dibutuhkan pada saat penyerahan bantuan barang. Senada dengan informan LY informan MA menambahkan yang menjelaskan:

“Pendamping desa difasilitasi pendamping kabupaten untuk melakukan pengecekan kembali

pada kesesuaian barang. Penyerahan bantuan barang untuk KRTP oleh pemerintah desa dibantu sama sekretariat desa, pendamping desa dan pendamping kabupaten. Pada penyerahan bantuan barang juga dihadiri oleh KRTP sendiri secara langsung atau apabila berhalangan karena ada faktor lain dan tidak memungkinkan untuk hadir bisa diwakilkan oleh ART yang menjalankan usahanya nanti, dan penyerahan bantuan pada KRTP ini diserahkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak dana masuk ke rekening kas desa, penyerahan bantuan barang pada KRTP juga didokumentasikan satu persatu dengan disertai bukti tanda terima". (MA : 24 Maret 2019)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara informan LY dan MA tersebut menyatakan bahwa pemerintah desa dibantu oleh sekretariat desa, pendamping desa dan pendamping kabupaten dalam pelaksanaan penyerahan barang bantuan kepada KRTP. Sekretariat desa difasilitasi oleh pendamping kabupaten untuk menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan pada DPMD kabupaten soal rencana atau agenda penyerahan bantuan KRTP sekretariat desa juga difasilitasi oleh pendamping kabupaten untuk menyiapkan berkas serah terima bantuan barang pada KRTP yang diberikan selambat-lambatnya dua bulan setelah dana masuk ke rekening desa.

Kesimpulan dari semua pernyataan diatas adalah pemerintah desa dibantu dengan sekretariat desa, pendamping desa dan pendamping kabupaten untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada dinas PMD dan menyiapkan berkas serah terima bantuan pada KRTP. Pendamping juga memberikan informasi mengenai bantuan yang akan diberikan pada KRTP, memberikan arahan kepada KRTP, motivasi atau bimbingan teknis mengenai pengelolaan usaha KRTP nantinya

dan membantu untuk penyerahan bantuan langsung kepada KRTP secara langsung.

b. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan selama pelaksanaan program dan setelah program ini selesai. Bimbingan teknis (Bimtek) dapat dilaksanakan oleh sekretariat provinsi, kabupaten, desa, OPD terkait, dan atau stakeholder yang dibantu oleh pendamping dari kabupaten. Bimbingan teknis paska program diserahkan kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, tim penggerak PKK juga melakukan fasilitasi, bimbingan teknis dan pendampingan melalui kegiatan sepuluh program pokok PKK.

Sasaran dalam bimbingan teknis ini adalah KRTP dan atau anak rumah tangga (ART) pengelola bantuan yang didampingi oleh pendamping desa. Informan LY yang menjelaskan :

“Bimbingan teknis ini perlu dilakukan untuk bisa memberikan penyuluhan, asistensi, konsultasi, bimbingan, dan fasilitasi teknis kepada KRTP penerima bantuan agar dapat memanfaatkan serta mengembangkan bantuan usaha yang sudah diberikan secara optimal. Bimtek ini berbentuk seperti bimbingan usaha, dan peningkatan sumber daya manusia, teknologi, akses pada pemasaran, manajemen atau informasi lain yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa juga berbentuk seperti resolusi konflik atau penanganan terhadap permasalahan yang sedang terjadi kepada KRTP”.
(LY: 22 Februari 2019)

Dari kutipan wawancara tersebut bimtek dilakukan agar bisa memberikan bimbingan atau fasilitasi kepada KRTP untuk bisa memanfaatkan dan mengembangkan usahanya dengan pelatihan yang sudah diberikan. Tahap bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan oleh PKK desa, dan atau stakeholder

yang dibantu oleh pendamping dari kabupaten untuk melakukan penyuluhan, bimbingan atau fasilitasi teknis, bimtek juga dapat berupa peningkatan SDM, teknologi, manajemen atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Ditambahkan oleh informan SQ yang memaparkan :

“Bimtek kemaren pelatihan pengelolaan olahan makanan berbahan ikan bekerja sama dengan PD dengan PKK, olahan itu bahannya dari lele karena disini itu banyak yang ternak lele kan mudah dicari juga nah lele itu tadi diolah dijadikan nugget, abon lele, bakso lele dan kerupuk juga ada”. (SQ : 24 Maret 2019)

Selanjutnya disambung oleh informan MA selaku pendamping desa yang menjelaskan :

“Jadi dalam bimtek ini PD berusaha untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan mengembangkan usaha yang diberikan kepada KRTP, sehingga kedepannya dapat memberikan manfaat yang optimal secara ekonomi”. (MA : 24 Maret 2019)

Dari wawancara kedua informan tersebut mengatakan bahwa pendamping berusaha untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada seperti salah satu bimtek yang dilakukan KRTP bersama dengan PKK desa adalah pengelolaan olahan makanan dari bahan lele untuk dijadikan nugget, kerpiki lele, abon lele atau olahan makanan yang lain. Informan SI selaku RTS juga menginformasikan sebagai berikut :

“Kemaren waktu bimtek membuat olahan makanan dari bahan dasar ikan lele mbak, terus diolah dijadikan nugget terus ada yang dijadikan kerupuk lele juga, abon juga ada, lumayan mbak bisa buat isi warung selain dijadikan lauk lele goreng bisa buat cemilannya juga biasanya nugget lele juga saya jual dengan kemasan pakek mika plastik gitu lumayan penghasilannya”. (SI : 24 Maret 2019)

Ungkapan yang sama diutarakan oleh informan RH yang juga menyatakan bahwa :

“Pelatihannya kemarin membuat olahan makanan dari lele dibuat menjadi olahan krupuk trus nuget, sangat bermanfaat bagi saya karena saya sebelumnya tidak tau bagaimana membuat nuget, dan sekarang saya bisa membuatnya dan saya juall di warung saya juga”. (RH : 24 Maret 2019)

Kesimpulannya adalah bimbingan teknis ini perlu untuk dilakukan untuk dapat memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi dan fasilitasi teknis pada KRTP agar dapat memanfaatkan dan dapat mengembangkan usaha produktif KRTP.

4.2.5 Tahap Evaluasi dan Terminasi (Evaluation and Termination)

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah sasaran program dan tujuan pendampingan sudah tercapai atau belum serta upaya lainnya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan serta sasaran program. Evaluasi juga dilaksanakan untuk memantau perkembangan program JM PFK dan mengetahui hasil yang sudah dilakukan selama berjalannya program. Tahap monev juga melakukan penilaian, mendokumentasikan sekaligus menyusun tindakan untuk perbaikan.

a. Pengelola Usaha

Pengelola usaha adalah usaha produktif yang dikelola baik secara mandiri oleh KRTP dalam rangka agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Aset yang direalisasikan melalui usaha KRTP dikelola untuk mendukung dan meningkatkan pada usaha-usaha produktif setiap KRTP.

Selain itu dijelaskan juga oleh informan SQ yang merupakan pendamping desa menjelaskan:

“Disini KRTP sendiri yang mengelola. Dalam satu keluarga ada yang masih satu rumah dengan ART, nanti masih bisa membantu menangani usahanya, kalau bantuan yang diberikan ke orang yang sudah tua dan sendirian kan yang dibutuhkan lebih ke konsumtif nah itu baru kita ganti, Karena program ini dituntut untuk bisa berkembang kalau habis kan repot. (SQ : 24 Maret 2019)

Hasil wawancara dari informan SQ menjelaskan bahwa yang mengelola usaha produktif di Desa Bulurejo adalah KRTP sendiri, atau apabila dalam satu rumah memang masih ada keluarga atau anak rumah tangga nanti dapat bergantian berjualannya atau saling membantu. Karena memang bantuan ini diprioritaskan kepada KRTP yang mempunyai anak atau KRTP sendiri tapi yang masih produktif. Diperjelas oleh informan LY yang menjelaskan:

“Prinsipnya bantuan yang diterima adalah untuk KRTP dengan ART atau anak rumah tangga, sehingga pengelolaanya bisa dilakukan KRTP dalam satu keluarga. Tugas dari sekretariat desa dan pendamping desa memantau perkembangan usaha produktif KRTP atau usaha KRTP. Untuk usaha yang sudah berkembang dapat difasilitasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan atau modal yang melalui lembaga keuangan mikro yang ada ditingkat desa”. (LY : 22 Februari 2019)

Selanjutnya, informan MA mengungkapkan pernyataan yang senada dengan LY yang menjelaskan :

“PD dan sekretariat desa terus memantau perkembangan usaha produktif dari KRTP ini, ada juga yang mendapatkan fasilitasi permodalan dari bank desa, pendamping hanya sebagai perantara dan menghubungkan pada bank desa atau koperasi jadi kan lumayan bisa menambah modal KRTP nya”. (MA : 24 Maret 2019)

Dari pernyataan informan LY dan MA dapat dipahami bahwa bantuan dalam tahap pengelola usaha yang diberikan untuk KRTP terutama yang masih mempunyai ART dalam satu keluarga dan usaha KRTP berkembang, difasilitasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan atau modal dari lembaga keuangan mikro desa. Pendamping desa (PD) dan sekretariat desa bertugas mengawasi dan memantau perkembangan usaha produktif dari KRTP. Ditambahkan oleh informan SI selaku kepala rumah tangga perempuan yang menyatakan :

“Untuk pengelola usaha alhamdulillah usaha ini saya jalankan sendiri maksudnya saya yang mengelola langsung ya terkadang memang dibantu sama anak kalau pas ramai gitu. Dan setelah program PFK ini selesai saya juga dapat bantuan pinjaman permodalan alhamdulillah, jadi bisa lebih mengembangkan usahanya lagi”. (SI : 24 Maret 2019)

Hasil wawancara informan diatas mengatakan bahwa informan SI mengelola usahanya sendiri meskipun terkadang dibantu dengan anak rumah tangga (ART), sedangkan Pasca program informan SI mendapatkan bantuan penambahan modal guna mengembangkan usahanya. Ditambahkan oleh informan RH yang menyatakan :

“Usaha ini saya jalankan sendiri saya kelola sendiri setiap harinya karena anak sekolah, tapi kalau pas ada di rumah dan saya lagi masak atau ngurus yang lain, anak saya yang meladeni”.(RH : 24 Maret 2019)

Kesimpulan dari pernyataan semua informan di atas adalah yang mengelola usaha produktif adalah KRTP sendiri, atau memang apabila dalam satu rumah masih ada keluarga dapat bergantian dalam berjualannya. Untuk usaha produktif KRTP yang sudah berkembang nanti akan difasilitasi

pembiayaan permodalan atau pinjaman modal dari lembaga keuangan mikro desa guna mengembangkan usaha KRTP.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atau monev dilaksanakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan Jalin Matra PFK, pendamping melakukan penilaian, dan mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Seperti yang dijelaskan informan EP berikut ini :

“Monitoring dan evaluasi kita menyebutnya dengan monev, secara berjenjang oleh pendamping desa, sekretariat desa, sekretariat kabupaten, pendamping kabupaten, pendamping provinsi dan sekretariat provinsi. Monitoring dan evaluasi ini itu sebenarnya bisa dilakukan oleh tim independen yang secara langsung ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jatim dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PFK tahun 2018, monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monev partisipatif juga dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk sekedar berbagi pengalaman secara terbuka yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan, serta masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.” (EP: 13 Maret 2019)

Kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa organisasi pengelola Jalin Matra PFK baik pada tingkat provinsi sampai tingkat desa dapat melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Jalin Matra PFK. Dijelaskan lebih lanjut oleh informan MA mengenai monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang, yang dijelaskan sebagai berikut :

“Pendamping datang kerumah-rumah KRTP menanyakan apakah sudah sesuai dengan permintaannya, ibunya puas apa tidak, ini ada perkembangan apa tidak dari yang semula menjadi buruh tani saja sekarang ada pendapatan dari usaha

Jalin matra “alhamdulillah sekarang sudah berkembang sekarang kerja di sawah buat saya makan dan pendapatan usaha ini saya sisihkan saya kembangkan bisa dibuat tabungan bu” gitu, jadi alhamdulillah ketika monev semuanya bilang sangat terbantu dengan adanya bantuan ini”. (MA : 24 Maret 2019)

Informan MA menjelaskan bahwa pendamping desa dan pendamping kabupaten melakukan monev ke rumah-rumah KRTP untuk mengetahui perkembangan usaha produktif KRTP, mengetahui mengenai puas apa tidak KRTP mendapatkan program bantuan PFK, sudah sesuai apa belum, apakah bantuan program PFK ini dapat membantu ekonomi keluarga apa tidak. Dilanjutkan oleh informan LY yang menyatakan :

“Kalau monev dari pendamping kabupaten ya kita memonitoring dari awal pelaksanaan rebug warga, verifikasi kelayakan calon RTS sampai perkembangan usaha KRTP yang sudah berjalan secara berjenjang”. (LY : 22 Februari 2019)

Selanjutnya, informan SQ menyampaikan pernyataan yang sama dengan informan LY yang menyatakan :

“Kita melakukan monitoring mengenai perkembangan usaha KRTP, berhasil atau tidak, atau mungkin stagnan, jadi usahanya tidak turun dan juga tidak naik atau berkembang. Pokoknya semua perkembangan dari KRTP itu kita pantau”. (SQ : 24 Maret 2019)

Ditambahkan oleh informan SI selaku rumah tangga sasaran yang menyampaikan pernyataan yang hampir sama dengan informan yang lain, sebagai berikut :

“Sering kalau pendamping datang ke sini, untuk sekedar makan sambil menanyakan usaha yang dijalankan apakah lancar atau apa ada kendala

atau tidak. Terus juga waktu monev terakhir itu pendamping sama orang kabupaten juga datang untuk survey, apakah bantuannya sudah sesuai, bermanfaat atau tidak, terus usahanya berkembang atau stagnan. Alhamdulillah bantuan yang diberikan ke saya memang sesuai dengan yang saya inginkan serta yang saya butuhkan dan tentunya dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat sekali dan membantu banget mbak alhamdulillah dapat bantuan pinjaman modal lagi dengan bunga ringan”. (SI: 24 Maret 2019)

Ditambahkan kembali oleh informan RH yang menyatakan hal yang sama yaitu :

“Pendamping dengan orang kabupaten datang untuk melakukan survey dan mengisi data mengenai kesesuaian barang yang diberikan apakah sudah sesuai atau tidak dan apakah ada kendala dan kalau ada kendala apa kendalanya, sembari cerita”. (RH : 24 Maret 2019)

Kesimpulan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah sebuah tindakan secara berjenjang oleh pendamping desa, sekretariat desa, sekretariat kabupaten, pendamping kabupaten, pendamping provinsi dan sekretariat provinsi atau tim independen yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jawa Timur untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan, melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan serta membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya serta menyusun tindakan untuk perbaikan selanjutnya.

Pendamping melakukan pendataan mengenai kesesuaian bantuan yang sudah diberikan, menanyakan secara langsung kepada KRTP mengenai program PFK yang diberikan apakah sudah sesuai dengan keinginan dari KRTP, apakah KRTP merasa puas, merasa terbantu dan apakah ada peningkatan pendapatan setelah adanya program.

c. Pelestarian dan Keberlanjutan Program

Program Jalin Matra PFK merupakan suatu program yang lahir dari sebuah pemikiran mengenai rumah tangga miskin yang dialami oleh perempuan atau lebih tepatnya janda, kehidupan yang sulit dan harus menghidupi keluarga dan anak-anaknya yang perlu disekolahkan. Sehingga untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan pada kepala rumah tangga perempuan, dengan begitu harus ada upaya khusus dalam pelestarian usaha KRTP dari berbagai pihak khususnya dari stakeholder pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Pelestarian dan keberlanjutan program PFK dikoordinasikan oleh sekretariat desa bisa dalam bentuk pelatihan, perkuat modal dan pendampingan terhadap KRTP. Dari data tersebut ditambahkan oleh informan LY yang memaparkan bahwa :

“Untuk pelestarian kita perkuat modal jadi mereka kita bantu untuk chaneling atau menghubungkan pada pengambilan modal, ada juga yang bermitra jadi KRTP bermitra dengan PD, KRTP kepingin alat untuk meningkatkan pemasukannya, kemarin pelestarian kan pelatihannya bikin jamu instan, KRTP berminat sekali nah PD nya juga mau bermitra dengan KRTP dan sampai sekarang berjalan dan sukses. Kemudian yang modal itu kita sudah sampaikan yaitu dari bank UMKM jatim dan BNI46 baru tahun ini 2019 mulai untuk permodalannya”. (LY: 22 Februari 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara informan diatas menjelaskan mengenai tindak lanjut dari pelestarian dan keberlanjutan program yang saat ini berusaha menchanneling dan melakukan kerja sama yakni dari bank UMKM bank Jatim dan bank BNI untuk membantu tambahan modal atau perkuat

modal KRTP. Ditambahkan oleh informan SI yang mengatakan:

“Setelah program ini selesai, alhamdulillah saya dapat bantuan pinjaman permodalan dengan bunga yang lumayan rendah, lumayan buat tambah-tambah mbak dan bisa nyisihkan uang sedikit-sedikit lumayan dari pada tidak sama sekali”. (SI : 24 Maret 2019)

Berdasarkan kutipan informan diatas menjelaskan bahwa setelah program selesai KRTP SI mendapatkan bantuan pinjaman modal dengan bunga ringan untuk bisa menambah modal usaha yang dijalankan.

Kesimpulan dari pelestarian dan keberfungsian program menurut pernyataan kedua informan tersebut yaitu, pemerintah provinsi memfasilitasi kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten. Keberlanjutan (*sustainability*) PFK dilaksanakan melalui fasilitasi dalam pengembangan usaha produktif KRTP, memfasilitasi penguatan modal sosial KRTP melalui penguatan yang ditumbuhkan atas dasar kesadaran partisipatoris dan pengembangan pada jejaring usaha, fasilitasi permodalan yang sudah bekerja sama dengan perbankan yang ditunjuk dan pengembangan dalam kapasitas sumber daya manusia KRTP. Bahkan ada KRTP yang bermitra dengan pendamping desa untuk dapat meningkatkan pemasukannya.

Keseluruhan kesimpulan dari tahapan pendampingan program diatas adalah program penanggulangan feminisasi kemiskinan yang ada di desa Bulurejo merupakan sebuah wadah untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan dasar KRTP atau kepala rumah tangga perempuan yang biasa disebut dengan feminisasi kemiskinan. Dibawah ini adalah progres atau tahapan program PFK di Desa Bulurejo antara lain:

- 1) Sosialisasi
- 2) Pra rebug warga & Rebug Warga
- 3) Klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP
- 4) Pengajuan pencairan dana bantuan keuangan khusus
- 5) Rebug pokmas persiapan realisasi bantuan
- 6) Penyerahan bantuan barang kepada KRTP
- 7) Bimbingan teknis
- 8) Pengelola usaha
- 9) Monitoring dan evaluasi
- 10) Pelestarian dan keberlanjutan program

Dalam hal ini pemerintah desa Bulurejo ikut berpartisipasi dalam program yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah desa adalah sebuah penyalur dari program PFK yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang dibantu dengan tenaga pendamping kabupaten dan tenaga pendamping desa atau *Mother Care*.

Dalam rangka pendampingan yang memiliki kapasitas memadai untuk dikembangkan menjadi seorang pendamping masyarakat (*community Development*), sekaligus sebagai pendamping pelaksanaan program Jalin Matra PFK ditingkat desa, maka strategi rekrutmen yang dikembangkan adalah, pendamping kabupaten berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Kecamatan dan pemerintah desa untuk menginventarisir para calon pendamping desa yang memenuhi persyaratan, pendamping kabupaten bersama dengan tim fasilitasi kecamatan melakukan verifikasi kepada calon pendamping desa berdasarkan kriteria dan berdasarkan hasil dari verifikasi, pendamping kabupaten merekomendasikan calon pendamping desa yang terpilih kepada kepala desa, dan pemilihan pendamping desa jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan pertimbangan jumlah sasaran KRTP di desa Bulurejo.

Memperhatikan hasil identifikasi kualifikasi pendamping desa program Jalin Matra PFK yang dibutuhkan, maka persyaratan pokok minimal yang harus dimiliki oleh calon pendamping desa adalah yang memiliki enam (6) dasar-dasar pokok sebagai berikut :

- a. Diprioritaskan berusia maksimal 45 tahun.
- b. Diprioritaskan berijazah minimal SMA atau sederajat.
- c. Diprioritaskan berasal dari kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) tingkat desa dan diutamakan perempuan.
- d. Berkelakuan baik, jujur, berdedikasi, loyalitas, dan bertanggung jawab.
- e. Diprioritaskan mampu mengendarai sepeda motor.
- f. Diprioritaskan mampu mengoperasikan komputer.

Tenaga pendamping kabupaten sendiri adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur dibawah manajemen Perguruan Tinggi, pendamping untuk memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra (JM) penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK) di kabupaten. Tugas tenaga pendamping adalah membantu dalam pelaksanaan program Jalin Matra PFK dari pelaksanaan rebug warga, verifikasi kelayakan calon rumah tangga sasaran PFK, pelaksanaan klarifikasi dan identifikasi usulan KRTP, pembentukan pokmas dan rebug pokmas KRTP, penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan, penyerahan barang bantuan, selanjutnya pertanggung jawaban bantuan keuangan desa sampai pada perkembangan usaha KRTP secara berjenjang.

Program Jalin Matra PFK yang diselenggarakan oleh pendamping melalui peran sebagai fasilitator, pendidik (*educator*), broker, dan mediator. Pelaksanaan kegiatan tenaga pendamping diperlukan petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan program. Ditambahkan oleh informan LY yang menjelaskan:

“Pendamping itu sesuai dengan aturan dalam rangka memberikan fasilitasi dan pendampingan terhadap KRTP dalam melaksanakan program Jalin Matra PFK, jadi fungsinya disitu untuk memfasilitasi kemudian mengkoordinasikan pada pendamping desa atau KRTP”.
(LY: 22 Februari 2019)

Penjelasan wawancara diatas menjelaskan bahwa adanya pendamping kabupaten merupakan suatu kewajiban dalam program pemberdayaan seperti ini,

pendamping berperan memberikan fasilitasi dan pendampingan selama program dan berkoordinasi langsung dengan pendamping desa serta para KRTP.

Kewajiban akan adanya pendamping dalam program JM PFK tersebut diamanahkan kepada kabupaten untuk melakukan seleksi tenaga pendamping pada taraf kabupaten. Dijelaskan mengenai peran sekretariat kabupaten yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten dalam melakukan pemilihan tenaga pendamping kabupaten. Terkait dengan penentuan pendamping ditambahkan lagi oleh informan LY yang menjelaskan:

“Pendamping kabupaten itu yang menentukan nantinya adalah dinas PMD kabupaten, yang memberikan kriteria pemilihan pendamping itu memang orang yang sudah aktif dalam sosial masyarakat, seperti aktif di PKK atau organisasi-organisasi kesejahteraan lainnya” (LY: 22 Februari 2019)

Penunjukan atau pemilihan pendamping kabupaten dan pendamping desa dipilih memang karena pengalamannya yang diperoleh di masyarakat secara langsung atau pengalaman di desa selama ini, ditambahkan oleh informan SQ yang menjelaskan:

“Kalau saya memang sudah berkecimpungnya di PKK dari dulu, dan saya dipilih langsung dari pihak desannya mungkin mereka menilai karena saya langsung berhadapan dengan para masyarakat langsung terutama ibu-ibu, mungkin jadi lebih paham, kemarin itu rekomnya diprioritaskan berasal dari kader PKK yang aktif di masyarakat. Diutamakan perempuan karena sasarannya adalah perempuan agar dapat mempermudah proses pendekatan nantinya”. (SQ : 24 Maret 2019)

Berdasarkan informan diatas bahwa kriteria dalam pemilihan pendamping kabupaten adalah yang memang sudah aktif dalam masyarakat atau organisasi masyarakat dan mempunyai pengalaman bermasyarakat secara langsung. Penjelasan diatas ditambahkan oleh infotman MA yang menjelaskan bahwa :

“Iya kalau pendamping desa dulu itu dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal, kalau saya dulu salah satunya karena saya bisa mengoperasikan komputer , mangkannya ditunjuk

untuk jadi partnernya bu Sq untuk saling melengkapi ya dalam mendampingi KRTP, karena pendamping selain mendampingi KRTP secara langsung, juga melaporkan perkembangan tiap minggunya, apakah usaha yang diberikan sudah berkembang, atau mengalami kendala itu semua kita pantau dan dilaporkan secara online, itulah kenapa kriteria pendamping salah satunya juga harus bisa mengoperasikan komputer”. (MA: 24 Maret 2019)

Berdasarkan uraian beberapa informan diatas, menjelaskan bahwa seorang pendamping desa dipilih langsung dari pihak desanya dengan beberapa kriteria yaitu calon pendamping desa harus pernah aktif dalam bermasyarakat, organisasi masyarakat atau kegiatan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta dapat mengoperasikan komputer karena sistem pelaporannya online, dengan minimal usia dan lain sebagainya.

Pendamping adalah suatu kewajiban dalam program Jalin Matra PFK. Menurut data di Desa Bulurejo sendiri dianggap desa yang cukup berhasil dalam melaksanakan program PFK yang didampingi oleh dua seorang pendamping yaitu SQ dan MA yang merupakan pendamping desa (*mother care*) dan didampingi juga oleh pendamping kabupaten yaitu LY yang juga menjadi informan pokok dalam penelitian ini.

Pendamping desa dan pendamping kabupaten diharapkan dapat berfungsi secara maksimal untuk mendorong partisipasi aktif KRTP dalam penanggulangan feminisasi kemiskinan. Hal tersebut tak luput dari adanya peran pendamping sebagai fasilitator, pendidik (*educator*), broker dan peran-peran teknis. Berikut dijelaskan mengenai peran pendamping program JM PFK di Desa Bulurejo.

Tenaga pendamping memiliki peran sebagai fasilitator yang bertugas untuk mendorong dan membangkitkan semangat upaya pengembangan kepala rumah tangga perempuan. Pendamping menggunakan berbagai cara untuk dapat memfasilitasi KRTP dalam pelaksanaan program. Informan LY yang merupakan pendamping kabupaten program JM PFK di Desa Bulurejo menjelaskan :

“Dapat dikatakan berperan sebagai fasilitator juga, karena kita memfasilitasi bagaimana kita pendamping kabupaten membantu menjembatani agar dapat mempermudah setiap pelaksanaannya

dilapangan dari awal berjalannya program hingga program selesai”.
(LY : 22 Februari 2019)

Menurut informan LY yang menyatakan bahwa pendamping berperan sebagai fasilitator agar dapat mempermudah pada setiap pelaksanaan program, dari memfasilitasi pelaksanaan pra rebug warga hingga tahap monitoring dan evaluasi program. dilanjutkan oleh informan MA yang menyatakan:

“Pendamping memberikan motivasi kepada KRTP, berupa semangat untuk terus berusaha, pendamping melakukan pendekatan secara langsung kepada KRTP agar KRTP merasa nyaman dan tidak malu untuk berkeluh kesah”. (MA: 24 Maret 2019)

Ditambahkan oleh informan SQ yang sependapat mengenai peran pendamping sebagai fasilitator, menyatakan :

“Selain membantu dan memfasilitasi KRTP dalam pelaksanaan kegiatan, kita juga memberikan motivasi pada KRTP yang merasa tertekan atau merasa minder ya dengan orang-orang yang berada diluar sana, jadi kita memberikan motivasi bahwa banyak diluar sana yang hidupnya jauh dibawah kita, harus sering-sering bersyukur ya, alhamdulillah sekarang ibu dapat bantuan program PFK bisa buka usaha juga kan alhamdulillah gitu. Jadi membuka pemikiran mereka dan memberikan motivasi”. (SQ : 24 Maret 2019)

Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendamping memfasilitasi KRTP, memfasilitasi pihak desa dalam pelaksanaan kegiatan program PFK. Pendamping juga melakukan pendekatan dengan memberikan motivasi secara individu kepada KRTP agar dapat selalu optimis dengan kehidupan yang dijalannya dan tidak merasa minder dengan orang lain dan memberikan rasa percaya diri bahwa KRTP pun juga bisa seperti mereka.

Kesimpulan dari semua pernyataan tersebut pendamping berperan sebagai fasilitator memfasilitasi berlangsungnya dalam setiap kegiatan dalam pelaksanaan program JM PFK dan menjembatani KRTP atau pemerintah desa dalam menyiapkan pelaksanaan program agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pendamping juga memberikan motivasi mengenai semangat untuk terus percaya diri dan membangun usaha mereka dan buktikan bahwa KRTP juga bisa melakukan hal yang sama, KRTP dapat membangun usaha seperti orang yang

lainya. Pendamping melakukan pendekatan dengan cara pendekatan langsung secara individu kepada KRTP agar KRTP merasa nyaman dan tidak berkecil hati.

Kedua pendamping mempunyai peran sebagai pendidik yaitu sebuah tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas KRTP agar lebih berdaya, dan pendamping mempunyai peran aktif untuk memberi masukan yang positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman seperti bertukar gagasan dengan KRTP. Dalam program JM PFK dijelaskan bagaimana informan MA melakukan peran pendidik pada KRTP yang menjelaskan :

“Pendamping Bukan sebagai guru tapi lebih ke transfer pengetahuan terus pelatihan juga. jadi waktu itu juga diadakan pelatihan didesa yang mengikut sertakan KRTP”. (MA :24 Maret 2019)

Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh informan LY selaku pendamping kabupaten program JM PFK, mengatakan :

“Kita berperan aktif dalam memberikan masukan yang positif, bertukar pemikiran dengan KRTP mengenai keluhan kesah atau keinginan dari KRTP, terus juga memberikan pengetahuan dengan cara kepelatihan pada KRTP”. (LY : 22 Februari 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, informan MA dan informan LY mengatakan bahwa peran pendamping sebagai pendidik bukan sebagai guru melainkan berperan aktif memberikan masukan yang positif dan bertukar pemikiran dan gagasan dengan KRTP, serta memberikan pengetahuan dengan cara melakukan pelatihan secara langsung pada RTS. Ditambahkan oleh informan SQ yang menyatakan :

“Mendampingi saat pelatihan, pelatihan dari kabupaten soal management keuangan atau dari PKK, itu kita memberikan seperti pemahaman terkait manajemen tersebut kepada KRTP yang belum paham mengenai materi yang diberikan dan juga memberikan arahan pada saat pelatihan berlangsung dari PKK kita juga membantu terus dalam proses tersebut”. (SQ: 24 Maret 2019)

Informasi diatas menjelaskan bahwa peran pendamping pada saat itu memberikan arahan dan pemahaman pada saat pelatihan kepada KRTP agar dapat diterima dengan jelas oleh KRTP.

Kesimpulan dari pernyataan semua informan mengenai peran pendamping sebagai pendidik adalah pendamping berperan aktif dalam membantu KRTP serta memberikan masukan-masukan positif dan juga memberikan informasi pada KRTP, pendamping juga dapat bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman dari KRTP, sehingga pendamping juga harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas agar dapat bertukar gagasan dengan RTS.

Ketiga pendamping harus bisa menjadi sebuah penghubung (Broker) dari KRTP, pemerintah desa dengan pihak luar dari pemerintah kabupaten atau lembaga yang lainnya, sesuai dengan yang KRTP perlukan. Pendamping harus memiliki banyak sumber agar bisa dapat membantu pemberdayaan KRTP, informan MA menjelaskan bagaimana perannya sebagai broker yang menjelaskan:

“Pendamping terus mencoba dan berusaha menghubungkan KRTP pada sumber-sumber yang memang diperlukan oleh KRTP seperti kepada unit simpan pinjam atau koperasi desa yang dapat diajak bekerja sama agar usaha KRTP dapat lebih berkembang lagi”. (MA : 24 Maret 2019)

Senada dengan yang diungkapkan oleh informan MA mengenai menghubungkan pada sistem sumber. Informan SQ juga menjelaskan :

“Membantu akses pada pelayanan dasar ya seperti kesehatan, pendidikan. Juga memberikan akses pada pelatihan olahan makanan yang dilakukan oleh PKK atau kabupaten, yang nantinya dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan hidup KRTP”. (SQ: 24 Maret 2019)

Kutipan wawancara diatas menjelaskan mengenai pendamping berperan untuk menghubungkan pada sistem sumber seperti kepada simpan pinjam atau koperasi desa, memberikan akses pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dilakukan oleh PKK desa atau pelatihan Kabupaten. Pendamping juga aktif untuk terus memonitoring seperti yang diungkapkan oleh informan LY yang menjelaskan :

“Pendamping juga berperan sebagai *quality control* atau pengawas dalam pengembangan usaha yang dijalankan oleh KRTP atau RTS, maka perlu adanya monitoring terus dalam berjalannya program”. (LY: 22 Februari 2019)

Dari kutipan infoman LY mengatakan bahwa pendamping membantu untuk menghubungkan ke sistem sumber yang memang dapat berguna bagi KRTP kedepannya pendamping juga selalu memonitoring usaha produktif KRTP apakah sudah berkembang atau stagnan. KRTP dibantu untuk mendapatkan sistem sumber baik ke pelayanan kesehatan, dan pendidikan bagi yang belum mendapatkan akses tersebut serta pada pelayanan penambahan modal usaha.

Peran ke empat adalah peran-peran teknis, dimaksudkan yaitu suatu peran atau ketrampilan yang bersifat praktis yang didapatkan bahwa pendamping membantu KRTP dalam pelaksanaan program JM PFK dan pengelolaan bantuan, pendekatannya dengan cara atau ketrampilan yang dimiliki oleh pendamping itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang menjelaskan bahwa :

“Pendamping yang lebih mengacu kepada ketrampilan, ketrampilan bagaimana dapat melakukan tugasnya dengan berbagai cara dan ketrampilan yang pendamping punya untuk bisa mengetahui yang sedang diinginkan atau dikeluhkan oleh KRTP. Seperti cara pendamping berkomunikasi dengan KRTP, bernegosiasi, atau sekedar konsultasi mengenai permasalahannya apa dan keinginannya gimana seperti itu”. (LY : 22 Maret 2019)

Dari kutipan wawancara informan LY diatas, ditambahkan oleh informan SQ yang menjelaskan bahwa:

“Pendamping memang dituntut untuk bernegosiasi, membangun relasi pada KRTP karena itu salah satu pendekatannya kita ke KRTP agar kita itu tau masalah yang sedang dihadapi oleh KRTP apa gitu”. (SQ : 24 Maret 2019)

Diperjelas oleh informan MA mengenai peran-peran teknis pendamping dalam kepala rumah tangga perempuan yang menyatakan :

“Ada KRTP yang memang punya keinginan mau usaha apa, kita membantu memberikan konsultasi seperti kemarin ada yang ingin membeli kulkas, kita tanyakan kembali mengenai listrik dirumah

cukup apa tidak kan bantuan ini sekali lagi untuk meringankan bukan memberatkan. Terus ada yang ingin bantuannya dirupakan berupa sepeda motor kita juga menanyakan dan memberi konsultasi pada KRTP, memberikan pertimbangan kalau misalkan bantuannya diganti sepeda angin dan sisanya bisa buat modal usahanya gimana kan lebih enak karena tidak perlu ada biaya perawatan yang intens seperti sepeda motor, tapi tetap keputusan ada di KRTP kita hanya memberi pertimbangan. Tapi alhamdulillah karena KRTPnya juga enak dapat diajak untuk diskusi dan mempertimbangkan ini dan itu, akhirnya tidak jadi membeli motor karena kalau dipikir kedepan belum bayar pajaknya, bensin dan perawatannya itu pasti juga memberatkan”. (MA : 24 Maret 2019)

Dari pernyataan ketiga informan menyatakan bahwa pendamping dituntut untuk lebih kreatif dan terampil untuk bisa melakukan tugasnya sebagai pendamping. Seorang pendamping juga dituntut pandai berkomunikasi, dan membangun relasi pada KRTP, agar pendamping lebih dekat dengan KRTP.

4.3 Pembahasan

Berpijak dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan dalam upaya untuk menumbuh kembangkan modal dasar capaian pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan serta memperluas Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) yang diwujudkan melalui program Jalin Matra.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup dibawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada KRTP, oleh karena itu fenomena ini lebih dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan yang memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya. Menurut Moghadam (2005:7) feminisasi kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama-sama.

Kemiskinan yang dihadapi oleh KRTP secara umum lebih parah apabila dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRTP tidak hanya

mengalami permasalahan pada sektor ekonominya, melainkan juga problematika sosial, budaya dan psikologis.

Kebutuhan untuk bisa menemukan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup hanya melalui fasilitas pada akses ekonomi, namun juga memerlukan dukungan interaksi secara intensif atau mendalam dari seorang figur yang secara keseharian sudah biasa dikenal dan dinilai mampu untuk memberikan perlindungan serta memiliki legitimasi sosial.

Figur tersebut adalah seorang pendamping yang biasa disebut “*mother care*” atau sebagai sosok ibu atau orang tua yang menjadi simpul interaksi secara intensif dan berbagi antar KRTP, sehingga dapat memupuk harapan dan semangat untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari perangkap kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap KRTP. Suharto (2010:93-95) mengutarakan bahwa pendamping merupakan salah satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan sebuah program pemberdayaan masyarakat, yang sesuai dengan prinsip dari pendamping yaitu membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri. Berdasarkan atas kebutuhan tersebut kader dari tim penggerak PKK (TP-PKK) adalah figur yang sangat tepat apabila diposisikan sebagai pendamping untuk KRTP.

Metode yang dilakukan oleh pendamping dalam program penanggulangan feminisasi kemiskinan ini adalah metode bimbingan individu (*casework*) dari awal adanya program hingga program selesai, dengan lima tahapan intervensi yaitu yang pertama tahap intake dilakukan dalam tahap sosialisasi tingkat kabupaten, kecamatan tahap pra rebug warga menentukan sekretariat desa dan pendamping desa dan tahap rebug warga adalah sosialisasi tingkat desa dengan peserta dari masyarat sekitar dan KRTP, rebug warga juga melakukan verifikasi penerima bantuan dalam hal ini pendamping desa dan pendamping kabupaten memimpin pelaksanaan verifikasi, pendamping melakukan *verifikasi by name by address* dengan kriteria KRTP yang sudah ditentukan.

Tahap kedua asassmen dilakukan dalam tahap klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP dengan cara berdialog secara langsung dengan KRTP untuk mengetahui kondisi secara faktual dan mendalami jenis kebutuhan KRTP

yang dapat berpotensi untuk bisa dikembangkan dalam upaya peningkatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. pendamping dalam tahap ini berperan sebagai peran-peran teknis karena pendamping harus mampu melaksanakan tugasnya dengan ketrampilan yang pendamping miliki.

Tahap intervensi ketiga adalah planning yang dilakukan dalam tahap pengajuan pencairan dana BKK apabila di tahap klarifikasi dan identifikasi sudah final, pendamping dapat melakukan pengajuan pencairan dana bantuan khusus (BKK) pada Gubernur Jawa Timur yang diketahui oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten, tahapan intervensi planning juga dilakukan dalam tahap rebug pokmas persiapan realisasi bantuan yang mana pendamping berperan sebagai fasilitator.

Tahap ke empat adalah tahap intervensi dilakukan dalam tahap penyerahan bantuan dan bimtek. Dalam tahap penyerahan bantuan pemerintah desa dibantu oleh pendamping desa dan pendamping kabupaten untuk melakukan penyerahan bantuan barang kepada KRTP secara langsung. Selanjutnya tahap bimtek yang dapat berbentuk bimbingan usaha, peningkatan SDM, memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi atau fasilitasi teknis pada KRTP agar dapat mengembangkan bantuan usaha yang diberikan dengan peran pendamping sebagai pendidik.

Tahap ke lima adalah evaluasi dan terminasi dilakukan dalam tahap pengelola usaha yang mana usaha dikelola secara mandiri oleh KRTP, dilakukan dalam tahap monitoring dan evaluasi yang mana pendamping melakukan monev secara berjenjang dari awal program hingga berakhirnya program, dan yang terakhir dilakukan dalam tahap pelestarian dan keberlanjutan program, pendamping terus memantau perkembangan usaha produktif KRTP, usaha yang berkembang dapat difasilitasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan atau permodalan melalui lembaga keuangan mikro ditingkat desa, pendamping dapat berperan sebagai broker untuk menghubungkan KRTP dengan lembaga .

Tahapan-tahapan tersebut untuk mencapai suatu pemenuhan kebutuhan dasar, yang nantinya dapat menjadikan KRTP menjadi lebih berdaya, dan menjadikan KRTP dapat mendayagunakan berbagai sumber meningkatkan akses

klien pada pelayanan dasar serta dapat mendorong inisiatif pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian, peneliti mengambil lima sampel kepala rumah tangga perempuan penerima bantuan program JM PFK. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, peneliti akan menguraikan mengenai bagaimana metode pendampingan kepada KRTP dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada program jalin matra seperti berikut :

4.3.1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar KRTP

Pemenuhan kebutuhan dasar kepala rumah tangga perempuan (KRTP) seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan adalah kebutuhan yang memang harus tercukupi dan tersedia oleh setiap manusia. Karena apabila kebutuhan dasar telah terpenuhi, KRTP atau rumah tangga sasaran dapat hidup sehat dan mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk bertahan hidup serta dapat terus berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap KRTP. Di bawah ini adalah beberapa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar KRTP antara lain:

a. **Memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar**

Manusia adalah sebagai makhluk yang tidak lepas dari sebuah kebutuhan. Setiap individu memiliki perilaku yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia akan merasa puas ketika suatu kebutuhannya sudah terpenuhi, akan tetapi manusia akan terus merasa kurang dalam kebutuhan yang lainnya.

Pemenuhan kebutuhan dasar ini seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan makanan, rumah atau tempat tinggal dan pakaian itu adalah kebutuhan dasar yang memang harus tersedia oleh setiap orang agar dapat terus bertahan hidup. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar maka KRTP dapat lebih berkembang lagi. Program JM PFK memberikan 10% dari total bantuan usahanya yang dirupakan menjadi sembako, berguna

agar KRTP dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, serta tujuannya agar dapat menjamin KRTP agar tetap bisa makan meskipun usaha yang dijalankan belum laku dijual.

Seperti yang dikutip oleh Santoso (2010:111-112) menurut Maslow membagi menjadi lima macam kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisik (*Physical Needs*) yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh seperti sandang, pangan dan papan. Seperti halnya KRTP, setelah adanya bantuan program JM PFK peningkatan taraf hidup pada KRTP mulai ada peningkatan, dan banyak yang merasa terbantu sampai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan dapat terpenuhi dan tercukupi setelah adanya bantuan. Sekarang KRTP dapat menyisihkan sebagian pendapatnnya untuk membiayai pendidikan anaknya atau cucu atau untuk kebutuhan sehari.

Kebutuhan rasa aman (*Safety Needs*) yaitu yang bersifat psikologi individu dalam kehidupan sehari-hari karena KRTP juga berhak untuk mendapatkan rasa aman, selanjutnya kebutuhan sosial (*Social Needs*) yaitu suatu kebutuhan yang lebih cenderung bersifat psikologis dan sering kali berkaitan dengan kebutuhan yang lainnya, misalnya diakui sebagai masyarakat dan diajak berpartisipasi dalam beberapa kegiatan. Pengakuan masyarakat pada KRTP memberikan kepercayaan dan rasa bahwa KRTP juga diakui dilingkungan masyarakatnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan salah satu bentuk kegiatan RTS adalah melakukan pelatihan pembuatan olahan makanan yang dilakukan oleh PKK desa dengan melibatkan semua anggota kepala rumah tangga perempuan untuk berpartisipasi agar dapat bermanfaat untuk pengetahuan KRTP kedepannya, seperti dapat dijual kembali atau sekedar diolah sendiri untuk konsumsi keluarga.

kebutuhan penghargaan (*Esteem Needs*) adalah suatu kebutuhan yang menyangkut pada sebuah apresiasi, dan prestise individu setelah melakukan kegiatan seperti rasa untuk dihargai, dipuji atau merasa dipercaya. Dalam hal ini pendamping desa Bulurejo selalu menempatkan diri dan menghargai setiap keputusan yang diambil oleh KRTP, pendamping juga membuat KRTP merasa dipercaya karena diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang memang KRTP inginkan. Oleh karena itu banyak bantuan usaha yang dijalankan RTS berhasil di Desa Bulurejo karena KRTP berani secara langsung menyampaikan keinginan usahanya. Pendamping percaya semakin KRTP percaya diri oleh usaha yang akan dijalankan maka dapat semakin berkembang bantuan usaha yang diberikan, sehingga dapat membantu dan meningkatkan kebutuhan dasar KRTP.

Terakhir kebutuhan aktualisasi diri (*Self Actualization*), yaitu suatu kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan ini sekaligus paling sulit dilakukan, misalnya mengakui pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan orang lain dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi. Pendamping desa selalu memberikan motivasi kepada KRTP untuk selalu optimis dan percaya diri dalam situasi yang baru, karena rata-rata kepala rumah tangga perempuan merasa minder dan tidak dapat bisa menyesuaikan diri atau minder dengan usaha yang dilakukan oleh KRTP.

b. Mendayagunakan berbagai sumber

Simamora (2003:7) Manajemen adalah sebuah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Setiap individu, kelompok atau organisasi pastinya mempunyai beraneka macam tujuan

yang ingin dicapainya. Tujuan-tujuan tersebut dapat diraih dengan cara mendayagunaan sumber-sumber daya yang ada disekitar. Intervensi yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas kemampuan KRTP untuk dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki. Dari sumber daya pekarangan yang RTS miliki, atau aset desa atau pekarangan desa yang dapat dijadikan usaha dengan harga subsidi sehingga KRTP tidak merasa terbebani.

Pendamping berusaha untuk mendayagunakan sumber-sumber yang ada, karena pendamping desa berasal dari kelompok PKK sehingga pendamping selalu mengusahakan KRTP untuk dapat ikut serta dalam pelatihan yang diadakan oleh PKK desa, KRTP juga sadar untuk dapat mendayagunakan sumber yang ada guna meningkatkan ketrampilan usaha KRTP serta menciptakan pemberdayaan kondisi KRTP yang keberkuasaan sehingga tidak termasuk kedalam kelompok yang kurang beruntung. Seperti menurut Drs. Jan Bella dalam Hasibuan (2001:70) yang mengatakan bahwa pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan ketrampilan kerja baik teknis ataupun manajerial.

c. Meningkatkan akses klien pada pelayanan dasar

Pemerintah indonesia telah mengembangkan pengentasan kemiskinan salah satunya yaitu akses pada pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, seperti halnya dengan kepala rumah tangga perempuan (KRTP) yang juga masuk kedalam hitungan penerima akses pelayanan dasar.

Pelayanan dasar ini bertujuan untuk meningkatkan akses 40% penduduk miskin dan kelompok marjinal lainnya agar mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas. Desa Bulurejo sendiri hampir semuanya sudah mempunyai kartu kesehatan

(KIS) atau Kartu Jombang Sehat (KJS) dan pendidikan (KIP) terutama kepala rumah tangga sasaran, pendamping selalu berupaya membantu rumah tangga sasaran (RTS) yang belum mendapatkan pelayanan agar dapat mengakses ke pelayanan dasar yang dibutuhkan dibantu dengan TKSK kecamatan (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

Mengacu pada Paket pelayanan dasar UU tentang Pemerintahan Daerah No 23/2014 yang mengatur urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pelayanan dasar yang dimaksud pendamping adalah layanan pendidikan dasar serta pendidikan menengah, dan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, perlindungan seperti pusat pelayanan rujukan terpadu, air, sanitasi, identitas hukum seperti identitas hukum dan administrasi kependudukan (akte kelahiran, KTP, surat cerai dan kartu keluarga).

Peningkatan kemampuan Kepala rumah tangga perempuan dalam pelayanan dasar sudah tercapai dengan adanya KRTP yang sudah dapat mengakses pada pelayanan-pelayanan dasar yang ada seperti KJS dan KIP.

d. Inisiatif pengambilan keputusan

Keputusan adalah sebuah tindakan proses pemecahan masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Pengambilan keputusan (*decision making*) menurut Desmita (2008:198) merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan. Inisiatif pengambilan keputusan sendiri sangat dibutuhkan dalam membentuk sebuah usaha yang lebih baik dan mandiri. KRTP dari awal sudah dipupuk inisiatif pengambilan keputusan dengan didampingi oleh pendamping desa (*mother care*), mendorong untuk mengambil inisiatif dan mencoba suatu

hal yang baru agar dapat memupuk pencapaian yang sukses pribadi KRTP.

Faktor yang mendorong serta mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Kotler (2003:98) antara lain faktor budaya, yang meliputi peran budaya dan kelas sosial, faktor sosial yang meliputi kelompok acuan, keluarga dari KRTP, peran dan status RTS, selanjutnya faktor pribadi atau diri sendiri yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, usaha yang dijalankan kepala rumah tangga perempuan (KRTP), keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri, selanjutnya karena faktor psikologis, yang meliputi motivasi baik dari diri sendiri, keluarga atau motivasi dari peran pendamping desa, persepsi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh kepala rumah tangga perempuan sehingga akhirnya dapat mengambil sebuah keputusan dengan keyakinan dan pendirian yang kuat.

Pendamping meyakini bahwa, apabila kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dapat mengambil keputusan secara mandiri nantinya akan berdampak positif bagi KRTP, karena usaha yang dijalankan sesuai dengan harapan yang diinginkan bukan karena orang lain sehingga kepala rumah tangga perempuan (KRTP) tidak merasa terbebani.

4.3.2 Penerapan Metode *Case Work* dalam Program Jalin Matra PFK

Menurut Haris (1991:2) dalam buku *social casework a problem solving proces* mengatakan bahwa bantuan sosial *casework* adalah cara membantu seorang individu dalam mengadakan adaptasi sosial, dan mengembalikan serta memperkuat kemampuan untuk menjalankan fungsinya, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan sebagai makhluk sosial. Seperti halnya dalam permasalahan

kemiskinan secara keseluruhan yang menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara khusus mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup dibawah garis kemiskinan yang semakin hari semakin tumbuh dan kemiskinan semakin parah, kondisi ini disebut dengan feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang berwajah perempuan yang memerlukan upaya khusus dalam penanganannya.

Pendamping menggunakan metode pendekatan bimbingan perorangan atau individu (*casework*) pada KRTP. Menurut Wibhawa dkk (2010:91) metode *social case work* adalah wawancara, memberi suatu informasi atau sebuah nasehat, diskusi, observasi, permainan peran, managemant konflik dan teknik-teknik lainnya yang dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.

Pendamping desa mendampingi dan membantu KRTP dalam program penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK). Sasarannya adalah KRTP yang memiliki masalah dari diri sendiri atau yang bersifat eksternal dari lingkungan sosial. Metode *casework* digunakan dalam menangani masalah dari individu yang sesuai dengan sasaran peneliti yaitu KRTP. Pendamping desa memberikan motivasi, edukasi serta membantu klien untuk tetap terus berusaha dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga kendala yang banyak terjadi pada KRTP adalah RTS bingung untuk menentukan bantuan usaha apa yang akan dijalankan. Sehingga pendamping dapat berperan menjadi seorang pendengar yang baik dan membantu KRTP untuk lepas dari masalahnya.

Penggunaan metode sosial individu (*Casework*) ada lima tahapan intervensi yang digunakan oleh pendamping menurut Siporin (1975), yang pertama intake dilakukan dalam tahap sosialisasi, pra rebug warga dan rebug warga.

Tahap sosialisasi dilakukan dalam tiga tahap yaitu sosialisasi kabupaten, sosialisasi kecamatan dan sosialisasi desa. Peran

pendamping dalam tahap ini sebagai fasilitator untuk memberikan sosialisasi yang bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman yang sejalan kepada semua stakeholder mengenai program PFK. Pendamping juga menjelaskan mengenai pedoman umum program Jalin Matra dengan sasarannya adalah kepala rumah tangga perempuan (KRTP), siapa saja yang terlibat dalam program PFK, seperti sekretariat kecamatan, sekretariat desa, PKK, dan pendamping desa.

Tahap pra rembug warga adalah momen pertemuan khusus yang dilakukan oleh pendamping kabupaten ke pemerintahan desa sebelum dilaksanakannya rembug warga, untuk pembentukan serta penetapan sekretariat desa dan pendamping desa. Sedangkan dalam tahap rembug warga pendamping kabupaten mendampingi pendamping desa dan sekretariat desa untuk melakukan forum pertemuan perwakilan warga atau KRTP dalam rangka sosialisasi program Jalin Matra PFK ditingkat desa dan didapatkannya daftar hasil verifikasi KRTP yang layak dan tidak layak untuk menerima bantuan dan penyusunan agenda selanjutnya.

Sejalan dengan yang diutarakan oleh Sukoco (2011:150) Tahapan intake adalah sebuah keterlibatan antar pekerja sosial dalam situasi untuk menciptakan komunikasi yang terbuka dengan mendefinisikan peranan masing-masing, pada tahap ini melakukan kontrak terkait persetujuan mengenai proses pada tahap intervensi selanjutnya.

Tahap intervensi ke dua adalah assesment yang dilakukan dalam tahapan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP, pendamping kabupaten dan pendamping desa bekerja sama untuk mengumpulkan dan menyiapkan berkas-berkas untuk melakukan klarifikasi kelayakan KRTP serta identifikasi usulan kebutuhan KRTP yang secara langsung pendamping datang kerumah-rumah RTS.

Klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP dilakukan oleh pendamping dengan cara berdialog atau komunikasi secara langsung dengan RTS untuk mendalami jenis usulan kebutuhan yang berpotensi untuk dapat dikembangkan dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi RTS, seperti dalam Siporin (1975) mengatakan tahap asessment adalah pengungkapan atau pemahaman masalah yang melibatkan klien secara langsung, dan mempertimbangkan potensi atau kekuatan klien.

Tahap intervensi ketiga adalah Planning yang dilakukan dalam tahap pengajuan pencairan dana BKK, dan rebug pokmas persiapan realisasi bantuan. Dalam Siporin (1975) planning adalah proses yang melakukan tindakan agar mencapai tujuan yang spesifik pada masa yang akan datang.

Tahap pengajuan pencairan dana BKK pemerintah desa dan sekretariat desa difasilitasi oleh pendamping desa dan pendamping kabupaten untuk menyusun dokumen pencairan BKK, yang meliputi rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan kegiatan kedepan selama program berlangsung, surat keputusan kepala desa mengenai sekretariat desa dan pendamping desa, surat keputusan desa mengenai penerimaan bantuan JM PFK, surat pertanggung jawaban mutlak integritas kepala desa dan ketua sekretariat yang bermaterai Rp 6000.

Melampirkan kwitansi (SK pengangkatan kepala desa yang dilegalisir, pengangkatan bendahara desa yang dilegalisir, KTP kepala desa dan bendahara, rekening bank Jombang dan surat pernyataan kepala desa tentang rekening resmi kas desa yang masih aktif dan bermaterai RP 6000, NPWP pemerintah desa, dan foto copy APBDesa) dokumen-dokumen tersebut semua di foto copy. Selanjutnya baru sekretariat desa yang difasilitasi oleh pendamping desa menyetorkan dokumen pengajuan pencairan pada Gubernur Jatim yang diketahui oleh Dinas PMD Kabupaten. Setelah pihak desa

membuat surat permohonan pengajuan pencairan dana pada gubernur yang diketahui oleh dinas PMD kabupaten, selanjutnya dokumen yang diajukan tersebut dilakukan verifikasi awal oleh pendamping kabupaten.

Dokumen pencairan selanjutnya dikirim ke sekretariat kabupaten dengan difasilitasi oleh pendamping kabupaten, hingga pencairan dinyatakan sudah benar dan lengkap akan segera dibuatkan surat pengantar pengajuan pencairan dana BKK kepada gubernur yang ditanda tangani oleh kepala dinas PMD Kabupaten Jombang dengan melampirkan form verifikasi dokumen pencairan.

Intervensi tahap planning selanjutnya adalah rebug pokmas persiapan realisasi bantuan, ini adalah forum pertemuan KRTP atau anak rumah tangga (ART) yang akan membantu mengelola usaha RTS. Tahap ini pendamping desa dan pendamping kabupaten memfasilitasi pelaksanaan rebug pokmas persiapan realisasi bantuan, dengan tujuan untuk melakukan pendalaman review pada jenis usulan kebutuhan KRTP, mengkoordinasikan perkembangan kondisi RTS serta kebutuhan apabila ada perubahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan menyepakati rencana lebih lanjut.

Pendamping desa menyiapkan semua kebutuhan dalam tahap ini dari daftar hadir KRTP, daftar nama KRTP beserta rincian usulan kebutuhan, form review usulan kebutuhan belanja KRTP dan dokumentasi. Pendamping juga berperan untuk menjelaskan mengenai adanya rebug pokmas dan mengkoordinasikan perkembangan dari kondisi KRTP serta menyepakati rencana lebih lanjut untuk dapat dukungan pengelolaan dan pelestarian program kedepannya.

Tahapan ke empat adalah tahap intervensi yang dilakukan dalam tahap penyerahan bantuan dan bimbingan teknis. maksud dari intervensi itu sendiri dalam Siporin (1975) pendamping dengan klien menjalankan apa yang memang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak, intervensi dilakukan berdasarkan atas asassment yang

telah diperoleh. Sesuai dengan yang diucapkan oleh Max Siporin pendamping dalam tahap penyerahan bantuan ini dilaksanakan setelah diadakannya serah terima hasil pengadaan barang dari TPK kepada pemerintah desa yang dilaksanakan dalam forum pertemuan pokmas yang dihadiri langsung oleh KRTP bersama dengan ART pengelola usaha.

Pendamping desa dan pendamping kabupaten memfasilitasi pemerintah desa yang dibantu oleh sekretariat desa untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada dinas PMD kabupaten jombang serta menyiapkan berkas serah terima kepada KRTP. Pendamping desa difasilitasi oleh pendamping kabupaten untuk melakukan pengecekan kembali pada kesesuaian barang, setelah sudah sesuai baru bantuan usaha diberikan kepada KRTP dengan pendamping desa memberikan informasi mengenai bantuan yang diberikan kepada RTS, pendamping memberikan arahan, motivasi dan bimbingan usaha yang nantinya akan dilaksanakan oleh KRTP.

Tahapan bimbingan teknis (bimtek) dijalankan selama pelaksanaan program berlangsung atau setelah program selesai. Tahap ini dilaksanakan bekerja sama dengan PKK desa atau stakeholder yang dibantu oleh pendamping untuk melakukan penyuluhan baik berupa peningkatan SDM, manajemen keuangan atau penyelesaian masalah yang dihadapi RTS. Pendamping berperan sebagai fasilitator dan pendidik karena pendamping juga memberikan bimbingan serta fasilitasi kepelatihan kepada KRTP untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan usahanya dengan pelatihan yang diberikan. Pendamping memanfaatkan sumber-sumber yang ada misalnya ketika PKK desa atau stakeholder melakukan pelatihan, RTS diajak bahkan ada yang dengan keinginannya sendiri untuk mengikuti kepelatihan tersebut. Kepelatihannya berupa membuat olahan makanan yang berbahan dasar dari ikan lele untuk dijadikan nuget lele, abon lele, dan olahan makanan yang lain yang berbahan dasar lele. Bimbingan teknis

lainnya adalah pendamping melakukan pelatihan manajemen keuangan, KRTP diberikan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan agar usaha yang dijalankan oleh RTS dapat memajemen keuangannya dengan baik.

Tahapan intervensi yang ke lima adalah evaluasi dan terminasi yang dilakukan dalam tahap pengelola usaha, monitoring & evaluasi dan pelestarian dan keberlanjutan program. Tahap pengelola usaha produktif di Desa Bulurejo dikelola baik secara mandiri oleh KRTP dengan diutamakan mempunyai anak rumah tangga (ART) dalam satu keluarga. Peran pendamping berusaha menghubungkan KRTP pada lembaga keuangan, yang bertujuan untuk perkuat usaha KRTP yang berkembang, dan akan difasilitasi untuk mendapatkan fasilitas permodalan atau pembiayaan usaha dari lembaga keuangan mikro desa atau lembaga keuangan yang sudah bekerja sama. Tahap ini pendamping desa dan sekretariat desa bertugas untuk mengawasi serta memantau perkembangan usaha produktif dari KRTP.

Tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi (Monev) adalah sebuah tindakan secara berjenjang yang dilakukan oleh pendamping desa, sekretariat desa, sekretariat kabupaten, pendamping kabupaten, pendamping provinsi dan sekretariat provinsi atau tim independen yang ditunjuk langsung oleh Gubernur untuk memantau perkembangan dari pelaksanaan program PFK, melakukan penilaian, mendokumentasikan semua kegiatan dari awal hingga berakhirnya program, serta membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya, sehingga perlu menyusun tindakan untuk perbaikan selanjutnya. Pendamping juga melakukan pendataan kepada RTS mengenai kesesuaian bantuan yang diberikan, apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan keinginan KRTP, apakah RTS sudah merasa puas, apakah RTS terbantu dengan adanya bantuan ini untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya, dan apakah pendapatannya naik dengan adanya bantuan usaha yang diberikan.

Tahap terakhir adalah pelestarian dan keberlanjutan program, tahap ini dikoordinasikan oleh sekretariat desa dalam bentuk pelatihan, perkuat modal dan pendampingan kepada KRTP secara langsung. Keberlanjutan (*Sustainability*) program PFK dilaksanakan pendamping melalui fasilitasi dalam pengembangan usaha produktif RTS, memfasilitasi serta menghubungkan penguatan modal sosial RTS melalui penguatan yang ditumbuhkan atas dasar kesadaran partisipatoris dan pengembangan pada jejaring usaha, sekretariat desa dan pendamping berusaha untuk menghubungkan dan melakukan kerja sama dengan lembaga atau bank UMKM dari bank Jatim dan bank BNI untuk membantu tambahan modal dengan tujuan memperkuat modal KRTP. Bahkan ada KRTP yang bermitra dengan pendamping desa untuk dapat meningkatkan pendapatannya, yang bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan dasar KRTP.

Maksud dari adanya proses *casework* adalah untuk melibatkan dan mengikutsertakan KRTP dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara langsung oleh KRTP dengan menggunakan cara-cara yang ada sehingga KRTP dapat berfungsi kembali dalam masyarakat. Pendamping menjalin hubungan dengan KRTP, memberikan perhatian pada KRTP, dan pendamping juga menumbuhkan hubungan yang baik antar RTS agar KRTP dapat merasakan bahwa KRTP dapat diterima, menghargai KRTP dari setiap pengambilan usulan dan keputusan yang KRTP buat dalam pemilihan bantuan usaha produktif.

Pendamping juga memberikan sikap dan respon yang baik untuk membantu menolong KRTP mengurangi masalah yang sedang dihadapi, sehingga mungkin dapat mengurangi ketakutan atau kecemasan dari KRTP. Seperti yang dikatakan Haris (1991:9) sifat untuk mau menerima (*receptiveness*) dan tanggapan (*responsiveness*) yang yakin, dengan digabungkan dengan sifat-sifat objektif dan tujuan

penyembuhan (*therapeutic intent*). Pendamping juga mengakui KRTP sebagai dirinya sendiri, setiap individu berbeda dengan orang lain, akan tetapi pendamping tidak membedakan satu dengan yang lain dan menerima KRTP dengan pengertian. Pendamping selalu berusaha memberikan motivasi pada KRTP untuk dapat secara terbuka menerima hal-hal yang unik dan berbeda dari seseorang dan dirinya sendiri, dan juga memberikan pengetahuan atau edukasi mengenai tindakan yang akan dilakukan.

Selanjutnya pendamping desa membantu KRTP untuk lebih terbuka menceritakan masalah yang sedang dihadapi, kesulitan apa yang membuat KRTP merasa terbebani, pendamping berusaha membuat KRTP mau untuk menceritakan masalahnya dan apa yang KRTP inginkan. Heris (1991:70) mengatakan asal kata kerja “bercerita” (*the infinitive to tell*) mempunyai banyak arti, salah satunya menyatakan sesuatu melalui kata-kata untuk berkomunikasi dan membedakan sesuatu. Kedua, arti dari *infinitive* muncul apabila kita bicarakan tentang bantuan *case worker* pada klien mampu mengambil bagian dari persoalan dimana dia sedang mencari bantuan dan mengerti permasalahannya dengan lebih jelas sehingga usahanya untuk mengatasi masalah menjadi layak dan efektif.

Pendamping tidak hanya berperan sebagai pendengar yang baik tapi juga memberikan peran yang aktif membantu KRTP untuk dapat menceritakan masalahnya dengan terarah agar masalah dapat terpecahkan.

Jadi kesimpulannya dalam metode sosial individu atau *casework*, adalah untuk membantu kepala rumah tangga perempuan dalam beradaptasi sosial, dan mengembalikan serta memperkuat kemampuan untuk menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial. Dari awal pendamping dapat membangun hubungan yang baik dengan KRTP, membangun rasa kepercayaan serta membuat KRTP merasa dihargai sehingga KRTP dapat merasa nyaman untuk bercerita

mengenai masalah dikehidupan mereka, mengenai keinginan bantuan usaha apa dan kemudian berkemauan untuk dibantu.

Oleh karena itu dalam metode *casework* ini pendamping mempunyai beberapa peran, dari peran sebagai fasilitator, pendidik, broker dan peran-peran teknis. Pertama pendamping berperan sebagai fasilitator, tenaga pendamping desa dan pendamping kabupaten mempunyai peran untuk mendorong dan mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Pendamping dalam mendampingi KRTP menggunakan berbagai teknik dalam memfasilitasi KRTP untuk proses bertindak sebagai pendorong dan membantu selama proses pendampingan program JM PFK. Peranan yang dilakukan oleh pendamping kabupaten dari awal pelaksanaan program yaitu sosialisasi pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai ditingkat desa, pra rebug warga, rebug warga, klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP, pengajuan pencairan dana bantuan keuangan khusus, rebug pokmas persiapan realisasi bantuan, penyerahan bantuan barang kepada KRTP, bimbingan teknis, pengelola usaha, monitoring dan evaluasi, serta pelestarian dan keberlanjutan program.

Intinya pendamping selalu membantu mendampingi KRTP dan memfasilitasi dari awal terlaksananya program hingga program selesai agar KRTP dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Soebiato (2015:140) peran sebagai fasilitator berfungsi untuk memberikan inovasi dan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat, tetapi ia harus mampu untuk menjadi pen jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang diwakili dengan masyarakatnya, baik menyampaikan inovasi atau kebijakan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, ataupun untuk menyampaikan tanggapan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga pemberdayaan yang bersangkutan.

Pendamping sebagai fasilitator, selain itu memiliki peran lain yaitu mampu untuk memberikan motivasi dan semangat berusaha kepada KRTP. Hal tersebut senada dengan yang dijelaskan oleh Ife dan Tesoriero (2008:559) peran praktik yang dikelompokkan sebagai peran memfasilitasi adalah yang berkaitan dengan stimulan dan penunjang pada pengembangan masyarakat seperti memberikan dorongan dan semangat sosial. Semangat sosial menggambarkan sebuah faktor penting dari pendamping masyarakat yaitu mampu memberikan inspirasi, mengaktivasi, memberikan stimulus, menggerakkan dan memberikan motivasi kepada orang lain atau KRTP agar dapat melakukan sebuah tindakan.

Pendamping mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan atau kedudukan KRTP agar dapat lebih berdaya, maka dari itu disinilah peran pendamping sebagai pendidik atau penguat bagi KRTP. Menurut Suharto (2014:96) pendidik atau pelatihan untuk memperkuat kemampuan dan ketrampilan masyarakat. Pendamping berperan aktif dalam memberikan masukan yang positif dan direktif berdasarkan dengan pengetahuan dan pengalaman bertukar pemikiran dan gagasan dengan KRTP.

Peran pendamping dalam mengupayakan pelatihan pada KRTP dengan menjembatani pada lembaga-lembaga terkait dalam memberikan pemahaman pada pengelolaan usaha produktif. Senada dengan yang diungkap oleh Ife dan Tesoriero (2008:590), yang menjelaskan bahwa pelatihan merupakan suatu peran edukatif yang paling jelas. Karena melibatkan bagaimana mengajar KRTP untuk mau melakukan sesuatu.

Pendamping desa selalu memberikan penguatan kepada KRTP dengan mengajak untuk mengikuti sejumlah pelatihan dan sharing mengenai olahan beberapa makanan dan minuman, dan pelatihan manajemen, sehingga KRTP nantinya mampu untuk mengolah olahan bahan tersebut dan KRTP menjadi lebih produktif lagi, tak lepas dari

adanya peran pendamping yang mampu memberikan informasi yang mudah dipahami oleh KRTP. Seperti pernyataan Adi (1994:216) bahwa dalam menjalankan peran sebagai pendidik, pendamping diharapkan mempunyai kemampuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan baik dan jelas, serta mudah dimengerti oleh KRTP.

Pendamping juga harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibahas atau dibicarakan. Kaitannya dengan ini, seorang pendamping desa tidak jarang harus menghubungi atau konfirmasi pada rekan pendamping desa atau ke pendamping kabupaten yang lainnya untuk menambah informasi dan pengetahuannya.

Pendamping harus bisa menjadi penghubung (broker) KRTP dengan pemerintah ataupun lembaga. Hal tersebut tidak lepas dari pendamping yang tidak selamanya bisa mendampingi KRTP. Oleh karena itu pendamping harus mempunyai jaringan dan menjadi penghubung antara KRTP dan pemerintah desa pada lembaga atau masyarakat. Peran seorang broker (*perantara*) menurut Adi (1994:216) terkait dengan upaya menghubungkan individu dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat (*community services*), akan tetapi tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat.

Jadi pendamping harus mempunyai sumber dan jaringan untuk bisa memberdayakan KRTP. Seperti halnya mengakses pada pelayanan dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lain sebagainya, bagi KRTP yang belum mendapatkan pelayanan tersebut, pendamping membantu KRTP agar dapat mengakses pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan pengajuan KIS/KJS atau BPJS dan lainnya.

Pendamping juga harus dapat menjadi peran-peran teknis selain membantu KRTP lebih berdaya, pendamping juga harus

mampu untuk melaksanakan tugas lainnya dengan baik dengan ketrampilan yang dimiliki pendamping untuk dapat dekat dengan KRTP. Pendamping dituntut dapat melakukan tugasnya dengan keahlian yang dimiliki oleh pendamping, seperti untuk mengetahui apa yang sedang diinginkan atau dikeluhkan oleh KRTP. Seperti cara pendamping berkomunikasi secara langsung dengan KRTP, bernegosiasi mengenai bantuan barang apa yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh KRTP, atau KRTP hanya sekedar konsultasi mengenai permasalahannya apa dan penyelesaiannya bagaimana.

Seperti yang diucapkan oleh Ife (1995) peran-peran teknis mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “Manajer Perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai ketrampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

4.3.3 Kesimpulan sementara

Berdasarkan pada pembahasan mengenai metode pendampingan kepada kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui program penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK) di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, maka dapat disimpulkan sementara sebagai berikut :

- a. Pendamping dalam praktiknya menggunakan metode yaitu *case work*. Metode *casework* digunakan untuk membantu rumah tangga sasaran dalam model bimbingan individu untuk membantu menangani masalah dan mengkaitkan pada berbagai sumber yang diperlukan. Dalam metode *casework* didalamnya

ada sebuah beberapa tahapan yang harus dilakukan agar dapat tercapainya suatu keberhasilan dari yang diinginkan yaitu kepala rumah tangga perempuan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pendamping dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan dan demi kelancaran program. Berikut adalah tahapan-tahapan intervensi dalam metode *casework* program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) antara lain : Tahap Intake, Asassment, Planning, Intervensi, Evaluasi & Terminasi.

- 1.) Metode Intake dilakukan dalam kegiatan sosialisasi, pra rebug warga dan rebug warga untuk mencapai pemenuhan dukungan.
- 2.) Tahap Asassment yang dilakukan dalam tahap klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan untuk dapat mendayagunakan berbagai sumber.
- 3.) Tahap Planning yang dilakukan dalam tahap kegiatan pencairan dana BKK dan rebug pokmas persiapan realisasi bantuan digunakan untuk mendayagunakan sumber.
- 4.) Tahap Intervensi dilakukan dalam tahap penyerahan bantuan barang kepada KRTP dan bimbingan teknis untuk mendukung inisiatif pengambilan keputusan.
- 5.) Tahap terakhir adalah Evaluasi dan Terminasi yang dilakukan dalam tahap kegiatan pengelola usaha, monitoring dan evaluasi serta pelestarian dan keberlanjutan program dalam rangka akses pada pelayanan dasar.

Dari penelitian yang peneliti peroleh pendamping dapat menangani masalah yang didapat oleh RTS, Dengan menggunakan ketrampilan yang pendamping miliki seperti, pendamping menghormati KRTP dan menerima keberadaan KRTP apapun kondisi yang dihadapi oleh KRTP, pendamping dengan KRTP saling memberi dan menerima informasi, pendamping juga bersikap individualisasi

yang artinya pendamping memahami, menerima bahwa KRTP sebagai seorang individu yang unik dan berbeda dari individu satu dengan yang lainnya.

Pendamping juga ikut secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi RTS, dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh RTS, pendamping juga membantu untuk memfasilitasi pelaksanaan program dari awal berjalannya program hingga selesai, selain itu pendamping juga berperan sebagai pendidik, penghubung dan peran-peran teknis dalam mendampingi KRTP, selebihnya pendamping berupaya mencari relasi bantuan untuk menghubungkan pada penambahan modal usaha serta berupaya memotivasi KRTP untuk dapat selalu berusaha dalam menjalankann usahanya agar dapat lebih berkembang lagi dan terpenuhinya kebutuhan dasar KRTP.

4.4 Triangulasi

Triangulasi adalah sebuah proses untuk pembuktian dari keabsahan data dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian kualitatif, metode ini sangat penting dilakukan sebagai cara mengukur dari kebenaran data yang ditemukan dan didapatkan di lapangan. Proses triangulasi dilakukan dengan cara menyamakan kembali antara hasil kesimpulan sementara dengan data-data informan. Teknik triangulasi yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan triangulasi sumber. Teknik triangulasi dengan sumber berupaya membandingkan dan mengkonfirmasi kembali dari informan satu dengan informan yang lainnya.

a. Triangulasi Metode Pendampingan *Casework* dan Indikator Keberhasilan

Penelitian mengenai metode pendampingan kepada kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui program penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK) di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, menggunakan metode Sosial *Case Work* dengan

beberapa tahapan intervensinya, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari informan SQ yang menyatakan :

“Pendampingan menggunakan salah satu metode individu, gunanya itu untuk mempermudah proses pendampingan saja, misalnya pada tahap klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP pendamping menggunakan metode individu artinya pendamping dan KRTP saja, kita datang kerumah-rumah KRTP, biasanya itu kita memberikan masukan, pengetahuan atau gambaran secara langsung agar KRTP itu merasa jelas.” (SQ: 24 Maret 2019)

Informan SQ tersebut merupakan pendamping desa yang pernyataannya diperkuat oleh informan MA yang juga pendamping desa menyatakan sebagai berikut :

“Pendamping melakukan metode individu yang gunanya itu untuk membantu KRTP untuk beradaptasi sosial, dan mengembalikan fungsinya sebagai makhluk sosial dengan cara berbicara secara langsung kepada KRTP.” (MA: 24 Maret 2019)

Pernyataan dari kedua informan tersebut menunjukkan kesamaan, dan semakin didukung oleh informan SI selaku rumah tangga sasaran (RTS) yang menyatakan sebagai berikut :

“Kita didatangi sama pendamping desa, kita ditanya soal bantuan yang nantinya akan diberikan itu kita minta apa, kalau saya kan sudah jualan dari dulu jadi saya minta penambahan modal aja buat ngisi warung. Tapi ada juga KRTP lain yang belum punya usaha karena memang tiap harinya kerjanya di sawah, ada yang bingung juga mau diberikan bantuan apa sampai ada yang pasrah mau dikasih apa aja boleh. Tapi setahu saya bu SQ selalu bantu KRTP untuk pemecahan masalah yang masih bingung soal usaha apa yang sesuai sama KRTP.” (SI: 24 Maret 2019)

Pernyataan dari kedua informan diatas menunjukkan kesamaan dan semakin didukung oleh informan RH yang juga selaku penerima program atau KRTP yang menyatakan sebagai berikut :

“Waktu pendaftaran jenis usulan usaha, pendamping datang kerumah saya menanyakan, saya ingin bantuannya dirupakan menjadi apa, dengan beberapa pertimbangan dibantu oleh pendamping dan karena

saya ada sedikit halaman di depan rumah jadi saya ingin membuka warung makan saja”. (RH : 24 Maret 2019)

1) Intake dalam tahapan sosialisasi, pra rebug warga dan rebug warga

Ada beberapa tahapan intervensi dalam metode *casework* yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program JM PFK. Tahapan yang pertama adalah tahap sosialisasi (*intake*), hal tersebut diungkapkan oleh informan LY yang menyatakan :

“Ada sosialisasi kabupaten dulu, baru setelah itu ke tingkat kecamatan, kalau dalam satu kecamatan ada dua desa baru kita ke desa-desanya untuk sosialisasi, memberi tau kalau didesa sudah mendapatkan bantuan PFK pasti tidak hanya pengajuan, kita kasih keterangan apa itu PFK karena kadang masih kurang respek mau dapat bantuan kadang responnya itu “oalah bantuan opo maneh iki mbak, kakean ruwet-ruwet” itu biasanya di desa, kalau kecamatan selalu welcome. Disitu kita terangkan kita sosialisasikan dan jelaskan kegiatannya seperti apa, ini nanti siapa yang mengerjakan di desa, itu kita jelaskan jadi perannya desa itu apa kepala desa itu untuk apa”. (LY: 22 Februari 2019)

Informan LY tersebut adalah selaku pendamping kabupaten dari program JM PFK, yang pernyataannya diperkuat oleh informan EP yang menyebutkan :

“Salah satu peran DPMD adalah sebagai fasilitator tingkat kabupaten yang pertama memberikan sosialisasi tentang program PFK, tujuan sosialisasi memberi pemahaman yang sama kepada semua stakeholder pelaksana kegiatan dari pengambilan kebijakan pada tingkat kabupaten kemudian camat sampai pemerintah desa, tema sama tujuannya bersama langkah bersama biar nanti lancar kegiatannya”. (EP: 13 Maret 2019)

Tahapan selanjutnya adalah tahap Pra rebug warga dan rebug. Pra rebug warga yaitu sebuah pertemuan khusus yang dilakukan sebelum rebug warga yang berguna untuk pembentukan dan penetapan sekretariat

desa dan pendamping desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan EP selaku kabid DPMD kabupaten, sebagai berikut :

“Pra rembug menjalankan pada tingkat desa mulai dari pembentukan sekretariat desa, kemudian membentuk atau menunjuk PD, fasilitatornya itu dari DPMD dan pendamping kabupaten” (EP : 13 Maret 2019)

Pernyataan dari informan tersebut didukung oleh pernyataan dari informan LY selaku pendamping kabupaten yang turun langsung dalam pendampingan program JM PFK, sebagai berikut :

“Setelah perkenalan kita melakukan tahapan pra rembug warga. Kita menentukan siapa sekretariat desa dan siapa pendamping desa dan kita juga menyampaikan pagu, jumlah KRTP apabila kurang dari dua puluh, pendamping desanya cukup satu kalau lebih dari dua puluh pendamping desanya dua. Desa Bulurejo ada sebanyak 22 KRTP jadi pendamping desanya dua. Kita juga menyampaikan bahwa di desa mendapatkan BOP sesuai aturan pedum juga. Kita juga menyampaikan bahwa bantuan yang kita berikan ini berupa barang yang nominalnya sebesar dua setengah juta rupiah”. (LY: 22 Februari 2019)

Tahap selanjutnya adalah rembug warga yaitu sebuah forum pertemuan dari perwakilan warga dalam rangka untuk sosialisasi program ditingkat desa dan mengenalkan kepada warga mengenai program JM PFK serta melakukan verifikasi data penerima bantuan apakah sudah sesuai atau belum. Disampaikan oleh informan SQ yang menjelaskan :

“Rembug warga dilaksanakan sebagai media untuk sosialisasi PFK ditingkat desa, rembug warga menjelaskan kepada stakeholder mengenai program PFK itu seperti apa, mensosialisasikan sekretariat desa dan pendamping desa, sekaligus memastikan bahwa bantuan keuangan khusus (BKK) sudah dianggarkan dalam APBDesa. Rembug warga ini diikuti dari unsur, sekretariat desa, BPD, kasun lokasi KRTP, perwakilan KRTP, tokoh masyarakat dan pendamping desa serta dapat mengundang perwakilan RT/RW juga dari lokasi KRTP” (SQ: 24 Maret 2019)

Pernyataan dari informan SQ diatas diperjelas oleh informan LY yang menyatakan sebagai berikut :

“Pendamping kabupaten dan pendamping desa memimpin rembug warga dalam pelaksanaan verifikasi. pendamping kabupaten dan pendamping desa juga menyampaikan data *by name by address* untuk calon penerima bantuan. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai status kelayakan calon penerima program (KRTP) berdasarkan kriteria program, kriteria KRTP yang layak menjadi sasaran itu, telah bercerai, suami meninggal dunia, ditinggal suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin atau ditelantarkan, memiliki suami difabel dan atau suami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas secara produktif dan terakhir KRTP sebatang kara usia produktif yang mampu mengelola usaha dan belum menerima bantuan Jalin Matra yang lainnya yaitu BRTSM dan PK2”. (LY: 22 Februari 2019)

Pernyataan yang diungkapkan informan LY mengenai pelaksanaan verifikasi *by name by address*, serta mengidentifikasi kriteria KRTP yang layak mendapatkan bantuan program. Selain itu pendamping dalam proses pendampingan ini berperan sebagai fasilitator, seperti yang diungkapkan oleh informan LY, sebagai berikut :

“Dapat dikatakan berperan sebagai fasilitator juga, karena kita memfasilitasi bagaimana kita pendamping kabupaten membantu menjembatani agar dapat mempermudah setiap pelaksanaannya dilapangan”. (LY : 22 Februari 2019)

Pernyataan dari informan LY tersebut mengatakan bahwa pendamping mempunyai peran sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan menjembatani setiap proses pelaksanaan program PFK agar lebih mudah, pendamping selain memfasilitasi juga memberikan motivasi kepada KRTP, seperti pernyataan yang diutarakan oleh informan Sq yang mengungkapkan sebagai berikut :

“Selain membantu dan memfasilitasi KRTP dalam pelaksanaan kegiatan, kita juga memberikan motivasi kepada

KRTP yang merasa tertekan atau merasa minder ya, jadi kita memberikan motivasi bahwa banyak diluar sana yang hidupnya jauh dibawah kita, harus sering-sering bersyukur ya, alhamdulillah sekarang ibu dapat bantuan ini bisa buka usaha juga kan alhamdulillah gitu. Jadi membuka pemikiran, memberikan masukan yang positif kemereka.”. (SQ : 24 Maret 2019)

2) Asessment dalam kegiatan klarifikasi & identifikasi usulan kebutuhan

Diiinformasikan oleh informan LY selaku pendamping kabupaten yang turut serta ikut dalam identifikasi dan verifikasi KRTP, sebagai berikut :

“Pendamping desa dengan pendamping kabupaten melakukan koordinasi untuk menyiapkan daftar nama calon para KRTP sasaran yang sudah berdasarkan hasil verifikasi, selanjutnya menyiapkan form instrumen klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP, setelah itu membagi lokasi tugas klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP. Pendamping terjun ke KRTP setelah rembug warga nanti pendamping desa turun dari rumah kerumah seperti biasa membawa dua blanko, satunya identifikasi satunya klarifikasi kebutuhan. Kita melihat sejauh mana kebutuhannya KRTP apa saja. Jadi klarifikasi dan identifikasi itu membutuhkan waktu cukup lama, kadang itu gak cukup datang satu kali bahkan bisa dua kali tiga kali biar tepat sasaran gitu, jadi pendamping desa tidak hanya menyampaikan program tapi juga memberi motivasi membuka wawasan”. (LY: 22 Februari 2019)

Pernyataan informan LY tersebut menjelaskan bahwa pendamping desa dan pendamping kabupaten berkoordinasi untuk menyiapkan daftar nama calon KRTP yang sudah di verifikasi. Setelah itu melakukan klarifikasi dan identifikasi ke setiap rumah-rumah KRTP yang dibagi menjadi dua blanko yaitu identifikasi dan klarifikasi bantuan. Diperjelas oleh informan MA yang menjelaskan:

“PD menyiapkan perangkat observasi lapangan seperti peralatan tulis, instrumen klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan form instrumen yang sudah ada. Pendamping desa melakukan kunjungan langsung ke rumah tangga sasaran untuk melakukan klarifikasi kelayakan KRTP dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan

form instrumen. PD difasilitasi oleh pendamping kabupaten untuk melakukan input data hasil klarifikasi dan identifikasi pada usulan kebutuhan, jadi nantinya setiap KRTP akan ditanyakan kira-kira nanti akan membuka usaha apa, dalam pendataan ini juga ada dokumentasi yang nantinya akan dikirim ke pemerintah Provinsi. Tapi biasanya ada saja RTS yang tidak bisa untuk membuka usaha jadi solusi dari pemerintah desa atau PD ditanyakan terlebih dahulu bisanya apa, kalau RTS bisanya bertenak ayam atau kambing jadi dana bantuannya dirupakan ternak tersebut jadi memang tergantung dengan keahlian yang dipunya oleh RTS.” (MA: 24 Maret 2019)

Pendamping juga berperan sebagai peran-peran teknis yang maksudnya mempunyai ketrampilan yang bersifat praktis. Pernyataan mengenai peran pendamping sebagai peran-peran teknis oleh informan LY sebagai berikut :

“Pendamping yang lebih mengacu kepada ketrampilan, ketrampilan bagaimana dapat melakukan tugasnya dengan berbagai cara dan ketrampilan yang pendamping punya untuk bisa mengetahui yang sedang diinginkan atau dikeluhkan oleh KRTP. Seperti cara pendamping berkomunikasi dengan KRTP, bernegosiasi atau sekedar konsultasi mengenai permasalahannya apa dan keinginannya gimana seperti itu”. (LY : 22 Maret 2019)

Pernyataan informan LY diatas hampir sama dengan yang diungkapkan oleh informan SQ yang menyatakan sebagai berikut :

“Pendamping memang dituntut untuk bernegosiasi, membangun relasi pada KRTP karena itu salah satu pendekatannya kita ke KRTP agar kita itu tau masalah yang sedang dihadapi apa gitu”. (SQ : 24 Maret 2019)

Selain pernyataan dari informan LY dan SQ tersebut, informan MA juga mengungkapkan pernyataan yang sama. Pernyataan dari informan MA semakin menguatkan pernyataan dari informan sebelumnya, yang mengungkapkan :

“Ada KRTP yang memang punya keinginan mau usaha apa, kita membantu memberikan konsultasi seperti kemarin ada

yang ingin membeli kulkas, kita tanyakan kembali mengenai listrik dirumah cukup apa tidak kan bantuan ini sekali lagi untuk meringankan bukan memberatkan. Terus ada yang ingin bantuannya dirupakan berupa sepeda motor kita juga menanyakan dan memberi konsultasi pada KRTP, memberikan pertimbangan kalau misalkan bantuannya diganti sepeda angin dan sisanya bisa buat modal usahanya gimana kan lebih enak karena tidak perlu ada biaya perawatan yang intens seperti sepeda motor, tapi tetap keputusan ada di KRTP kita hanya memberi pertimbangan. Tapi alhamdulillah karena KRTPnya juga enak dapat diajak untuk diskusi dan mempertimbangkan ini dan itu, akhirnya tidak jadi membeli motor karena kalau dipikir kedepan belum bayar pajaknya, bensin dan perawatannya itu pasti juga memberatkan”. (MA : 24 Maret 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut, pendamping dituntut agar lebih kreatif dan terampil untuk bisa melakukan tugasnya sebagai seorang pendamping. Pendamping dituntut untuk pandai berkomunikasi serta membangun relasi pada RTS agar pendamping dapat lebih dekat dengan KRTP dan RTS merasa nyaman dengan pendamping.

- 3) Planning dilakukan pada tahap Pengajuan Pencairan Dana BKK dan Rembug Pokmas Persiapan Realisasi Bantuan.

Setelah melakukan tahap klarifikasi & identifikasi usulan kebutuhan, pada awal berjalannya program pemerintah desa, sekretariat desa yang difasilitasi oleh pendamping kabupaten untuk menyusun kelengkapan pencairan dana bantuan keuangan khusus (BKK) dan pengajuan dokumen pencairan BKK desa, pada tahap pengajuan pencairan dana BKK tersebut diungkapkan oleh informan MA sebagai berikut :

“Sekretariat kabupaten dengan kita pendamping kabupaten melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas pencairan dana dan apabila sudah dinyatakan lengkap dan semua benar, segera membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana pada Gubernur yang ditandatangani sama kepala DPMD Kabupaten”. (LY : 22 Februari 2019)

Dari pernyataan informan LY tersebut didukung oleh pernyataan informan SQ selaku pendamping desa. Informan SQ mengatakan :

“Pengajuan pencairan BKK ditingkat desa, pemerintah desa mengajukan surat permohonan pencairan pada Gubernur Jatim yang diketahui oleh kepala DPMD. Kita menyiapkan rencana anggaran dan biaya, jadwal kegiatannya, keputusan kepala desa tentang sekretariat desa dan pendamping desa, keputusan kepala desa tentang penerimaan bantuan JM PFK, surat tanggung jawab mutlak integritas kades dan ketua sekretariat yang bermaterai 6000, terus juga menyiapkan kwitansi, fotocopy SK pengangkatan kepala desa yang dilegalisir, fotocopy pengangkatan bendahara desa itu juga dilegalisir, fotocopy KTP kepala desa dan bendahara, fotocopy rekening kas desa di bank Jatim sama bank Jombang terus surat pernyataan dari kepala desa tentang rekening resmi kas desa, rekeningnya yang masih aktif dan bermaterai, terus fotocopy NPWP pemerintah desa sama fotocopy APBDesa. Jadi itu semua pendamping desa di bantu dengan sekretariat desa dan pendamping kabupaten mangkanya kita juga bolak balik ke DPMD buat ngurusu itu semua” (SQ : 24 Maret 2019)

Setelah mengajukan pencairan dana bantuan keuangan khusus (BKK) dari desa pada Gubernur Jatim selesai, tahapan selanjutnya adalah tahap rembug pokmas persiapan realisasi bantuan, ditahapan ini melakukan pendalaman review pada jenis usulan kebutuhan RTS, mengkoordinasikan perkembangan dari kondisi kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dan apabila ada perubahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, serta menyepakati rencana lebih lanjut. Dijelaskan oleh informan SQ yang menjelaskan :

“Kegiatan dalam rembug pokmas realisasi bantuan meliputi pendamping desa menyelenggarakan rembug pokmas yang difasilitasi oleh sekretariat desa dan pendamping kabupaten. PD juga mempersiapkan bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan rembug pokmas kayak daftar hadir peserta, daftar nama KRTP beserta rincian usulan kebutuhan, tempat pelaksanaan rembug pokmas yang berada dilingkungan tempat tinggal KRTP, Form review usulan kebutuhan belanja KRTP dan dokumentasi. Disini PD juga menjelaskan mengenai tujuan diadakannya rembug pokmas kepada KRTP seperti apa, kita pendamping desa juga

dibantu oleh pendamping kabupaten melakukan review usulan kebutuhan pada KRTP”. (SQ : 24 Maret 2019)

Dari wawancara informan SQ menjelaskan bahwa dalam rembug pokmas, pendamping desa (PD) mempersiapkan keperluan dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan rembug pokmas, PD juga menjelaskan mengenai maksud dan tujuan diadakannya rembug pokmas pada KRTP, dan PD dibantu oleh pendamping kabupaten untuk melakukan review usulan kebutuhan KRTP, hal tersebut dijelaskan :

“Review rincian usulan kebutuhan KRTP meliputi jenis volume, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh KRTP, sehingga bantuan tersebut tepat kebutuhan dan sesuai dengan kebiasaan dari KRTP. Hasil review rincian usulan kebutuhan KRTP ini juga menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan bantuan barangnya, untuk rencana tindak lanjut disepakati dalam rembug pokmas yang berupa kegiatan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian bantuan program, yang akhirnya hasil dari review rincian usulan usaha KRTP diserahkan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya disampaikan kepada tim pengelola kegiatan (TPK) sebagai acuan pengadaan barang”. (LY: 22 Februari 2019)

Dari pernyataan informan LY menyatakan bahwa dalam tahap ini melakukan pendalaman review rincian usulan kebutuhan dan mengkoordinasikan perkembangan kondisi KRTP serta kebutuhan apabila ada perubahan sesuai ketentuan dan menyepakati rencana lebih lanjut.

Pendamping juga berperan sebagai pendidik, seperti yang diungkapkan oleh informan LY berikut ini :

“Kita berperan aktif dalam memberikan masukan yang positif, bertukar pemikiran dengan KRTP mengenai keluhan atau keinginan dari KRTP, juga memberikan pengetahuan dengan cara pelatihan pada KRTP”. (LY : 22 Februari 2019)

Jadi pendamping berperan sebagai pemberi masukan yang positif atau pendamping dapat diajak untuk bertukar pemikiran dengan KRTP mengenai masalah yang dihadapi oleh KRTP.

4) Intervensi dilakukan dalam tahap Penyerahan Bantuan Barang Kepada KRTP dan bimbingan teknis

Tahapan selanjutnya baru masuk pada tahap intervensi penyerahan bantuan barang kepada KRTP, yaitu dapat dilaksanakan penyerahan bantuan barang kepada KRTP secara langsung atau dapat diwakilkan kepada ART selaku orang yang akan menjalankan usaha. Pendamping desa dan sekretariat desa difasilitasi oleh pendamping kabupaten dalam menyiapkan berkas serah terima bantuan kepada KRTP dan mengecek kembali rincian barang yang akan diberikan kepada KRTP apakah sudah sesuai atau belum. Hal tersebut dijelaskan oleh informan LY selaku pendamping kabupaten, sebagai berikut :

“Pelaksanaan kegiatan dalam penyerahan bantuan barang kepada KRTP dari sekretariat desa difasilitasi oleh pendamping kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan untuk menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan pada DPMD kabupaten soal rencana atau agenda penyerahan bantuan KRTP. Sekretariat desa juga difasilitasi oleh pendamping kabupaten menyiapkan berkas serah terima bantuan barang pada KRTP seperti undangan kepada anggota pokmas, berita acara penyerahan bantuan, daftar nama KRTP penerima serta rincian barang bantuan, spanduk pencairan, dan dokumentasi biasanya”. (LY : 22 Februari 2019)

Pernyataan informan LY tersebut perjelas oleh pernyataan informan MA selaku pendamping desa. Informan MA mengatakan :

“Pendamping desa difasilitasi pendamping kabupaten untuk melakukan pengecekan kembali pada kesesuaian barang. Penyerahan bantuan barang untuk KRTP oleh pemerintah desa dibantu sama sekretariat desa, pendamping desa dan pendamping kabupaten. Pada penyerahan bantuan barang juga dihadiri oleh KRTP sendiri secara langsung atau apabila berhalangan karena faktor lain dan tidak memungkinkan bisa diwakilkan oleh ART yang menjalankan usahanya nanti, dan penyerahan bantuan pada KRTP ini diserahkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak dana masuk ke rekening kas desa, penyerahan bantuan barang pada KRTP juga didokumentasikan satu persatu dengan disertai bukti tanda terima”. (MA: 24 Maret 2019)

Setelah penyerahan bantuan usaha kepada KRTP telah didistribusikan oleh pemerintah desa, sekretariat desa dan pendamping desa yang difasilitasi oleh pendamping kabupaten,

Tahapan selanjutnya adalah melakukan bimbingan teknis atau bimtek. Bimtek dilaksanakan oleh stakeholder atau PKK yang bekerja sama dengan pendamping desa untuk melakukan penyuluhan ketrampilan atau peningkatan SDM. Informan LY menjelaskan :

“Bimtek kemaren pelatihan pengeloaan olahan makanan berbahan ikan bekerja sama dengan PD dengan PKK, olahan itu bahannya dari lele karena disini itu banyak yang ternak lele kan mudah dicari juga nah lele itu tadi diolah dijadikan nugget, abon lele, bakso lele dan kerupuk juga ada”. (SQ : 24 Maret 2019)

Bimbingan teknis juga diungkapkan oleh informan SI selaku rumah tangga sasaran yang juga mengikuti pelatihan ketrampilan, yang mengatakan :

“Kemaren waktu bimtek membuat olahan makanan dari bahan dasar ikan lele, diolah dijadikan nugget ada yang dijadikan kerupuk lele juga, lumayan bisa buat isi warung selain dijadikan lauk lele goreng bisa buat cemilannya juga biasanya nugget lele juga saya kemas pakek mika plastik gitu lumayan penghasilannya”. (SP : 24 Maret 2019)

Pendamping berperan aktif dalam memberikan masukan yang baik berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman langsung dari pendamping, pernyataan dibawah ini diungkapkan oleh informan MA yang mengatakan :

“Kita berperan aktif dalam memberikan masukan yang positif, bertukar pemikiran dengan KRTP mengenai keluhan kesah atau keinginan dari KRTP, juga memberikan pengetahuan dengan cara pelatihan pada KRTP”. (LY : 22 Februari 2019)

Jadi pendamping mempunyai peran aktif dalam memberikan sebuah masukan yang positif dengan pada KRTP dan pendamping juga dapat diajak untuk saling bertukar pemikiran.

5) Evaluasi & Terminasi dilakukan pada tahap Pengelola Usaha, Monitoring & Evaluasi, Pelestarian & Keberlanjutan Program

Setelah bimbingan teknis dilaksanakan dan program berjalan, selanjutnya adalah tahapan pengelola usaha. Pengelola usaha sendiri adalah sebuah usaha produktif yang dikelola dengan baik dan secara langsung oleh KRTP guna untuk dapat meningkatkan kesejahteraan KRTP. Dijelaskan oleh informan LY yang menyatakan :

“Prinsipnya bantuan yang diterima adalah untuk KRTP dengan ART atau anak rumah tangga, sehingga pengelolaanya bisa dilakukan KRTP dalam satu keluarga. Tetapi atas pertimbangan tertentu usaha KRTP bisa dilakukan dengan berkelompok atau dalam bentuk kelompok usaha bersama. Tugas dari sekretariat desa dan pendamping desa memantau perkembangan usaha produktif KRTP atau usaha kelompok bersama KRTP. Untuk usaha yang sudah berkembang dapat difasilitasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan atau modal yang melalui lembaga keuangan mikro yang ada ditingkat desa”. (LY : 22 Februari 2019)

Pernyataan informan LY menyatakan mengenai tahap pengelola usaha yang dilakukan KRTP yang mana pendamping dan sekretariat desa terus memantau perkembangan dari usaha KRTP tersebut, hal ini didukung oleh informan MA yang menyatakan, sebagai berikut :

“PD dan sekretariat desa terus memantau perkembangan usaha produktif dari KRTP ini, ada juga yang mendapatkan fasilitasi permodalan dari bank desa jadi kan lumayan bisa menambah modal KRTP nya”. (MA : 24 Maret 2019)

Selain pernyataan dari kedua informan tersebut, informan SI juga mengungkapkan pernyataan yang sama. Pernyataan informan SI semakin menguatkan pernyataan informan sebelumnya. Informan SI mengungkapkan :

“Untuk pengelola usaha alhamdulillah usaha ini saya jalankan sendiri terkadang memang dibantu sama anak kalau pas ramai. Dan setelah program PFK ini selesai saya juga dapat bantuan pinjaman permodalan, jadi bisa lebih mengembangkan usaha lagi”. (SI : 24 Maret 2019)

Ditambahkan oleh informan RH yang juga dapat menguatkan informan SI yang menyatakan :

“Usaha ini saya jalankan sendiri saya kelola sendiri setiap harinya, karena anak sekolah, tapi kalau pas ada dirumah dan saya lagi masak atau ngurus yang lain anak saya yang meladeni”. (RH : 24 Maret 2019)

Tahapan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi (monev), setiap program terlebih program bantuan pasti diakhir program ada sebuah tahap monitoring dan evaluasi yang berguna untuk memantau perkembangan dari program JM PFK dari rumah kerumah untuk dapat mengetahui secara langsung, apakah bantuan sudah sesuai, apakah bantuan bermanfaat atau apakah bantuan yang diberikan berkembang atau stagnan. Informan MA selaku pendamping kabupaten memberikan pernyataan yang mengungkapkan :

“Pendamping datang kerumah-rumah KRTP menanyakan apakah sudah sesuai dengan permintaannya ibunya puas apa tidak, ini ada perkembangan apa tidak dari yang semula menjadi buruh tani saja sekarang ada pendapatan dari usaha Jalin matra ”alhamdulillah sekarang sudah berkembang sekarang kerja di sawah buat saya makan dan pendapatan usaha ini saya sisihkan saya kembangkan bisa dibuat tabungan bu” gitu, jadi alhamdulillah ketika monev semuanya bilang sangat terbantu dengan adanya bantuan ini”. (MA : 24 Maret 2019)

Monev dilakukan pendamping kabupaten dari awal pelaksanaannya program, disampaikan oleh informan SQ yang menyatakan :

“Kita melakukan monitoring mengenai perkembangan usaha KRTP, berhasil atau tidak, atau mungkin stagnan, jadi usahanya tidak turun dan juga tidak naik atau berkembang. Pokoknya semua perkembangan dari KRTP itu kita pantau”. (SQ: 24 Maret 2019)

Ditambahkan oleh informan SI selaku RTS yang menyampaikan pernyataan yang senada, antara lain :

“Sering kalau pendamping datang ke sini, untuk sekedar makan sambil menanyakan usaha yang dijalankan apakah

lancar atau ada kendala apa tidak. Terus juga waktu monev terkahir itu pendamping sama orang kabupaten juga datang untuk survey katanya, apakah bantuannya sudah sesuai, bermanfaat atau tidak, terus usahanya berkembang atau stagnan. Alhamdulillah bantuan yang diberikan memang sesuai dengan yang saya inginkan serta yang saya butuhkan dan tentunya dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat sekali dan membantu banget mbak alhamdulillah dapat bantuan pinjaman modal lagi dengan bunga ringan”. (SI : 24 Maret 2019)

Jadi ditahap akhir program JM PFK pendamping kabupaten secara berjenjang melakukan monitoring dan evaluasi (monev), untuk mengetahui perkembangan usaha KRTP serta mengevaluasi yang memang perlu dievaluasi. Setelah program selesai ada tahapan lagi yang nama tahapannya yaitu tahap pelestarian dan keberlanjutan program.

Pelestarian dan keberlanjutan program di koordinasikan oleh sekretariat desa dapat dalam bentuk pelatihan atau pendampingan kepada KRTP atau pokmas secara berkelanjutan meskipun program sudah selesai. Pernyataan mengenai pelestarian dan keberlanjutan program di jelaskan oleh informan LY sebagai berikut :

“Untuk pelestarian kita perkuat modal jadi mereka kita bantu untuk chaneling pada pengambilan modal, ada juga yang bermitra jadi KRTP bermitra dengan PD KRTP kepingin alat untuk meningkatkan pemasukannya, kemarin pelestarian kan pelatihannya bikin jamu instan, KRTP berminat sekali nah PD nya juga mau bermitra dengan KRTP dan sampai sekarang berjalan dan sukses. Kemudian yang modal itu kita sudah sampaikan yaitu dari bank UMKM jatim dan BNI46 baru tahun ini 2019 mulai untuk permodalannya”. (LY: 22 Februari 2019)

Pernyataan informan LY diatas didukung oleh informan SI selaku rumah tangga sasaran (RTS) yang mengatakan :

“Setelah program ini selsai, alhamdulillah saya dapat bantuan pinjaman permodalan dengan bunga yang lumayan rendah, lumayan buat tambah-tambah mbak dan bisa nyisihkan uang seikit-dikit lumayan dari pada tidak sama sekali”. (SI : 24 Maret 2019)

Dalam tahapan ini pendamping juga berperan sebagai edukator atau pendidik, yang pernyataannya disampaikan oleh informan SQ :

“Mendampingi saat pelatihan, pelatihan dari kabupaten soal management atau dari PKK, itu kita memberikan seperti pemahaman terkait manajemen tersebut dan memberikan arahan pada saat pelatihan dari PKK kita juga membantu terus dalam proses tersebut”. (SQ : 24 Maret 2019)

Peran pendamping yang selanjutnya adalah sebagai Broker, menjadi sebuah penghubung antar KRTP atau KRTP antar lembaga sesuai dengan yang diperlukan. Pendamping harus mempunyai banyak sumber atau relasi agar dapat membantu menjembatani. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan informan MA yang menyatakan :

“Pendamping terus mencoba dan berusaha menghubungkan KRTP pada sumber-sumber yang memang diperlukan oleh KRTP”. (MA : 24 Maret 2019)

Pernyataan informan MA diatas semakin diperkuat oleh informan SQ yang menyatakan :

“Membantu akses pada pelayanan dasar ya seperti kesehatan, pendidikan. Juga memberikan akses pada pelatihan olahan makanan yang dilakukan oleh PKK atau kabupaten, yang nantinya dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan dasar KRTP”. (SQ: 24 Maret 2019)

Kesimpulannya adalah pendamping berperan untuk dapat menghubungkan KRTP dengan lembaga atau sesuatu yang memang dibutuhkan oleh KRTP, pendamping juga membantu unntuk akses pada pelatihan olahan makanan yang dilakukan oleh PKK desa atau kabupaten.

b. Triangulasi indikator keberhasilan

1) Perkuat Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar

Pernyataan yang pertama mengenai memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar yang disampaikan oleh informan EP antara lain :

“Bantuan KRTP ini 10% nya itu berupa bahan pakan pokok, itu bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar mereka paling tidak, misalkan warungnya belum laku tapi mereka masih bisa makan, karena mendapatkan bantuan 10% itu tadi” (EP: 13 Maret 2019)

Menurut informan EP selaku sekretariat kabupaten menyatakan bahwa bantuan 10% yang dirupakan berupa bahan dasar pokok adalah salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar mereka, yang berguna apabila usaha yang dijalankan di awal belum berjalan maka KRTP masih tetap dapat memberikan nutrisi makan kepada keluarganya, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari informan SI yang menyatakan :

“Dengan adanya program ini sangat terbantu sekali saya dan teman-teman KRTP lainnya karena yang pertama, kita mendapat bantuan 10% yang dirupakan bahan dasar pokok dari bantuan yang diberikan sebanyak dua juta lima ratus. Bahan dasar seperti beras dan telur sangat membantu, penghasilan atau uang hasil jualan dapat disimpan terlebih dahulu untuk keperluan yang lain untuk sementara atau dipakai nanti, karena kita punya stok beras jadi tidak perlu lagi beli, jadi dapat dibilang uang yang biasanya jatah buat beli beras bisa ditabung dulu. Alhamdulillah” (SI : 24 Maret 2019)

Informan SI mengungkapkan bahwa dengan adanya bantuan ini berupa 10% dari keseluruhan bantuan yang diberikan SI sangat terbantu, hal yang serupa diinformasikan oleh RH selaku penerima program yang menyatakan :

“Adanya program ini saya terbantu sekali karena dengan begitu saya mempunyai usaha yang bisa dijadikan tumpuhan sehari-hari. Awal dulu diberikan bantuan sejumlah dua juta lima ratus, terus 10% nya dirupakan

sembako, jadi lumayan untuk mencukupi makanan sehari-hari selagi membangun usahanya”. (RH : 24 Maret 2019)

Pernyataan dari informan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan dari program PFK ini sangat membantu, karena bantuan yang berjumlah dua juta lima ratus dan 10% dari bantuan tersebut dirupakan bahan pokok, KRTP tidak bingung lagi untuk membeli beras sementara waktu dan uang beras dapat disimpan untuk keperluan yang lain. Sehingga dengan begitu kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pernyataan informan SI semakin diperkuat oleh informan SQ yang menjelaskan :

“Setelah menerima bantuan peningkatan taraf hidupnya kebanyakan alhamdulillah terbantu sebelum nya buat bayar sekolah aja susah banget, sekarang sudah alhamdulillah cukup buat beli makan, bisa buat tambahan biaya sekolah, jadi kepada program PFK ini mereka sangat berterima kasih karena mereka sangat terbantu”. (SQ: 24 Maret 2019)

Pernyataan informan diatas menyatakan bahwa setelah KRTP menerima bantuan, peningkatan taraf kehidupan dari KRTP dapat dikatakan lebih baik dan cukup untuk biaya pendidikan, kesehatan ataupun kebutuhan dasar sehari-hari.

2) Mendayagunakan Berbagai Sumber

Setelah memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar faktor kedua adalah mendayagunakan berbagai sumber yaitu bagaimana mengarahkan KRTP agar dapat lebih sadar akan kemampuan yang dimiliki oleh KRTP sehingga mereka dapat memanfaatkan kemampuan tersebut agar bisa lebih berdaya dan berguna. Pernyataan mengenai mendayagunakan berbagai sumber diungkapkan oleh informan SQ sebagai berikut :

“Kita memanfaatkan berbagai sumber, karena saya pengurus PKK kalau ada kegiatan kepelatihan saya

usahakan para KRTP ini bisa mengikuti kepelatihan-kepelatihan tersebut, lumayan bisa buat menambah peningkatan usahanya dari pengetahuan yang didapat dari bimtek”. (SQ : 24 Maret 2019)

pernyataan informan SQ senada dengan yang diungkapkan oleh informan SI yang juga menyatakan :

“Kelemahannya secara sosial perempuan masih dinomorduakan. Kebanyakan KRTP di desa sini bekerja di sawah atau pabrik pasti gajinya juga lebih sedikit kalau dibandingkan dengan gaji laki-laki. Terus kemudian didominasi usahanya itu laki-laki, kalau perempuan yang tidak terbiasa berwirausaha biasanya merasa minder, tapi ada keuntungan juga, KRTP disini mereka ulet. Mangkanya butuh pelatihan menumbuhkan jiwa berwirausaha, karena sukses dalam berwirausaha itu sangat erat dengan kemampuan untuk bisa meraih kepercayaan dari banyak orang”. (SI : 24 Maret 2019)

3) Inisiatif Pengambilan Keputusan

Faktor pemenuhan kebutuhan dasar yang terakhir adalah mendorong inisiatif pengambilan keputusan yang mana sangat dibutuhkan dalam membentuk sebuah usaha yang lebih baik dan efisien serta mandiri. Seperti yang diungkapkan oleh informan MA sebagai berikut :

“Dari awal memang pendamping berusaha memupuk inisiatif pengambilan keputusan dan memang mereka kita bantu, kita memberikan stimulus biar mereka bisa mengucapkan sendiri keinginannya mereka seperti apa, mereka sendiri yang minta. Dan biasanya kalau mereka sendiri yang minta kebanyakan lebih berhasil lagi”. (MA : 24 Maret 2019)

Senada dengan yang diutarakan oleh informan MA mengenai inisiatif pengambilan keputusan KRTP, ditambahkan oleh informan LY yang menyatakan :

“PD hanya membantu mendorong KRTP untuk bisa mengutarakan apa yang diinginkan, mengutarakan semua

masalah atau problem yang sedang dihadapi dan bagaimana KRTP mengambil keputusan tersebut”. (LY : 22 Februari 2019)

Dari pernyataan kedua informan tersebut menjelaskan bahwa pendamping sedari awal membiasakan KRTP untuk inisiatif pengambilan keputusan, pendamping terus mendorong KRTP agar dapat mengutarakan apa yang KRTP inginkan. Ditambahkan oleh informan SI yang menyatakan :

“Dari awal kita dibantu agar bisa mengutarakan keinginan kita sendiri mbak, jadi pendamping mendorong kita biar kita itu berani ngomong, apalagi kalau di forum pokmas, karena memang awal-awal malu dan takut mau saran atau kasih masukan tapi lambat laun sudah terbiasa dan berani mengutarakan keinginan”. (SI : 24 Maret 2019)

Senada dengan yang diutarakan oleh informan SI dan semakin mendukung pernyataannya yang mengungkapkan :

“Kita dibantu dengan pendamping untuk pengurusan bantuan usaha, jadi sangat membantu sekali karena membuka pemikiran kita yang masih bingung mau usaha apa, kita diberi dorongan yang pada akhirnya kita bisa memberikan keputusan mengenai usulan bantuan”. (RH : 24 Maret 2019)

Selain pernyataan dari kedua informan tersebut, informan SQ juga mengungkapkan pernyataan yang semakin menguatkan pernyataan informan sebelumnya. Semakin diperjelas oleh informan SQ yang mengungkapkan :

“Kemarin ada yang ingin dibelikan kulkas, kita memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti, ibu minta kulkas buat jualan minuman-minuman, es batu dan gorengan, supaya nanti tidak beli es batu diluar, kita memberi pertimbangan listriknya ibu berapa agar tidak memberatkan kedepannya karena bantuan ini untuk meringankan bukan untuk memberatkan, dikasih pengetahuan juga kalau nanti langsung di iyakan tanpa

diberi pertimbangan-pertimbangan, iya kalau nanti bisa ngangkat listrik dirumahnya, nanti kalau misal malah kena listriknya banyak kan jadi memberatkan. Pikir-pikir kalau mau minta bantuan ini, ada yang minta bantuan sepeda motor buat apa? Buat belanja gitu katanya, kita memberi pertimbangan kembali apakah modal ibu sudah cukup kalau belum ya didahulukan modal usahanya dulu, kalau buat sepeda ya uangnya buat sepeda motor aja buk tidak cukup meskipun sepeda kan kita juga harus mikir kedepannya sepeda juga harus tetep hidup seperti surat-suratnya kan bayar lagi buat bayar pajak dan lain-lain kan bisa memberatkan nantinya jadi lebih baik pakai sepeda kecil saja, separuh dari pembelian sepeda bisa dipakai buat modal gitu dan mereka merespon oh iya juga ya gitu. Kan kita mikir keberlanjutannya gitu. Tapi KRTP memang kita dorong terus untuk inisiatif sendiri untuk pengambilan keputusan”. (SQ : 24 Maret 2019)

Berdasarkan pernyataan informan SQ selaku pendamping desa, terlihat bahwa memang ada perubahan pada SI setelah adanya bantuan program JM PFK. Perubahan tersebut terlihat pada KRTP yang pemenuhan kebutuhan dasar yang sudah tercukupi seperti dapat membiayai pendidikan anak, dapat memberikan makanan yang bergizi kepada keluarga, KRTP dapat mendayagunakan berbagai sumber, KRTP dapat meningkatkan akses klien pada pelayanan dasar, dan terakhir KRTP dapat mengambil keputusan secara mandiri.

4) Meningkatkan akses pada pelayanan dasar

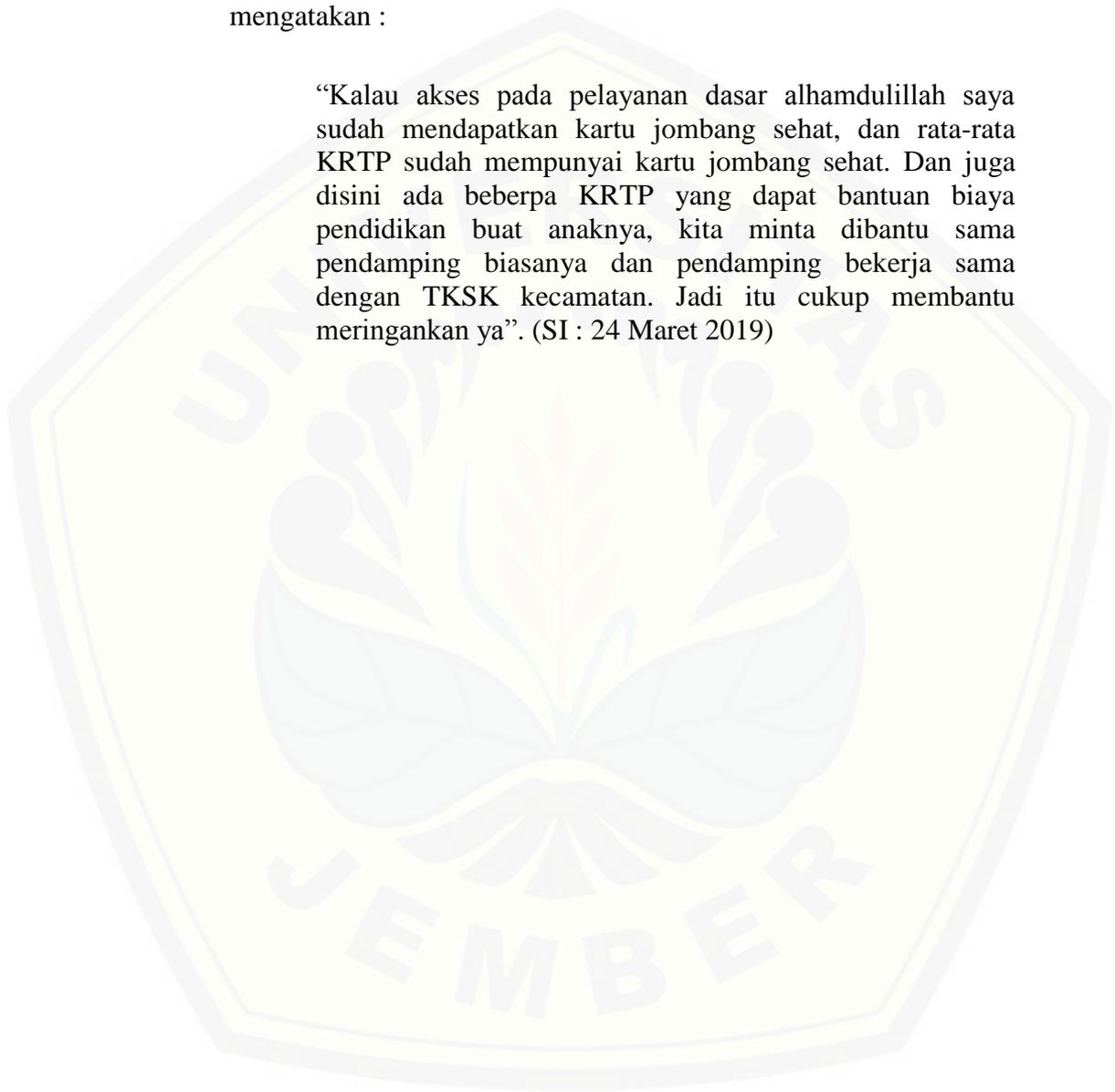
Selanjutnya adalah meningkatkan akses klien pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan yang diberikan dari pemerintah oleh masyarakat, pernyataan meningkatkan akses klien pada pelayanan dasar diungkapkan oleh informan SQ sebagai berikut :

“Alhamdulillah kebanyakan yang menerima bantuan program JM PFK banyak yang sudah punya KIS, cuman kalau pendidikan kan KIP, kalau ada kartu pendidikan kan lebih enak bisa buat tambahan membayar biaya sekolah, KIP tergantung tingkat sekolahnya kalau SMA satu juta, SMP tujuh ratus ribu sampai enam ratus ribu kalau SD dua ratus lima puluh, kelas 4 atau 5 SD sekitar tiga ratus atau

lima ratus ribu. Kita membantu mengusahakan agar mendapatkan KIS atau KIP” (SQ : 24 Maret 2019)

Pernyataan informan SQ tersebut didukung oleh pernyataan oleh informan SI selaku rumah tangga sasaran. Informan SI mengatakan :

“Kalau akses pada pelayanan dasar alhamdulillah saya sudah mendapatkan kartu jombang sehat, dan rata-rata KRTP sudah mempunyai kartu jombang sehat. Dan juga disini ada beberpa KRTP yang dapat bantuan biaya pendidikan buat anaknya, kita minta dibantu sama pendamping biasanya dan pendamping bekerja sama dengan TKSK kecamatan. Jadi itu cukup membantu meringankan ya”. (SI : 24 Maret 2019)



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Metode pendampingan kepada kepala rumah tangga perempuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada program penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK) merupakan sebuah program yang mana membantu rumah tangga sasaran (RTS) untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya agar bisa lebih berdaya, dengan adanya metode dan peran pendamping dalam proses pendampingan kepada kepala rumah tangga perempuan (KRTP). Berikut ini metode pendampingan kepala rumah tangga perempuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar :

- a. Menggunakan metode *Case Work* dengan beberapa tahapan intervensi seperti Intake, Asassmen, Planning, Intervensi, Evaluasi & Terminasi.
 - 1.) Metode Intake dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pra rembug warga dan rembug warga untuk mencapai perkuat dukungan.
 - 2.) Metode Asassment dalam *Case Work* dilakukan dalam kegiatan klarifikasi & identifikasi usulan kebutuhan.
 - 3.) Metode Planning yang dilakukan dalam kegiatan pengajuan pencairan dana BKK dan rembug pokmas persiapan realisasi bantuan, digunakan untuk mendayagunakan berbagai sumber.
 - 4.) Metode *Case Work* Intervensi dilakukan dalam tindakan penyerahan bantuan barang kepada KRTP dan bimbingan teknis, untuk mendukung inisiatif pengambilan keputusan.
 - 5.) Metode Case Work melalui Evaluasi & Terminasi dilakukan dalam kegiatan pengelola usaha, monitoring & evaluasi (Monev) dan pelestarian & Keberlanjutan Program, dalam rangka akses pada meningkatkan akses pada pelayanan dasar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya beberapa saran mengenai metode pendampingan KRTP dalam program PFK di Desa Bulurejo Kabupaten Jombang. Saran-saran tersebut diantaranya :

- a. Meskipun program sudah selesai diharapkan kepala rumah tangga perempuan (KRTP) bisa lebih mengoptimalkan sumber-sumber yang ada, tanpa bergantung dengan pendamping. Tujuannya untuk lebih memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar, diharapkan setelah berakhirnya program jalin matra PFK, modal usaha yang sudah diberikan kepada KRTP, dapat lebih memperkuat usaha KRTP sehingga mampu mengembangkan dan menjalankan secara mandiri.
- b. Pendalaman kebutuhan KRTP untuk usaha produktif, seharusnya pemerintah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) jarak antara dilaksanakannya monev bukan dua atau tiga bulan setelah realisasi program, melainkan dilakukan paling tidak minimal satu tahun setelah realisasi program, bertujuan agar RTS mempunyai tanggung jawab untuk terus mengelola dan mengembangkan usahanya dan tidak dijual.
- c. Pada program pengentasan kemiskinan yang selanjutnya khususnya feminisasi kemiskinan, Pendamping, PKK, atau stakeholder lainnya diharapkan untuk terus meningkatkan materi dan bahan ajar mengenai pelatihan dan pendampingan kepada sasaran agar lebih bervariasi serta dapat menjadikan referensi bagi rumah tangga sasaran.
- d. Tahun 2019 adalah tahun terakhir program jalin matra, diharapkan pada tahun 2020 kedepannya ada inovasi baru untuk mengurangi angka kemiskinan utamanya kaum feminisme, untuk mendukung dan mempercepat penanggulangan feminisasi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adi, I. R. 1994. *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Astuti, dan T. Marhaeni P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Alwisol. 2007. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Bagong, S. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bungin. B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Desmita, R. 2008. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan, M. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Helen, H. P. 1991. *Social Casework a Problem Solving Proces*. Bandung: KOPMA STKS
- Heru, D. S. 2011. *Praktik Pekerja Sosial dan Pertolongannya*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS Bandung.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ife, J. 1995. *Community Development (Creating Community Alternatives, Vision, Analys and Practice)*. Melbourne Australia: Longman Australia Pty Ltd.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development : Alternative Pembangunan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2014. *Dapertemen Pendidikan Nasional Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Hlm 201.
- Kotler, P. 2003. *Manajemen Pemasaran. Edisi Kesebelas*. Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia.
- Minderop, A. 2011. *Psikologi Sastra : Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moghadam, V. M. 2005. *Globalizing omen: Transnational Feminist Networks*. MD: The Jhons Hopkins University Press. Baltimor.
- M. I. Soelaeman. 1978. *Pendidikan Dasar Keluarga*. IKIP Bandung.
- Machendrawati, N dan S. Ahmad, A. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam dan Ideologi, strategi, sampai tradisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Najiati, S, Dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor : Wetlands International
- Ollenburger, J. C. Dan M. Helen. A. 2002. *Sosiologi Wanita*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Jalin Matra. 2018. *Pagu Program Jalin Matra PFK Kabupaten Jombang*. Penerbit : Sekretariat Kabuapten Jombang
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2018. *Pedoman Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan*. Surabaya.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018. *Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur*. 16 Februari 2018. Surabaya
- Santoso, S. 2010. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Simamora. 2003. *Membongkar Kotak Hitam Perilaku Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siporin, M. 1975. *Introduction to Social Work Practice*. New York: Mac Millan.
- Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Suharto, E. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Soebagyo, J. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suriasumantri, J. S. 2009. *Filsafat Ilmu—Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Schaefer, R.T. 2012. *Sociology*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Humanika.
- Siporin, M. 1975. *Introduction to Social Work Practice*. New York Macmillan Publishing. Co, Inc
- Sukoco. 2005. *Dalam Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Jakarta : Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Dapertemen Sosial RI
- Sumodiningrat, G. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Susanto, A. 2014. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, B. Dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjajaran.

Skripsi/ Tesis

- Noviana. 2016. *Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta*. Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahmawati, E. 2017. *Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah*. Semarang: Jurusan Pendidikan Non Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

- Nuha, Z. U. 2018. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim Di Kabupaten Blitar*. Tesis. Malang: Program Magister Ekonomi Syariah pascasarjana Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim.
- Albertina N. L. 2008. *Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS Di Lokalisasi Tanjung Elmo Sentani Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Papua Provinsi Papua*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Jurnal

- Cahyono. 2005 "Wajah Kemiskinan Perempuan" *Jurnal Perempuan*, "Mengurai Kemiskinan: Dimana Perempuan?", No.42, (2005).
- Marwati, A. *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karang Anyar*. Surakarta: Jurnal SEPA Vol 9 No 1.
- Rahma, N, T. 2014. *Eksistensi Pekerja Sosial di Indonesia, Malaysia & Amerika Serikat*.
- Nazara, S. 2007. "Pengentasan Kemiskinan: Pilihan Kebijakan dan Program yang Realistis". *Dalam Warta Demografi tahun Ke 37. No 4 tahun 2007*. Jakarta. Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
- Nurwati, N. 2008. *Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10,(1), Hlm. 5.
- Haroepoetri, A dan R. Valentina. 2004. *Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme*. Jakarta: DebtWACH Indonesia.
- Ernawati. 2013. *Menyibak Perempuan Kepala Keluarga*. MUWAZAH Vol.5, (2):161
- Apriani, F. *Berbagai Pandangan Mengenai Gender dan Feminisme*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Undang-undang

- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta . PT Pradnya Paramita. Hlm 547.

Internet

- Dinas sosial daerah istimewa jogjakarta. Jenis-jenis PMK. <http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/> [di akses pada 13 November 2018]
- Sahdan, Gregorius. 2005. Artikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan. Yogyakarta. Menanggulangi Kemiskinan Desa. <https://media.neliti.com/media/publications/30659-ID-memahami-kemiskinan-dan-strategi-penanggulangannya.pdf> [di akses pada 13 November 2018]
- R, Rizal. I. 2009. Buku Ajar Etika Profesi. Program Studi Sistem Komputer. Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/4907/1/Etika_Profesi.pdf [di akses pada 13 November 2018]
- Fajar, Agustus. 2017. Kode Etik Profesi Pekerja Sosial. <http://ipspi.org/index.php/7-materi/334-kode-etik-profesi-pekerjaan-sosial>. [Diakses pada 14 November 2018]
- Suharto, Edi. Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan Strategi. http://www.policy.hu/suharto/modul.a/makindo_32.htm [diakses pada 31 Oktober 2018]
- Pendampingan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi. <http://www.sapa.or.id/f2/346-pendampingan-sosial-dalam-pemberdayaan-masyarakat-miskin-konsepsi-dan-strategi> [di akses 31 Oktober 2018]
- Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semarang Tengah [http:// lib. unnes. ac. id/29800/1/1201413087. pdf](http://lib.unnes.ac.id/29800/1/1201413087.pdf). [di akses pada 13 November 2018]
- Pendamping Pekerja Sosial Terhadap klien. <https://eprints.uny.ac.id/9700/2/BAB%20%20-%2008102241026.pdf> [di akses pada 13 November 2018]
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. Jumlah Penduduk Miskin. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/754/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012---2017.html> [diakses pada 14 November 2018]
- Badan Pusat Statistik 2015. Statistik Indonesia. www.bps.go.id. [Di akses pada 9 Oktober 2018]
- Badan Pusat Statistik 2017. *Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Statistik Indonesia. [https:// jatim. bps. go. id/statictable/2018/01/30/755/persentase-penduduk-miskin-](https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/755/persentase-penduduk-miskin)

[menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012-2017. html.](#)
[Diakses pada 9 Oktober 2018]

Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Indonesia. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/04/29/331/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2015. html>. [Diakses pada 9 Oktober 2018]

Website Resmi Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang <https://bulurejojombang.wordpress.com/2016/01/13/potensi-desa-bulurejo/> [23 Februari 2019: diakses 11.00]

Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm [10 April 2019 : diakses 06.18]

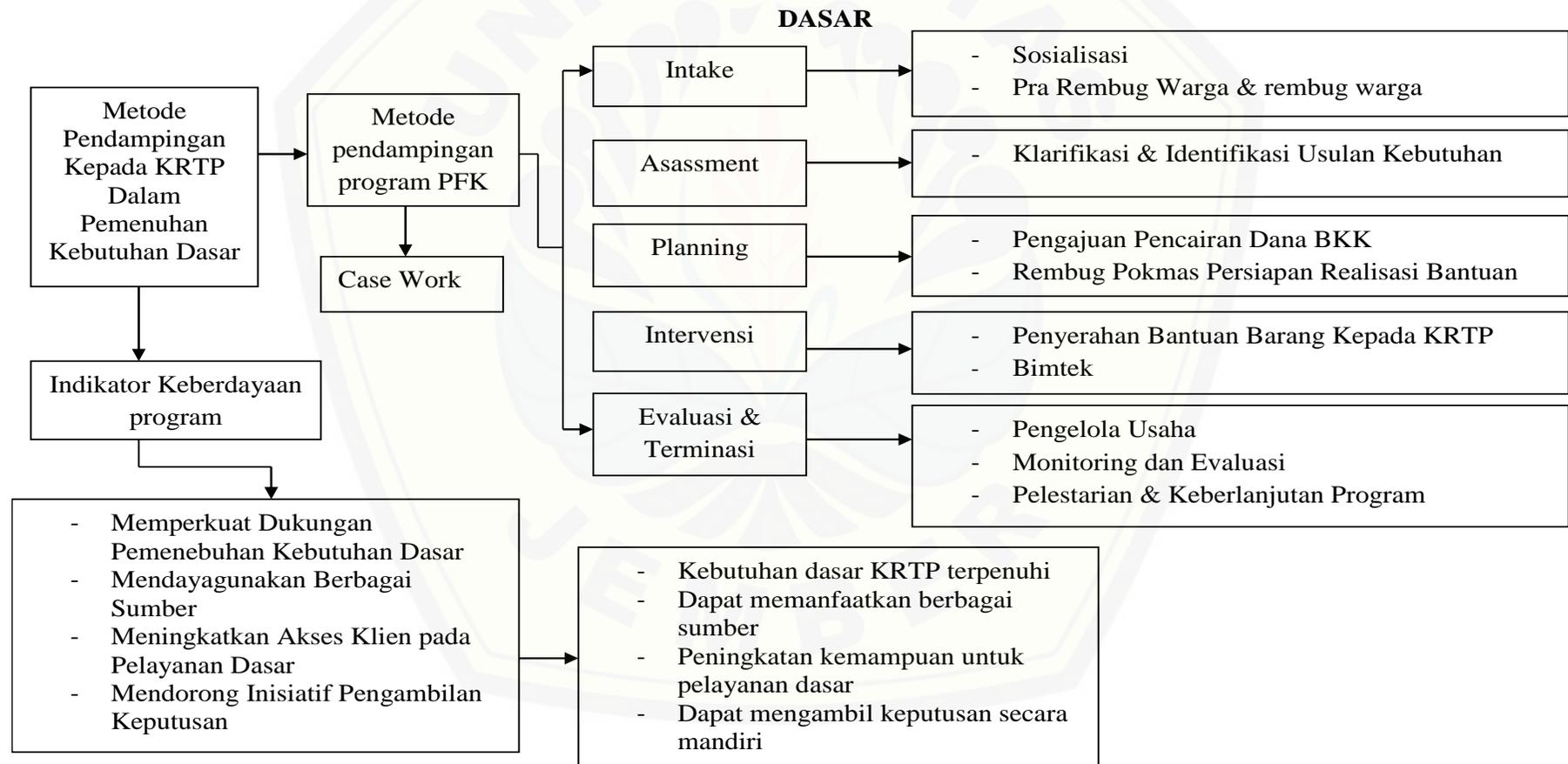
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2019. <https://kbbi.web.id/musyawarah> [diakses 10 April 2019 : 08.00]



LAMPIRAN A

TAKSONOMI PENELITIAN

METODE PENDAMPINGAN KEPADA KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN



LAMPIRAN B**GUIDE INTERVIEW****METODE PENDAMPINGAN KEPADA KEPALA RUMAH TANGGA
PEREMPUAN(KRTP) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR DESA BULUREJO**

Tanggal :

Lokasi :

Informan pokok (pendamping kabupaten, pendamping desa dan KRTP)

A. Identitas informan pokok

- Nama
- Alamat
- Umur
- Pekerjaan
- Pendidikan terakhir

B. Daftar wawancara

1. Sudah berapa kali menjadi pendamping program jalin matra?
2. Apa tujuan adanya program jalin matra Penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK)?
3. Bagaimana metode pendamping dalam pendampingan program jalin matra PFK dalam pemenuhan kebutuhan dasar KRTP?
 - a. Intake
 - b. Asessment
 - c. Planning
 - d. Intervention
 - e. Evaluation and termination
4. Bagaimana kondisi KRTP sebelum adanya program JM penanggulangan feminisasi kemiskinan?
5. Bagaimana kondisi KRTP setelah adanya program JM penanggulangan feminisasi kemiskinan?
6. Indikator keberdayaan KRTP
 - a. Bagaimana memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar?
 - b. Bagaimana mendayagunakan berbagai sumber?
 - c. Bagaimana meningkatkan akses klien pada pelayanan dasar?
 - d. Bagaimana mendorong inisiatif pengambilan keputusan?

LAMPIRAN C

GUIDE INTERVIEW

**METODE PENDAMPINGAN KEPADA KEPALA RUMAH TANGGA
PEREMPUAN(KRTP) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR DESA BULUREJO**

Tanggal :

Lokasi :

Informan Tambahan (Sekretariat kabupaten)

- a. Identitas informan tambahan
 - Nama
 - Alamat
 - Umur
 - Pekerjaan
 - Pendidikan terakhir
- b. Daftar wawancara
 - 1) Apa tujuan adanya program jalin matra Penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK)?
 - 2) Bagaimana metode pendampingan dari program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan?
 - a) Intake
 - b) Asessment
 - c) Planning
 - d) Intervention
 - e) Evaluation & termination
 - 3) Bagaimana kondisi KRTP sebelum adanya program JM penanggulangan feminisasi kemiskinan?
 - 4) Bagaimana kondisi KRTP setelah adanya program JM penanggulangan feminisasi kemiskinan?
 - 5) Indikator keberdayaan KRTP
 - a) Bagaimana memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar?
 - b) Bagaimana mendayagunakan berbagai sumber?
 - c) Bagaimana meningkatkan akses klien pada pelayanan dasar?
 - d) Bagaimana mendorong inisiatif pengambilan keputusan?

LAMPIRAN D

ANALISIS DATA

Kategorisasi	Transkrip Wawancara	Reduksi Data	Display Data	Kesimpulan
<p>Pemenuhan Kebutuhan Dasar KRTP: 1. Memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar</p>	<p>“Memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar seperti bahan makanan pokok ya. Nanti bantuan KRTP ini 10% nya berupa bahan pakan pokok nah itu bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar mereka paling tidak, misalnya warungnya belum laku tapi mereka masih bisa makan, karena mendapatkan bantuan 10% itu tadi”. (EP : 13 maret 2019)</p> <p>“Dengan adanya program ini sangat terbantu sekali saya dan teman-teman KRTP lainnya karena yang pertama kita mendapatkan bantuan 10% yang dirupakan bahan dasar pokok dari bantuan yang diberikan sebanyak dua juta lima ratus. Bahan dasar seperti beras dan telur sangat membantu,</p>	<p>“Bantuan KRTP 10% nya berupa bahan pakan pokok, itu bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar mereka paling tidak, misalkan warungnya belum laku tapi mereka masih bisa makan, karena mendapatkan bantuan 10% itu tadi”. (EP:13 maret 2019)</p> <p>“Dengan adanya program ini sangat terbantu sekali saya dan teman-teman KRTP lainnya karena yang pertama kita mendapatkan bantuan 10% yang dirupakan bahan dasar pokok dari bantuan yang diberikan sebanyak dua juta lima ratus. Bahan dasar seperti beras dan telur sangat membantu, penghasilan atau uang hasil jualan dapat disimpan terlebih dahulu untuk keperluan yang lain untuk sementara atau dipakai nanti, karena kita punya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan 10% nya berupa bahan dasar pokok dari total bantuan dua juta lima ratus. - Setelah menerima bantuan peningkatan taraf hidupnya mneingkat. - Pendamping membantu chaneling pada pengambilan modal. - KRTP melakukan pelatihan olahan makanan berbahan dasar lele. 	<p>Salah satu bentuk upaya pemenuhan kebutuhan dasar adalah dengan memberikan bantuan, yang 10% nya berupa bahan dasar pokok dari total bantuan dua juta lima ratus yang dirupakan bantuan barang usaha produktif. Setelah menerima bantuan program, tingkat taraf hidup KRTP meningkat kebutuhan dasar terpenuhi, usaha yang dijalankan berjalan, pendamping</p>

	<p>penghasilan atau uang hasil jualan dapat disimpan terlebih dahulu untuk keperluan yang lain untuk sementara atau dipakai nanti, karena kita punya stok beras jadi tidak perlu lagi beli, jadi dapat dibilang uang yang biasanya jatah buat beli beras bisa ditabung dulu. Alhamdulillah”. (SI:24 Maret 2019)</p> <p>“Setelah adanya program ini saya terbantu sekali mbak karena dengan begitu saya mempunyai usaha yang bisa dijadikan tumpuhan sehari-hari. Awal dulu diberikan bantuan sejumlah dua juta lima ratus, terus yang 10% nya dirupakan sembako, jadi lumayanlah mbak untuk mencukupi makanan sehari-hari selagi membangun usahanya”. (RH : 24 Maret 2019)</p> <p>“Setelah menerima bantuan peningkatan taraf hidupnya</p>	<p>stok beras jadi tidak perlu lagi beli, dapat dibilang uang yang biasanya jatah buat beli beras bisa ditabung dulu. Alhamdulillah”. (SI:24 Maret 2019)</p> <p>“Adanya program ini saya terbantu sekali karena dengan begitu saya mempunyai usaha yang bisa dijadikan tumpuhan sehari-hari. Awal dulu diberikan bantuan sejumlah dua juta lima ratus, terus 10% nya dirupakan sembako, jadi lumayan untuk mencukupi makanan sehari-hari selagi membangun usahanya”. (RH : 24 Maret 2019)</p> <p>“Setelah menerima bantuan peningkatan taraf hidupnya kebanyakan alhamdulillah terbantu sebelumnya buat bayar sekolah saja susah banget, sekarang sudah alhamdulillah cukup buat beli makan, bisa buat tambahan biaya sekolah, jadi kepada program PFK ini mereka</p>	<p>membantu menchannelingkan KRTP untuk pengambilan modal yang berguna untuk perkuat modal usaha. Pendamping juga mengusahakan adanya kepelatihan usaha mengolah makanan berbahan dasar lele</p>
--	--	---	--

	<p>kebanyakan alhamdulillah terbantu sebelumnya buat bayar sekolah aja susah banget, sekarang sudah alhamdulillah cukup buat beli makan bisa buat tambahan biaya sekolah, jadi kepada program PFK ini mereka sangat berterimakasih gitu lah karena mereka sangat terbantu”. (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>“Bermitra ataupun chaneling pada pelestarian kemarin, KRTP ada yang bermitra dengan PD jadi KRTP kepingin alat seperti ini untuk meningkatkan pemasukannya nggih, dia punya usaha PD nya juga mau bermitra dengan KRTP dan sampai sekarang berjalan dan sukses dan kita perkuat modal jadi mereka kita bantu untuk chaneling pada pengambilan modal di PFK kita pakai BNI46 tahun 2019 baru akan mulai untuk permodalnya”. (LY: 22 Februari 2019)</p>	<p>sangat berterimakasih karena mereka sangat terbantu”. (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>“Bermitra ataupun chaneling pada pelestarian, KRTP ada yang bermitra dengan PD jadi KRTP kepingin alat seperti ini untuk meningkatkan pemasukannya, dia punya usaha dan PD nya juga mau bermitra dengan KRTP , sampai sekarang berjalan dan sukses dan kita perkuat modal kita bantu untuk chaneling pada pengambilan modal di PFK kita pakai BNI46 tahun 2019 baru akan mulai untuk permodalnya”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“KRTP di Desa Bulurejo pernah melakukan pelatihan pembuatan olahan makanan yang bekerja sama dengan PKK desa, ini juga sebagai salah satu bentuk untuk memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, dengan adanya ketrampilan baru tersebut diharapkan dapat</p>		
--	--	---	--	--

	<p>“KRTP di Desa Bulurejo pernah melakukan pelatihan pembuatan olahan makanan yang bekerja sama dengan PKK desa, ini juga sebagai salah satu bentuk untuk memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, jadi dengan adanya ketrampilan baru tersebut diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, bisa diolah untuk dijual kembali atau sekedar buat makan sehari-hari sehingga kebutuhan dasar tercukupi dan asupan gizi nya juga ada”. (MA: 24 Maret 2019)</p>	<p>digunakan dengan sebaik-baiknya, bisa diolah untuk dijual kembali atau sekedar buat makan sehari-hari sehingga kebutuhan dasar tercukupi dan asupan gizi nya juga ada”. (MA: 24 Maret 2019)</p>		
<p>Pemenuhan Kebutuhan Dasar KRTP : 1.Mendayagun akan berbagai sumber</p>	<p>“Jadi sebenarnya itu salah satu intervensi yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas kemampuan mereka KRTP untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Mereka ada sedikit pekarangan yang bisa dimanfaatkan, ada juga beberapa sumber yang bisa dilakukan atau kalau memang ada pemerintah daerah atau pemerintah desa</p>	<p>“Sebenarnya salah satu intervensi yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Mereka ada sedikit pekarangan yang bisa dimanfaatkan, ada beberapa sumber yang bisa dilakukan atau kalau memang ada pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. - Pekarangan rumah dapat dimanfaatkan secara bijak oleh KRTP dengan 	<p>Peningkatan kapasitas pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki KRTP, misalkan penanaman sayur-sayuran dan tanaman obat yang dapat dimanfaatkan</p>

	<p>memiliki aset desa misalnya ada tanah lapang atau lahan kosong yang bisa didirikan warung-warung yang kemudian bisa mereka tempati dengan harga-harga subsidi, lebih murah sumber-sumber daya yang ada baik yang dimiliki mereka atau yang dimiliki oleh pemerintah, itu adalah bagaimana mendayagunakan berbagai sumber”. (EP: 13 Maret 2019)</p> <p>“Penanaman sayur-sayuran atau obat herbal di pekarangan rumah termasuk sumber daya yang dimiliki KRTP. Pekarangan rumah dapat dimanfaatkan secara bijak melalui pelatihan yang di adakan oleh PKK Desa, Bulurejo para KRTP kini bisa mengimplementasikan pengetahuan yang didapat seperti menanam sayur-mayur serta obat herbal di pekarangan rumah masing-masing”. (MA: 24 Maret 2019)</p>	<p>daerah atau pemerintah desa memiliki aset desa misalnya ada tanah lapang atau lahan kosong yang bisa didirikan warung yang kemudian bisa mereka tempati dengan harga subsidi, lebih murah, sumber daya yang ada baik yang dimiliki mereka atau yang dimiliki oleh pemerintah, itu adalah bagaimana mendayagunakan berbagai sumber”. (EP:13 Maret 2019)</p> <p>“Penanaman sayur-sayuran atau obat herbal di pekarangan rumah termasuk sumber daya yang dimiliki KRTP. Pekarangan rumah dapat dimanfaatkan secara bijak melalui pelatihan yang di adakan oleh PKK Desa, Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) kini bisa mengimplementasikan pengetahuan yang didapat seperti menanam sayur-mayur serta obat herbal di pekarangan rumah masing-masing”. (MA: 24 Maret 2019)</p>	<p>ditanami tanaman obat atau sayuran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendamping menghubungkan KRTP pada pelatihan-pelatihan - Memberikan pemahaman mengenai struktur penindasan, memberikan sarana dan ketrampilan mencapai perubahan secara efektif. - KRTP sadar akan pengetahuan pelatihan berwirausaha untuk bisa meraih kepercayaan diri. 	<p>secara bijak di pekarangan rumah masing-masing KRTP. Pendamping memanfaatkan sumber yang ada untuk melakukan pelatihan untuk menambah pengetahuan dari KRTP, serta pendamping memberikan edukasi kepada KRTP mengenai struktur penindasan dan memberikan ketrampilan untuk mencapai suatu perubahan efektif.</p>
--	--	--	--	---

	<p>“Kita memanfaatkan berbagai sumber ya, karena saya pengurus PKK juga kalau ada kegiatan kepelatihan pasti saya usahakan para KRTP ini bisa mengikuti kepelatihan-kepelatihan tersebut, saya mengajukan agar bisa ikut, lumayan bisa buat menambah peningkatan usahanya dari pengetahuan yang didapat dari bimtek”. (SQ:24 Maret 2019)</p> <p>“Mencarikan link-link yang dapat diajak kerjasama. Karena pemberdayaan yang menciptakan suatu kondisi masyarakat dapat meraih kondisi keberkuasaan gitu ya, sehingga dirinya tidak termasuk dalam bagian kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai struktur penindasan terjadi dan memberikan sarana dan ketrampilan agar mencapai perubahan secara efektif”. (LY:</p>	<p>“Kita memanfaatkan berbagai sumber, karena saya pengurus PKK kalau ada kegiatan kepelatihan saya usahakan para KRTP ini bisa mengikuti kepelatihan-kepelatihan tersebut, lumayan bisa buat menambah peningkatan usahanya dari pengetahuan yang didapat dari bimtek”. (SQ:24 Maret 2019)</p> <p>“Mencarikan link-link yang dapat diajak kerjasama. Karena pemberdayaan yang menciptakan suatu kondisi masyarakat dapat meraih kondisi keberkuasaan, sehingga dirinya tidak termasuk dalam bagian kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai struktur penindasan terjadi dan memberikan sarana dan ketrampilan agar mencapai perubahan secara efektif”. (LY: 22 Februari 2019)</p>		
--	--	--	--	--

	<p>22 Februari 2019)</p> <p>“Iya memang kelemahannya secara sosial kan kita perempuan masih dinomor duakan. Kebanyakan KRTP di desa sini bekerja di sawah atau pabrik pasti gajinya juga lebih sedikit kalau dibandingkan dengan gaji laki-laki. Terus kemudian didominasi usahanya itu laki-laki, kalau perempuan yang tidak terbiasa berwirausaha biasanya merasa minder, tapi ada keuntungan juga, KRTP disini mereka ulet. Mangkanya butuh pelatihan menumbuhkan jiwa berwirausaha, karena sukses dalam berwirausaha itu sangat erat dengan kemampuan untuk bisa meraih kepercayaan dari banyak orang”. (SI:24 Maret 2019)</p> <p>“Kalau saya si sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya yang saya miliki seperti lahan yang</p>	<p>“Kelemahannya secara sosial perempuan masih dinomor duakan. Kebanyakan KRTP di desa sini bekerja di sawah atau pabrik pasti gajinya juga lebih sedikit kalau dibandingkan dengan gaji laki-laki. Terus kemudian didominasi usahanya itu laki-laki, kalau perempuan yang tidakterbiasa berwirausaha biasanya merasa minder, tapi ada keuntungan juga, KRTP disini mereka ulet. Mangkanya butuh pelatihan menumbuhkan jiwa berwirausaha, karena sukses dalam berwirausaha itu sangat erat dengan kemampuan untuk bisa meraih kepercayaan dari banyak orang”. (SI:24 Maret 2019)</p> <p>“Saya sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya yang saya miliki seperti lahan didepan rumah ini saya memanfaatkan buat membuka warung”. (RH : 24 Maret 2019)</p>		
--	--	---	--	--

	ada didepan rumah saya ini, saya memanfaatkan buat membuka warung”. (RH : 24 Maret 2019)			
<p>Pemenuhan Kebutuhan Dasar KRTP :</p> <p>2. Meningkatkan akses klien pada pelayanan dasar</p>	<p>“Saya sampaikan bahwa sebenarnya akses ke pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sudah ada melalui kegiatan-kegiatan yang lain, tapi melalui kegiatan ini dengan kerja sama dengan misalnya PKK atau TKSK kecamatan bisa lebih mungkin ada yang terlewat, kita kadang-kadang lihat temen-temen ternyata tidak terjangkau dengan pelayanan jombang sehat sehingga ketika berobat BPJS nya harus bayar gitu kan, nah melalui kegiatan ini bisa lebih terorganisir ya yang belum diupayakan segera mendapat pelayanan, terutama dibantu oleh PD yang difasilitasi oleh pemerintahan desa atau pemerintah kabupaten tapi insyaallah, kalau desil satu pasti menerima”. (LY: 22 Februari 2019)</p>	<p>“Saya sampaikan bahwa sebenarnya akses ke pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sudah ada melalui kegiatan-kegiatan yang lain, tapi melalui kegiatan ini dengan kerja sama dengan PKK atau TKSK kecamatan bisa, lebih mungkin ada yang terlewat, kita kadang-kadang lihat temen-temen ternyata tidak terjangkau dengan pelayanan jombang sehat sehingga ketika berobat BPJS nya harus bayar gitu kan, melalui kegiatan ini bisa lebih terorganisir ya yang belum diupayakan segera mendapat pelayanan, terutama dibantu oleh PD yang difasilitasi oleh pemerintahan desa atau pemerintah kabupaten, kalau desil satu pasti menerima”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“KRTP yang tidak punya atau</p>	<p>- KRTP sudah dapat mengakses pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.</p>	<p>KRTP sudah dapat mengakses pada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. KRTP merasa cukup terbantu dengan adanya program KIS/KJS dan KIP.</p>

	<p>“Kita menekankan di desanya kan biasanya ada KRTP yang tidak punya atau belum mempunyai kartu KIS jadi kita mencoba membantu ke pihak desa supaya bagaimana caranya KRTP ini mempunyai JKN KIS ada yang tidak punya, tapi mereka hampir semuanya punya untuk pelayanan kesehatan, ada juga yang kayak bedah rumah RTLH (rumah tidak layak huni) jadi KRTP yang memang rumahnya tidak layak huni bisa kita usahakan atau ajukan”. (MA : 24 Februari 2019)</p> <p>“Alhamdulillah kebanyakan yang menerima bantuan program JM PFK banyak yang sudah punya KIS, cuman kalau pendidikan kan KIP kalau ada kartu pendidikan kan lebih enak bisa buat tambahan membayar biaya sekolah, KIP tergantung tingkat sekolahnya kalau SMA 1 juta kalau tidak salah SMP 700 ribu</p>	<p>belum mempunyai kartu KIS jadi kita mencoba membantu ke pihak desa supaya bagaimana caranya KRTP ini mempunyai JKN KIS ada yang tidak punya, tapi mereka hampir semuanya punya untuk pelayanan kesehatan, ada juga yang kayak bedah rumah RTLH (rumah tidak layak huni) jadi KRTP yang memang rumahnya tidak layak huni bisa kita usahakan atau ajukan”. (MA : 24 Februari 2019)</p> <p>“Alhamdulillah kebanyakan yang menerima bantuan program JM PFK banyak yang sudah punya KIS, cuman kalau pendidikan kan KIP, kalau ada kartu pendidikan kan lebih enak bisa buat tambahan membayar biaya sekolah, KIP tergantung tingkat sekolahnya kalau SMA 1 juta, SMP 700 ribu sampai 600 ribu kalau SD 250 ribu, kelas 4 atau 5 sekitar 300 atau 500. Kita membantu mengusahakan agar mendapatkan</p>		
--	--	--	--	--

	<p>atau 600 ribu kalau SD 250 atau berapa gitu lupa kelas 4 atau 5 sekitar 300 atau 500 ribu gitu ya saya lupa. Ada juga yang belum mendapatkan KIS tidak dapat KIP juga, jadi kita membantu mengusahakan agar mendapatkan KIS atau KIP". (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>"Kalau akses pada pelayanan dasar alhamdulillah saya sudah mendapatkan kartu jombang sehat, dan rata-rata KRTP sudah mempunyai kartu jombang sehat. Gunanya untuk mengakses ke tempat-tempat kesehatan. Dan juga disini ada beberapa KRTP yang dapat bantuan biaya pendidikan buat anaknya, pokoknya hal-hal yang seperti itu kita minta dibantu sama pendamping biasanya dan pendamping bekerja sama dengan TKSK kecamatan. Jadi itu cukup membantu meringankan ya". (SI : 24 Maret 2019)</p>	<p>KIS atau KIP". (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>"Kalau akses pada pelayanan dasar alhamdulillah saya sudah mendapatkan kartu jombang sehat, dan rata-rata KRTP sudah mempunyai kartu jombang sehat. Dan juga disini ada beberapa KRTP yang dapat bantuan biaya pendidikan buat anaknya, kita minta dibantu sama pendamping biasanya dan pendamping bekerja sama dengan TKSK kecamatan. Jadi itu cukup membantu meringankan ya". (SI : 24 Maret 2019)</p>		
--	---	---	--	--

<p>Pemenuhan Kebutuhan Dasar KRTP : 3. Mendorong inisiatif pengambilan keputusan</p>	<p>“Dari awal memang pendamping berusaha memupuk inisiatif pengambilan keputusan dan dari awal memang mereka itu kita bantu, kita cuman memberikan stimulus biar mereka bisa mengucapkan sendiri keinginannya mereka seperti apa, mereka sendiri yang minta. Dan biasanya kalau mereka sendiri yang minta kebanyakan lebih berhasil lagi”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“PD hanya membantu mendorong KRTP untuk bisa mengutarakan apa yang diinginkan oleh si KRTP, mengutarakan semua masalah atau problem yang sedang dihadapi dan bagaimana KRTP mengambil keputusan tersebut”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“Dari awal kita KRTP dibantu agar bisa mengutarakan keinginan kita sendiri mbak jadi pendamping kayak mendorong</p>	<p>“Dari awal pendamping berusaha memupuk inisiatif pengambilan keputusan dan memang mereka kita bantu, kita memberikan stimulus biar mereka bisa mengucapkan sendiri keinginannya mereka seperti apa, mereka sendiri yang minta. Dan biasanya kalau mereka sendiri yang minta kebanyakan lebih berhasil lagi”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“PD hanya membantu mendorong KRTP untuk bisa mengutarakan apa yang diinginkan, mengutarakan semua masalah atau problem yang sedang dihadapi dan bagaimana KRTP mengambil keputusan tersebut”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“Dari awal kita dibantu agar bisa mengutarakan keinginan kita sendiri mbak, jadi pendamping mendorong kita biar kita itu berani ngomong, apalagi kalau di forum pokmas, karena memang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping memberikan stimulus pada KRTP untuk dapat mengambil keputusan secara mandiri. Seperti memilih bantuan usaha apa. - Seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan termasuk pengambilan keputusan bupati, camat, DPRD dan perguruan tinggi, untuk mengalokasikan kegiatan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas. 	<p>Pendamping hanya mendorong atau memberikan stimulus kepada KRTP untuk dapat mengambil keputusan secara mandiri, mengenai bantuan barang yang akan diberikan sebagai usaha produktif. Dalam taraf pemerintahan juga diharapkan seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam pengambilan keputusan bupati, camat, DPRD dan perguruan tinggi untuk dapat mengalokasikan kegiatan pengentasan</p>
--	---	---	--	--

	<p>kita biar kita itu berani ngomong, apalagi kalau di forum pokmas gitu ya, karena memang awal-awal itu malu dan takut mau saran atau kasih masukan tapi lambat laun sudah terbiasa dan berani mengutarakan keinginan”. (SI: 24 Maret 2019)</p> <p>“Kita dibantu dengan pendamping untuk pengusulan bantuan usaha, jadi sangat membantu sekali karena membuka pemikiran kita yang kadang masih bingung mau usaha apa, kita diberi dorongan yang pada akhirnya kita bisa memberikan keputusan mengenai usulan bantuan”. (RH : 24 Maret 2019)</p> <p>“Kemarin kan ada yang ingin dibelikan kulkas terus kita memberikan pertimbangan-pertimbangan juga seperti, ibu minta kulkas buat jualan minuman-minuman, es batu dan gorengan, supaya nanti tidak beli</p>	<p>awal-awal malu dan takut mau saran atau kasih masukan tapi lambat laun sudah terbiasa dan berani mengutarakan keinginan”. (SI: 24 Maret 2019)</p> <p>“Kita dibantu dengan pendamping untuk pengusulan bantuan usaha, jadi sangat membantu sekali karena membuka pemikiran kita yang masih bingung mau usaha apa, kita diberi dorongan yang pada akhirnya kita bisa memberikan keputusan mengenai usulan bantuan”. (RH : 24 Maret 2019)</p> <p>“Kemarin ada yang ingin dibelikan kulkas, kita memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti, ibu minta kulkas buat jualan minuman-minuman, es batu dan gorengan, supaya nanti tidak beli es batu diluar, kita memberi pertimbangan listriknya ibu berapa agar tidak memberatkan kedepannya karena bantuan ini untuk meringankan</p>	<p>kemiskinan menjadi salah satu prioritas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan memenuhi kegiatan kelestarian dan pengambilan kebijakan.</p>
--	--	--	---

	<p>es batu diluar, kita memberi pertimbangan listriknya ibu berapa agar tidak memberatkan kedepannya karena bantuan ini untuk meringankan bukan untuk memberatkan, dikasih pengetahuan juga kalau nanti langsung di iyakan tanpa diberi pertimbangan-pertimbangan iya kalau nanti bisa ngangkat listrik dirumahnya, nanti kalau misal malah kena listriknya banyak kan jadi memberatkan. Sampean pikir-pikir kalau mau minta bantuan ini, ada yang minta bantuan sepeda motor buat apa? Buat belanja gitu katanya, kita memberi pertimbangan kembali apakah modal ibu sudah cukup kalau belum ya didahulukan modal usahanya dulu, kalau buat sepeda ya uangnya buat sepeda motor aja buk tidak cukup meskipun sepeda kan kita juga harus mikir kedepannya sepeda juga harus tetep hidup seperti surat-suratnya kan bayar lagi buat bayar pajak dan lain-lain</p>	<p>bukan untuk memberatkan, dikasih pengetahuan juga kalau nanti langsung di iyakan tanpa diberi pertimbangan-pertimbangan, iya kalau nanti bisa ngangkat listrik dirumahnya, nanti kalau misal malah kena listriknya banyak kan jadi memberatkan. Pikir-pikir kalau mau minta bantuan ini, ada yang minta bantuan sepeda motor buat apa? Buat belanja gitu katanya, kita memberi pertimbangan kembali apakah modal ibu sudah cukup kalau belum ya didahulukan modal usahanya dulu, kalau buat sepeda ya uangnya buat sepeda motor aja buk tidak cukup meskipun sepeda kan kita juga harus mikir kedepannya sepeda juga harus tetep hidup seperti surat-suratnya kan bayar lagi buat bayar pajak dan lain-lain kan bisa memberatkan nantinya jadi lebih baik pakai sepeda kecil saja, separuh dari pembelian sepeda bisa dipakai buat modal gitu dan mereka merespon oh iya juga ya</p>		
--	--	---	--	--

	<p>kan bisa memberatkan nantinya jadi lebih baik pakai sepeda kecil saja monggo, separuh dari pembelian sepeda bisa dipakai buat modal gitu dan mereka merespon oh iya juga ya gitu. Kan kita mikir keberlanjutannya gitu. Tapi KRTP memang kita dorong terus untuk inisiatif sendiri untuk pengambilan keputusan”. (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>“Setelah sosialisasi diharapkan seluruh stakeholder seluruh pemangku kepentingan termasuk pengambilan keputusan bupati, camat, DPRD, kemudian perguruan tinggi itu bisa mengalokasikan bisa menempatkan kegiatan pengentasan kemiskinan PFK ini menjadi salah satu prioritas. Dalam mengambil keputusan mereka jadi pertimbangan utama kegiatan atau program yang akan dilakukan oleh kabupaten, kecamatan atau desa, ketika ingin mengganggu kegiatan,</p>	<p>gitu. Kan kita mikir keberlanjutannya gitu. Tapi KRTP memang kita dorong terus untuk inisiatif sendiri untuk pengambilan keputusan”. (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>“Setelah sosialisasi diharapkan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan termasuk pengambilan keputusan bupati, camat, DPRD, kemudian perguruan tinggi itu bisa mengalokasikan dan menempatkan kegiatan pengentasan kemiskinan PFK ini menjadi salah satu prioritas. Dalam mengambil keputusan mereka jadi pertimbangan utama kegiatan atau program yang akan dilakukan oleh kabupaten, kecamatan atau desa, ketika ingin mengganggu kegiatan, pertama yang harus dipikirkan adalah bagaimana KRTP meningkat kesejahteraanya. Jadi dengan sosialisasi itu kita memberikan penjelasan pada bupati bahwa ada</p>		
--	--	--	--	--

	<p>pertama yang harus dipikirkan adalah bagaimana KRTP meningkat kesejahteraanya. Jadi dengan sosialisasi itu kita memberikan penjelasan pada bupati bahwa ada kegiatan program PFK yang tujuannya ini, sehingga beliau mendapatkan masukan input untuk memenuhi kegiatan kelestarian ini kalau ambil keputusan, tapi kalau pengambilan keputusan itu macam-macam kalau menurut pandangan saya sih lebih cenderung ke keputusan dalam pengambilan kebijakan”. (EP : 13 Maret 2019)</p>	<p>kegiatan program PFK yang tujuannya ini, sehingga beliau mendapatkan masukan input untuk memenuhi kegiatan kelestarian ini kalau ambil keputusan, tapi kalau pengambilan keputusan itu macam-macam kalau menurut pandangan saya sih lebih cenderung ke keputusan dalam pengambilan kebijakan”. (EP : 13 Maret 2019)</p>		
<p>Penerapan Metode <i>Casework</i></p>	<p>“Ya dalam proses pendampingan program ini pendamping menggunakan salah satu metode individu, gunanya itu untuk mempermudah proses pendampingan saja, misalnya pada tahap klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP pendamping menggunakan metode individu</p>	<p>“Pendamping menggunakan salah satu metode individu, gunanya itu untuk mempermudah proses pendampingan saja, misalnya pada tahap klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP pendamping menggunakan metode individu artinya pendamping dan KRTP saja, kita datang kerumah-rumah KRTP, biasanya kita memberikan</p>	<p>- Pendamping menggunakan metode individu, agar RTS dapat beradaptasi sosial dan mengembalikan fungsinya dengan cara datang kerumah-rumah KRTP satu persatu.</p>	<p>Pendamping menggunakan metode individu untuk mempermudah proses pendampingan kepada KRTP yang dilakukan langsung dari rumah kerumah</p>

	<p>artinya pendamping dan KRTP saja, kita datang kerumah-rumah KRTP, biasanya itu kita memberikan masukan, pengetahuan atau gambaran secara langsung agar KRTP itu merasa jelas.” (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>“Metode yang pendamping melakukan adalah metode individu yang gunanya itu untuk membantu KRTP agar dapat beradaptasi sosial, dan mengembalikan fungsinya sebagai makhluk sosial dengan cara berbicara secara langsung kepada KRTP.” (MA: 24 Maret 2019)</p> <p>“Awalnya pada saat itu kita didatangi sama pendamping desa, kita ditanya soal bantuan yang nantinya akan diberikan itu kita minta apa, kalau saya kan sudah jualan dari dulu jadi saya minta penambahan modal aja buat ngisi warung. Tapi ada juga</p>	<p>masukan, pengetahuan atau gambaran secara langsung agar KRTP itu merasa jelas.” (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>“Pendamping melakukan metode individu yang gunanya itu untuk membantu KRTP agar dapat beradaptasi sosial, dan mengembalikan fungsinya sebagai makhluk sosial dengan cara berbicara secara langsung kepada KRTP.” (MA: 24 Maret 2019)</p> <p>“Kita didatangi sama pendamping desa, kita ditanya soal bantuan yang nantinya akan diberikan itu kita minta apa, kalau saya kan sudah jualan dari dulu jadi saya minta penambahan modal aja buat ngisi warung. Tapi ada juga KRTP yang belum punya usaha karena memang tiap harinya kerjanya di sawah, ada yang bingung juga mau diberikan bantuan apa sampai ada yang</p>	<p>- KRTP yang didatangi oleh pendamping mengajukan keinginannya.</p>	<p>KRTP satu persatu. Gunanya agar KRTP dapat beradaptasi sosial dan mengembalikan fungsinya sebagai makhluk sosial dengan diajak berbicara secara langsung. Misalnya KRTP yang sudah mempunyai usaha, ketika didatangi oleh pendamping, KRTP langsung mengutarakan keinginannya mengenai bantuan usaha apa yang akan diberikan.</p>
--	--	--	---	--

	<p>KRTP yang belum punya usaha karena memang tiap harinya kerjanya di sawah, ada yang bingung juga mau diberikan bantuan apa sampai ada yang pasrah mau dikasih apa aja boleh. Tapi setahu saya bu Sq selalu bantu KRTP untuk pemecahan masalah misalnya yang masih bingung soal usaha apa yang sesuai sama KRTP.” (SI: 24 Maret 2019)</p> <p>“Waktu itu pada saat pendataan jenis usulan usaha, pendamping datang kerumah saya menanyakan, saya ingin bantuannya dirupakan menjadi apa, dengan beberapa pertimbangan dibantu oleh pendamping dan karena saya ada sedikit halaman didepan rumah jadi saya ingin membuka warung makan saja”. (RH : 24 Maret 2019)</p>	<p>pasrah mau dikasih apa aja boleh. Tapi setahu saya bu SQ selalu bantu KRTP untuk pemecahan masalah misalnya yang masih bingung soal usaha apa yang sesuai sama KRTP.” (SI: 24 Maret 2019)</p> <p>“Waktu pendataan jenis usulan usaha, pendamping datang kerumah saya menanyakan, saya ingin bantuannya dirupakan menjadi apa, dengan beberapa pertimbangan dibantu oleh pendamping dan karena saya ada sedikit halaman didepan rumah jadi saya ingin membuka warung makan saja”. (RH : 24 Maret 2019)</p>		
--	--	--	--	--

<p>Penerapan Metode <i>Casework</i> :</p> <p>1. Tahap Intake</p> <p>a. Sosialisasi</p>	<p>“Kita dari kabupaten ada sosialisasi kabupaten dulu, baru setelah itu ke tingkat kecamatan, kalau dalam satu kecamatan ada dua desa baru kita ke desa-desanya untuk sosialisasi, jadi di desa memberi tau kalau didesa sudah mendapatkan bantuan PFK pasti tidak hanya pengajuan itu harus kita kasih keterangan apa itu PFK karena kadang masih kurang respek mau dapat bantuan ini kadang responnya itu “oalah bantuan opo maneh iki mbak, kakean ruwet-ruwet” itu biasanya di desa, kalau kecamatan selalu welcome kalau desa banyak yang seperti itu, “wes mbak ribet-ribet i” “loh endak pak” ya disitu kita terangkan kita sosialisasikan dan jelaskan kegiatannya seperti apa, ini nanti siapa yang mengerjakan di desa, itu kita jelaskan jadi perannya desa itu apa kepala desa itu untuk apa”. (LY: 22 Februari 2019)</p>	<p>“Ada sosialisasi kabupaten dulu, baru setelah itu ke tingkat kecamatan, kalau dalam satu kecamatan ada dua desa baru kita ke desa-desanya untuk sosialisasi, memberi tau kalau didesa sudah mendapatkan bantuan PFK pasti tidak hanya pengajuan, kita kasih keterangan apa itu PFK karena kadang masih kurang respek mau dapat bantuan kadang responnya itu “oalah bantuan opo maneh iki mbak, kakean ruwet-ruwet” itu biasanya di desa, kalau kecamatan selalu welcome. Disitu kita terangkan kita sosialisasikan dan jelaskan kegiatannya seperti apa, ini nanti siapa yang mengerjakan di desa, itu kita jelaskan jadi perannya desa itu apa kepala desa itu untuk apa”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“Salah satu peran DPMD adalah sebagai fasilitator tingkat kabupaten yang pertama memberikan sosialisasi tentang program PFK, tujuan sosialisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping berperan sebagai fasilitator. - Sosialisasi dilakukan dari tingkat kabupaten dulu, kedua tingkat kecamatan baru ke tingkat desa. 	<p>Tahap sosialisasi pendamping berperan sebagai fasilitator tingkat kabupaten yang pertama untuk memberikan sosialisasi, yang kemudian dilanjut sosialisasi tingkat kecamatan dan terakhir pada tingkat desa yang gunanya adalah untuk memberikan pemahaman yang sama kepada semua stakeholder pelaksana kegiatan dari pengambilan kebijakan pada tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Tujuannya</p>
--	--	--	--	---

	<p>“Jadi salah satu peran DPMD adalah sebagai fasilitator tingkat kabupaten yang pertama memberikan sosialisasi tentang program PFK, tujuan sosialisasi memberi pemahaman yang sama kepada semua stakeholder pelaksana kegiatan dari pengambilan kebijakan pada tingkat kabupaten kemudian camat sampai pemerintah desa, tema sama tujuannya bersama langkah bersama biar nanti lancar kegiatannya”. (EP: 13 Maret 2019)</p>	<p>memberi pemahaman yang sama kepada semua stakeholder pelaksana kegiatan dari pengambilan kebijakan pada tingkat kabupaten kemudian camat sampai pemerintah desa, tema sama tujuannya bersama langkah bersama biar nanti lancar kegiatannya”. (EP: 13 Maret 2019)</p>		<p>melangkah bersama-bersama agar kegiatan kedepannya lancar.</p>
<p>b. Pra rembug warga & rembug warga</p>	<p>“Pra rembug warga untuk menjalankan pada tingkat desa ya mulai dari pembentukan sekretariat desa, kemudian membentuk atau menunjuk PD, dan fasilitatornya itu DPMD dengan pendamping kabupaten” (EP : 13 Maret 2019)</p> <p>“Setelah tahap sosialisasi baru</p>	<p>“Pra rembug menjalankan pada tingkat desa mulai dari pembentukan sekretariat desa, kemudian membentuk atau menunjuk PD, fasilitatornya itu DPMD dan pendamping kabupaten” (EP : 13 Maret 2019)</p> <p>“Setelah perkenalan kita melakukan tahapan pra rembug</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap pra rembug pembentukan sekretariat desa dan membentuk pendamping desa. - Pendamping menyampaikan pagu mengenai jumlah KRTP dan jumlah bantuan per KRTP dua juta 	<p>Tahapan pra rembug warga adalah tahap pembentukan dan penetapan sekretariat desa dan pendamping desa, serta menyampaikan jumlah KRTP</p>

	<p>kita turun ke desa melakukan namanya silaturahmi atau perkenalan, setelah perkenalan kita melakukan tahapan pra rembug warga. Kita menentukan siapa sekretariat desa dan siapa pendamping desa dan kita juga menyampaikan pagu, jumlah KRTP apabila kurang dari dua puluh pendamping desanya cukup satu kalau lebih dari dua puluh pendamping desanya dua. Desa Bulurejo ada sebanyak 22 KRTP jadi pendamping desanya dua. Kita juga menyampaikan bahwa di desa mendapatkan BOP sesuai aturan pedum juga. Kita juga menyampaikan bahwa bantuan yang kita berikan ini berupa barang yang nominalnya sebesar dua setengah juta rupiah”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“Dalam tahap ini selain sosialisasi mengenai program dan pembentukan sekretariat desa dan PD, juga menjelaskan</p>	<p>warga. Kita menentukan siapa sekretariat desa dan siapa pendamping desa dan kita juga menyampaikan pagu, jumlah KRTP apabila kurang dari dua puluh pendamping desanya cukup satu kalau lebih dari dua puluh pendamping desanya dua. Desa Bulurejo ada sebanyak 22 KRTP jadi pendamping desanya dua. Kita juga menyampaikan bahwa di desa mendapatkan BOP sesuai aturan pedum juga. Kita juga menyampaikan bahwa bantuan yang kita berikan ini berupa barang yang nominalnya sebesar dua setengah juta rupiah”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“Dalam tahap ini selain sosialisasi mengenai program dan pembentukan sekretariat desa dan PD, juga menjelaskan Sasaran dalam program bantuan PFK ini, kita menjaring atau memverifikasi kira-kira dari nama-nama yang sudah diberikan dari provinsi, mana yang layak</p>	<p>lima ratus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memverifikasi nama-nama yang sudah diberikan dari provinsi mana yang masih layak dan tidak layak. - Rembug warga adalah sosialisasi tingkat desa, mengenalkan sekretariat desa dan pendamping desa serta memastikan BKK sudah dianggarkan dalam APBDesa. - Pelaksana dari sekretariat desa difasilitasi pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. - Pendamping wajib menyusun rencana kegiatan program. - Pendamping desa 	<p>yang berdampak pada jumlah pendamping desa. Apabila KRTP lebih dari dua puluh maka pendamping desanya dua. Dengan bantuan yang diberikan per KRTP sejumlah dua juta lima ratus. Pendamping memverifikasi nama-nama dari provinsi kira-kira mana yang masih layak dan yang sudah tidak layak, sesuai dengan versi pemerintah desa dan sekretariat desa karena mereka yang tau kondisi secara faktual di desanya. Rembug</p>
--	---	--	--	---

	<p>Sasaran dalam program bantuan PFK ini, nah disitu kita menjaring atau memverifikasi kira-kira dari nama-nama yang sudah diberikan dari provinsi, mana yang layak dan yang tidak layak sesuai dengan versi pemerintah desa dan sekretariat desa. Nah siapa yang diundang yaitu pemerintah desa terus tingkat kecamatan yang diundang kasi DPMD terus perwakilan dari KRTP dan juga RT/RW setempat yang ada KRTP nya nah disitu kan mereka pasti tau kondisi faktual dari KRTP kita mengacu kepada kondisi faktual bukan karena itu kelihatannya rumah itu bagus dan berada, rumah itu enggak tidak kita mengacu pada kondisi faktual dilapangan yang mana memang benar-benar terjadi". (LY: 22 Februari 2019).</p> <p>"Pra rembug yang menentukan siapa yang jadi pendampingnya siapa sekretariatnya juga</p>	<p>dan yang tidak layak sesuai dengan versi pemerintah desa dan sekretariat desa, yang diundang yaitu pemerintah desa, tingkat kecamatan, kasi DPMD, perwakilan dari KRTP dan juga RT/RW setempat yang ada KRTP nya disitu mereka pasti tau kondisi faktual dari KRTP kita mengacu kepada kondisi faktual bukan karena itu kelihatannya rumah itu bagus dan berada, rumah itu enggak, tidak kita mengacu pada kondisi faktual dilapangan yang mana memang benar-benar terjadi". (LY: 22 Februari 2019).</p> <p>"Pra rembug menentukan siapa yang jadi pendampingnya siapa sekretariatnya juga ditentukan integritasnya. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>"Rembug warga dilaksanakan sebagai media untuk sosialisasi</p>	<p>dan pendamping kabupaten menyampaikan data by name by address dalam pelaksanaan verifikasi. Salah satu kriterianya RTS belum menerima bantuan dari program lainnya.</p> <p>- Penyuluhan kepada RTS mengenai dana bantuan yang akan diterima.</p>	<p>warga dilaksanakan untuk sosialisasi tingkat desa, menjelaskan kepada masyarakat mengenai program PFK serta memastikan bahwa BKK sudah dianggarkan dalam APBDesa. Pendamping desa wajib untuk menyusun rencana kegiatan dari kapan klarifikasi, kapan usulan kebutuhan hingga tahap monev. Pendamping desa memimpin rembug dalam tahap verifikasi serta</p>
--	---	--	---	--

	<p>ditentukan integritasnya juga habis itu kalau sudah deal sudah ditentukan ketuanya siapa wakilnya siapa, bendahara dan sekeretaris nya siapa dan anggotanya siapa. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Rembug warga dilaksanakan sebagai media untuk sosialisasi PFK di tingkat desa, rembug warga juga menjelaskan kepada Stakeholder mengenai program PFK itu seperti apa ya, mensosialisasikan Sekretariat Desa dan Pendamping Desa, sekaligus memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sudah dianggarkan dalam APBDesa. Rembug warga ini di ikuti dari unsur, sekretariat desa, BPD, kasun lokasi KRTP, perwakilan KRTP, tokoh masyarakat dan pendamping desa dan dapat mengundang perwakilan RT/RW juga dari lokasi KRTP”. (SQ: 24 Maret 2019)</p>	<p>PFK di tingkat desa, rembug warga menjelaskan kepada Stakeholder mengenai program PFK itu seperti apa, mensosialisasikan Sekretariat Desa dan Pendamping Desa, sekaligus memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sudah dianggarkan dalam APBDesa. Rembug warga ini di ikuti dari unsur, sekretariat desa, BPD, kasun lokasi KRTP, perwakilan KRTP, tokoh masyarakat dan pendamping desa dan dapat mengundang perwakilan RT/RW juga dari lokasi KRTP”. (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>“Pelaksanaannya dari sekretariat desa difasilitasi oleh pemerintahan desa, tim fasilitasi kecamatan dan tenaga pendamping kabupaten, dengan narasumbernya dari Dinas PMD atau tim fasilitasi kecamatan, tenaga pendamping kabupaten</p>	<p>menyampaikan data <i>by name by address</i> untuk RTS, serta menyampaikan informasi mengenai status kelayakan RTS berdasarkan kriteria program KRTP.</p>
--	---	--	---

	<p>2019)</p> <p>“Jadi dalam pelaksanaannya itu dari sekretariat desa difasilitasi oleh pemerintahan desa, tim fasilitasi kecamatan dan tenaga pendamping kabupaten, dengan narasumbernya dari Dinas PMD atau tim fasilitasi kecamatan, tenaga pendamping kabupaten dan pemerintahan desa”. (MA: 24 Maret 2019)</p> <p>“Rembug direncanakan PD dan PD wajib menyusun rencana kapan klarifikasi, kapan usulan kapan jenis-usulan itu, kita pantau terus misalnya belum masuk ya kita tanya kenapa kok gak jalan jadi kita memang memantau terus disetiap tahapan jadi dipantau terus sama DPMD”. (EP : 13 Maret 2019)</p> <p>“Jadi Pendamping kabupaten dan pendamping desa memimpin rembug warga dalam</p>	<p>dan pemerintahan desa”. (MA: 24 Maret 2019)</p> <p>“Rembug direncanakan dan PD wajib menyusun rencana kapan klarifikasi, kapan usulan kapan jenis-usulan itu, kita pantau terus misalnya belum masuk ya kita tanya kenapa kok gak jalan jadi kita memang memantau terus disetiap tahapan jadi dipantau terus sama DPMD”. (EP : 13 Maret 2019)</p> <p>“Pendamping kabupaten dan pendamping desa memimpin rembug warga dalam pelaksanaan verifikasi dan juga menyampaikan data <i>by name by address</i> untuk calon penerima bantuan. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai status kelayakan calon penerima program (KRTP) berdasarkan kriteria program,</p>		
--	---	--	--	--

	<p>pelaksanaan verifikasi. Pendamping kabupaten dan pendamping desa juga menyampaikan data <i>by name by address</i> untuk calon penerima bantuan. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai status kelayakan calon penerima program (KRTP) berdasarkan kriteria program, kriteria KRTP yang layak menjadi sasaran itu, telah bercerai, suami meninggal dunia, ditinggal suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin atau ditelantarkan, memiliki suami difabel dan atau suami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas secara produktif dan terakhir KRTP sebatang kara usia produktif yang mampu mengelola usaha dan belum menerima bantuan Jalin Matra yang lainnya yaitu BRTSM dan PK2”. (LY: 22 Februari 2019)</p>	<p>kriteria KRTP yang layak menjadi sasaran itu, telah bercerai, suami meninggal dunia, ditinggal suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin atau ditelantarkan, memiliki suami difabel dan atau suami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas secara produktif dan terakhir KRTP sebatang kara usia produktif yang mampu mengelola usaha dan belum menerima bantuan Jalin Matra yang lainnya yaitu BRTSM dan PK2”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“Rembug warganya itu menentukan KRTP, kita melakukan klarifikasi data yang diberikan oleh pusat setelah itu menyeleksi, nanti ini tidak layak, ini lebih layak, ini sudah mapan ini sudah tidak memungkinkan menerima bantuan usaha bisanya konsumtif ya ganti kan sudah tua, satu KK itu apakah ada ART apa</p>		
--	---	--	--	--

	<p>“Jadi rembug warganya itu menentukan KRTP nya, kita melakukan klarifikasi data yang diberikan oleh pusat setelah itu menyeleksi, nanti ini tidak layak, ini lebih layak, ini sudah mapan ini sudah tidak memungkinkan menerima bantuan usaha bisanya konsumtif ya ganti kan sudah tua, satu KK nya itu apakah ada ART apa tidak, kalau ada kan nantinya bisa di bantu oleh ART”. (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>“Proses verifikasi ini adalah melihat apakah orang yang akan mendapatkan bantuan program ini itu benar-benar miskin atau janda, dan ada penyuluhan terkait dengan dana bantuan yang nantinya akan diterima. Bahwa bantuan yang akan diterima nanti itu berupa bantuan modal usaha”. (MA : 24 Maret 2019)</p>	<p>tidak, kalau ada kan nantinya bisa di bantu oleh ART”. (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>“Proses verifikasi ini adalah melihat apakah orang yang akan mendapatkan bantuan program benar-benar miskin atau janda, dan ada penyuluhan terkait dengan dana bantuan yang nantinya akan diterima. Bahwa bantuan yang akan diterima nanti itu berupa bantuan modal usaha”. (MA : 24 Maret 2019)</p>		
Penerapan	“Prosesnya pendamping desa	“Pendamping desa dengan	- Pendamping	Pendamping desa

<p>Metode Casework : 2. Tahap Asassment a. Klarifikasi & identifikasi usulan kebutuhan KRTP</p>	<p>dengan pendamping kabupaten melakukan koordinasi untuk menyiapkan daftar nama calon para KRTP sasaran yang sudah berdasarkan hasil verifikasi, selanjutnya menyiapkan form instrumen klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP, dan setelah itu membagi lokasi tugas klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP. Setelah kita pendamping melakukan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan baru kita terjun ke KRTP nah setelah rembug warga itu nanti pendamping desa turun dari rumah kerumah seperti biasa membawa dua blanko nanti satunya identifikasi satunya klarifikasi kebutuhan. Disitu kita melihat sejauh mana kebutuhannya KRTP apa saja. Jadi klarifikasi dan identifikasi itu membutuhkan waktu cukup lama, kadang itu gak datang satu kali bahkan bisa dua kali tiga kali biar tepat sasaran</p>	<p>pendamping kabupaten melakukan koordinasi untuk menyiapkan daftar nama calon para KRTP sasaran yang sudah berdasarkan hasil verifikasi, selanjutnya menyiapkan form instrumen klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP, setelah itu membagi lokasi tugas klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP. Pendamping terjun ke KRTP setelah rembug warga nanti pendamping desa turun dari rumah kerumah seperti biasa membawa dua blanko, satunya identifikasi satunya klarifikasi kebutuhan. Kita melihat sejauh mana kebutuhannya KRTP apa saja. Jadi klarifikasi dan identifikasi itu membutuhkan waktu cukup lama, kadang itu gak cukup datang satu kali bahkan bisa dua kali tiga kali biar tepat sasaran gitu, jadi pendamping desa tidak hanya menyampaikan program tapi juga memberi motivasi membuka wawasan”.</p>	<p>menyiapkan daftar nama calon KRTP yang sudah terverifikasi. - Pendamping menyiapkan instrumen klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP. Dan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah KRTP. - KRTP yang tidak memenuhi persyaratan akan dilakukan pergantian RTS. - Pendamping desa difasilitasi pendamping kabupaten untuk melakukan input data bantuaan usaha produktif KRTP.</p>	<p>dan kabupaten menyiapkan daftar nama calon KRTP hasil verifikasi, selanjutnya pendamping menyiapkan form instrumen klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan. Pendamping melakukan kunjungan secara langsung dari rumah kerumah KRTP dan mendata KRTP sasaran apakah sudah sesuai kriteria, apabila tidak sesuai akan dilakukan pengajuan pergantian sesuai dengan prosedur ketentuan.</p>
---	--	---	--	---

	<p>gitu, jadi pendamping desa tidak hanya menyampaikan program tapi juga memberi motivasi membuka wawasan”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“Jadi PD menyiapkan perangkat observasi lapangan seperti peralatan tulis, instrumen klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan form instrumen yang sudah ada. pendamping desa melakukan kunjungan langsung ke rumah tangga sasaran untuk melakukan klarifikasi kelayakan KRTP dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan form instrumen. PD juga difasilitasi oleh pendamping kabupaten untuk melakukan input data hasil klarifikasi dan identifikasi pada usulan kebutuhan, jadi nantinya setiap KRTP akan ditanyakan kira-kira nanti akan membuka usaha apa, dalam pendataan ini juga ada dokumentasi yang</p>	<p>(LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“PD menyiapkan perangkat observasi lapangan seperti peralatan tulis, instrumen klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan form instrumen yang sudah ada. pendamping desa melakukan kunjungan langsung ke rumah tangga sasaran untuk melakukan klarifikasi kelayakan KRTP dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan form instrumen. PD difasilitasi oleh pendamping kabupaten untuk melakukan input data hasil klarifikasi dan identifikasi pada usulan kebutuhan, jadi nantinya setiap KRTP akan ditanyakan kira-kira nanti akan membuka usaha apa, dalam pendataan ini juga ada dokumentasi yang nantinya akan dikirim ke pemerintah Provinsi. Tapi biasanya ada saja RTS yang tidak bisa untuk membuka usaha jadi</p>	<p>Pendamping difasilitasi oleh pendamping kabupaten untuk melakukan input data hasil klarifikasi dan identifikasi pada usulan kebutuhan, jadi KRTP menanyakan kira-kira KRTP ingin membuka usaha produktif apa.</p>
--	--	---	--

	<p>nantinya akan dikirim ke pemerintah Provinsi. Tapi biasanya ada saja RTS yang tidak bisa untuk membuka usaha jadi solusi dari pemerintah desa atau PD ditanyakan terlebih dahulu bisanya apa, kalau RTS bisanya bertenak ayam atau kambing jadi dana bantuannya dirupakan ternak tersebut jadi memang tergantung dengan keahlian yang dipunya oleh RTS.” (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Jadi kegiatan ini itu untuk memastikan ke calon sasaran hasil verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP masih layak untuk memperoleh bantuan apa tidak. Tapi apabila ada calon KRTP yang tidak memenuhi persyaratan maka dilakukan pergantian RTS dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam kegiatan verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP dengan kriteria calon KRTP yang layak</p>	<p>solusi dari pemerintah desa atau PD ditanyakan terlebih dahulu bisanya apa, kalau RTS bisanya bertenak ayam atau kambing jadi dana bantuannya dirupakan ternak tersebut jadi memang tergantung dengan keahlian yang dipunya oleh RTS.” (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Kegiatan ini untuk memastikan ke calon sasaran hasil verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP masih layak untuk memperoleh bantuan apa tidak. Tapi apabila ada calon KRTP yang tidak memenuhi persyaratan maka dilakukan pergantian RTS dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam kegiatan verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP dengan kriteria calon KRTP yang layak memenuhi syarat itu seperti suami sudah meninggal, bercerai, ditinggal oleh suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan</p>		
--	--	---	--	--

	memenuhi syarat itu seperti suami sudah meninggal, bercerai, ditinggal oleh suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah, memiliki suami difabel atau suami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktivitas yang produktif". (SQ: 24 Maret 2019)	nafkah, memiliki suami difabel atau suami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktivitas yang produktif". (SQ: 24 Maret 2019)		
<p>Penerapan Metode <i>Casework</i> :</p> <p>3. Tahap Planning</p> <p>a. Pengajuan pencairan dana BKK pada KRTP</p>	<p>"Sekretariat kabupaten dengan kita pendamping kabupaten melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas pencairan dana dan apabila berkas sudah dinyatakan lengkap dan semua benar, segera membuat surat pengantar dan pengajuan pencairan dana pada Gubernur yang ditandatangani sama kepala DPMD kabupaten". (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>"Untuk pengajuannya sesuai dengan dipedum ya mengenai surat-surat apa yang harus dilengkapi, apa saja yang</p>	<p>"Sekretariat kabupaten dengan kita pendamping kabupaten melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas pencairan dana dan apabila sudah dinyatakan lengkap dan semua benar, segera membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana pada Gubernur yang ditandatangani sama kepala DPMD kabupaten". (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>"Untuk pengajuannya sesuai dengan dipedum mengenai surat-surat apa yang harus dilengkapi, apa saja yang dibutuhkan dicetak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat kabupaten dan pendamping kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana. - Pendamping desa memfasilitasi untuk mengurus dokumen pencairan kepada tingkat kabupaten yang akan disampaikan ke tingkat provinsi 	<p>Pendamping desa memfasilitasi pengurusan dokumen pencairan dana ke tingkat kabupaten yang nantinya akan disampaikan ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Persyaratan dokumen pencairan BKK ke kabupaten yaitu, surat permohonan pengajuan</p>

	<p>dibutuhkan dicetak apa yang perlu dari kepala desa kita yang membantu yang maju mengurus terutama yang mondar mandiri ke DPMD juga pendamping desa”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Pengajuan pencairan BKK dilakukan oleh pemerintah yang disampaikan pada Gubernur Jawa Timur yang melalui DPMD Provinsi Jawa Timur. persyaratan untuk dokumen pencairan BKK pada kabupaten, surat permohonan pengajuan BKK yang dari Bupati kepada Gubernur, terus kwitansi yang jumlahnya sesuai dengan jumlah BKK, fotocopy DPA dan fotocopy rekening kas daerah, itu semua harus rangkap dua”. (EP : 13 Maret 2019)</p> <p>“Jadi pengajuan pencairan BKK ditingkat desa, pemerintah desa</p>	<p>apa yang perlu dari kepala desa kita yang membantu maju mengurus terutama yang mondar mandiri ke DPMD juga pendamping desa”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Pengajuan pencairan BKK dilakukan oleh pemerintah yang disampaikan pada Gubernur Jawa Timur melalui DPMD Provinsi Jawa Timur. persyaratan untuk dokumen pencairan BKK pada kabupaten, surat permohonan pengajuan BKK dari Bupati kepada Gubernur, terus kwitansi yang jumlahnya sesuai dengan jumlah BKK, fotocopy DPA dan fotocopy rekening kas daerah, itu semua harus rangkap dua”. (EP : 13 Maret 2019)</p> <p>“Pengajuan pencairan BKK ditingkat desa, pemerintah desa mengajukan surat permohonan pencairan pada Gubernur Jatim yang diketahui oleh kepala</p>	<p>Jawa Timur.</p> <p>- Yang disiapkan dalam tahap ini menyiapkan rencana anggaran dan biaya, jadwal kegiatan, keputusan kepala desa mengenai sekretariat desa dan pendamping kades mengenai penerimaan bantuan.</p>	<p>pencairan BKK dari bupati ke gubernur, kwitansi sejumlah BKK, rencana anggaran dan biaya, jadwal kegiatan keputusan kepala desa mengenai sekretariat desa dan pendamping kades mengenai bantuan, fotocopy DPA dan fotocopy rekening kas daerah dan lain sebagainya. Selanjutnya verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana bantuan dilakukan oleh sekretariat kabupaten dan pendamping</p>
--	---	---	--	---

	<p>mengajukan surat permohonan pencairan pada Gubernur Jatim yang diketahui oleh kepala DPMD. Jadi kita menyiapkan rencana anggaran dan biaya, jadwal kegiatannya, terus keputusan kepala desa tentang sekretariat desa dan pendamping desa, keputusan kepala desa tentang penerimaan bantuan JM PFK, surat tanggung jawab mutlak integritas kades dan ketua sekretariat yang bermaterai 6000, terus juga menyiapkan kwitansi, fotocopy SK pengangkatan kepala desa yang dilegalisir, fotocopy pengangkatan bendahara desa itu juga dilegalisir, fotocopy KTP kepala desa dan bendahara, fotocopy rekening kas desa di bank Jatim sama bank Jombang terus surat pernyataan dari kepala desa tentang rekening resmi kas desa, rekeningnya yang masih aktif ya dan bermaterai, terus</p>	<p>DPMD. Kita menyiapkan rencana anggaran dan biaya, jadwal kegiatannya, keputusan kepala desa tentang sekretariat desa dan pendamping desa, keputusan kepala desa tentang penerimaan bantuan JM PFK, surat tanggung jawab mutlak integritas kades dan ketua sekretariat yang bermaterai 6000, terus juga menyiapkan kwitansi, fotocopy SK pengangkatan kepala desa yang dilegalisir, fotocopy pengangkatan bendahara desa itu juga dilegalisir, fotocopy KTP kepala desa dan bendahara, fotocopy rekening kas desa di bank Jatim sama bank Jombang terus surat pernyataan dari kepala desa tentang rekening resmi kas desa, rekeningnya yang masih aktif dan bermaterai, terus fotocopy NPWP pemerintah desa sama fotocopy APBDesa. Jadi itu semua pendamping desa di bantu dengan sekretariat desa dan pendamping kabupaten mangkannya kita juga bolak balik</p>		<p>kabupaten baru setelah itu diajukan ke gubernur Jawa Timur dengan mengetahui kepala DPMD kabupaten.</p>
--	--	--	--	--

	fotocopy NPWP pemerintah desa sama fotocopy APBDesa. Jadi itu semua pendamping desa di bantu dengan sekretariat desa dan pendamping kabupaten mangkanya kita juga bolak balik ke DPMD buat ngurusi itu semua” (SQ : 24 Maret 2019)	ke DPMD buat ngurusi itu semua” (SQ : 24 Maret 2019)		
b. Rembug pokmas persiapan realisasi bantuan	“Proses kegiatan dalam rembug pokmas realisasi bantuan meliputi pendamping desa menyelenggarakan rembug pokmas yang difasilitasi oleh sekretariat desa dan pendamping kabupaten. PD juga mempersiapkan bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan rembug pokmas itu kayak daftar hadir peserta, daftar nama KRTP beserta rincian usulan kebutuhan, tempat pelaksanaan rembug pokmas yang berada dilingkungan tempat tinggal KRTP, Form review usulan kebutuhan belanja KRTP dan	“Kegiatan dalam rembug pokmas realisasi bantuan meliputi pendamping desa menyelenggarakan rembug pokmas yang difasilitasi oleh sekretariat desa dan pendamping kabupaten. PD juga mempersiapkan bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan rembug pokmas kayak daftar hadir peserta, daftar nama KRTP beserta rincian usulan kebutuhan, tempat pelaksanaan rembug pokmas yang berada dilingkungan tempat tinggal KRTP, Form review usulan kebutuhan belanja KRTP dan dokumentasi. Disini PD juga	<ul style="list-style-type: none"> - Rembug pokmas persiapan realisasi bantuan difasilitasi oleh sekretariat desa dan pendamping desa. - Pendamping menjelaskan tujuan adanya rembug pokmas kepada KRTP. - Pendamping desa dibantu oleh pendamping kabupaten melakukan review usulan kebutuhan KRTP. 	Tahap rembug pokmas persiapan realisasi bantuan difasilitasi oleh pendamping desa dan sekretariat desa, yang menjelaskan tujuan tahapan ini adaalh untuk persiapan realisasi bantuan, dan musyawarah bersama mengenai keputusan pendistribusian barang bantuan kepada KRTP,

	<p>dokumentasi. Disini PD juga menjelaskan mengenai tujuan diadakannya rembug pokmas kepada KRTP seperti apa, kita pendamping desa juga dibantu oleh pendamping kabupaten melakukan review usulan kebutuhan pada KRTP”. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Rembug pokmas itu aslinya dikumpulkan semua KRTP untuk persiapan realisasi, setelah itu kita musyawarahkan bersama dengan pokmas agar nanti bisa siap-siap ketika pengangkutan pendistribusian barang bantuan, itu persetujuan gimana bawa sendiri-sendiri atau handel jadi satu nanti diantarkan, kita berusaha agar pokmas ini dapat lebih mudah untuk membawakan barang bantuannya. Jadi ya pendamping membantu pokmas untuk dapat mencapai tujuan yang disepakati bersama”. (MA</p>	<p>menjelaskan mengenai tujuan diadakannya rembug pokmas kepada KRTP seperti apa, kita pendamping desa juga dibantu oleh pendamping kabupaten melakukan review usulan kebutuhan pada KRTP”. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Rembug pokmas itu dikumpulkan semua KRTP untuk persiapan realisasi, setelah itu kita musyawarahkan bersama dengan pokmas agar nanti bisa siap-siap ketika pengangkutan pendistribusian barang bantuan, persetujuan gimana bawa sendiri-sendiri atau handel jadi satu nanti diantarkan, kita berusaha agar pokmas dapat lebih mudah untuk membawakan barang bantuannya. Jadi ya pendamping membantu pokmas untuk dapat mencapai tujuan yang disepakati bersama”. (MA : 24 Maret 2019)</p>		<p>sembari melakukan musyawarah, pendamping desa dibantu oleh pendamping kabupaten untuk melakukan review usulan kebutuhan KRTP yang meliputi, volume, jenis, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh KRTP sehingga tepat kebutuhan dan sesuai dengan KRTP.</p>
--	--	---	--	---

	<p>: 24 Maret 2019)</p> <p>“Review terhadap rincian usulan kebutuhan KRTP itu yang meliputi jenis, volume, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh KRTP, sehingga bantuan tersebut tepat kebutuhan dan sesuai dengan kebiasaan dari KRTP. Hasil review rincian usulan kebutuhan KRTP ini juga menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan bantuan barangnya. untuk rencana tindak lanjut disepakati dalam rembuk pokmas yang berupa kegiatan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian bantuan program, yang akhirnya hasil dari review rincian usulan usaha KRTP diserahkan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya disampaikan kepada tim pengelola kegiatan (TPK) sebagai acuan pengadaan barang”. (LY: 22 Februari</p>	<p>“Review rincian usulan kebutuhan KRTP meliputi jenis volume, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh KRTP, sehingga bantuan tersebut tepat kebutuhan dan sesuai dengan kebiasaan dari KRTP. Hasil review rincian usulan kebutuhan KRTP menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan bantuan barangnya, untuk rencana tindak lanjut disepakati dalam rembuk pokmas yang berupa kegiatan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian bantuan program, yang akhirnya hasil dari review rincian usulan usaha KRTP diserahkan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya disampaikan kepada tim pengelola kegiatan sebagai acuan pengadaan barang”. (LY: 22 Februari 2019)</p>		
--	---	---	--	--

	2019)			
<p>Penerapan Metode Casework :</p> <p>4. Tahap Intervensi a. Penyerahan bantuan barang kepada KRTP</p>	<p>“Dalam tahap penyerahan bantuan barang kepada KRTP, kita memberikan informasi mengenai bantuan yang nantinya akan diberikan, kita juga memberikan arahan, motivasi atau bimbingan teknis mengenai pengelolaan usaha KRTP nantinya, dan penyerahan bantuan”. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Pelaksanaan kegiatan dalam acara penyerahan bantuan barang kepada KRTP dari sekretariat desa difasilitasi oleh pendamping kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan untuk menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan pada DPMD kabupaten soal rencana atau agenda penyerahan bantuan pada KRTP. Sekretariat desa juga difasilitasi oleh</p>	<p>“Dalam penyerahan bantuan barang kepada KRTP, kita memberikan informasi mengenai bantuan yang nantinya akan diberikan, kita juga memberikan arahan, motivasi atau bimbingan teknis mengenai pengelolaan usaha KRTP nantinya, dan penyerahan bantuan”. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Pelaksanaan kegiatan dalam penyerahan bantuan barang kepada KRTP dari sekretariat desa difasilitasi oleh pendamping kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan untuk menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan pada DPMD kabupaten soal rencana atau agenda penyerahan bantuan KRTP. Sekretariat desa juga difasilitasi oleh pendamping kabupaten menyiapkan berkas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping memberikan informasi bantuan dan berperan memberikan arahan, motivasi atau bimbingan teknis. - Sekretariat desa difasilitasi pendamping kabupaten menyiapkan berkas serah terima bantuan barang kepada KRTP, seperti berita acara penyerahan, daftar nama KRTP serta rincian barang bantuan, spanduk dan dokumentasi. - Pendamping melakukan pengecekan kembali pada 	<p>Sekretariat desa difasilitasi oleh pendamping kabupaten untuk menyiapkan berkas serah terima bantuan barang kepada KRTP seperti daftar nama KRTP beserta rincian usulan kebutuhan, tempat dilaksanakannya rembug pokmas, form review usulan kebutuhan belanja KRTP, berita acara penyerahan, spanduk dan dokumentasi. Pendamping juga memberikan informasi</p>

	<p>pendamping kabupaten untuk menyiapkan berkas serah terima bantuan barang pada KRTP seperti undangan kepada anggota pokmas, berita acara penyerahan bantuan, daftar nama-nama KRTP penerima serta rincian barang bantuan, spanduk pencairan, dan dokumentasi biasanya". (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>"Pendamping desa difasilitasi sama pendamping kabupaten untuk melakukan pengecekan kembali pada kesesuaian barang. Penyerahan bantuan barang untuk KRTP oleh pemerintah desa dibantu sama sekretariat desa, pendamping desa dan pendamping kabupaten. Pada penyerahan bantuan barang juga dihadiri oleh KRTP sendiri secara langsung atau apabila berhalangan karena ada faktor lain dan tidak memungkinkan untuk hadir bisa diwakilkan</p>	<p>serah terima bantuan barang pada KRTP seperti undangan kepada anggota pokmas, berita acara penyerahan bantuan, daftar nama KRTP penerima serta rincian barang bantuan, spanduk pencairan, dan dokumentasi biasanya". (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>"Pendamping desa difasilitasi pendamping kabupaten untuk melakukan pengecekan kembali pada kesesuaian barang. Penyerahan bantuan barang untuk KRTP oleh pemerintah desa dibantu sama sekretariat desa, pendamping desa dan pendamping kabupaten. Pada penyerahan bantuan barang juga dihadiri oleh KRTP sendiri secara langsung atau apabila berhalangan karena ada faktor lain dan tidak memungkinkan untuk hadir bisa diwakilkan oleh ART yang menjalankan usahanya nanti, penyerahan bantuan pada KRTP</p>	<p>kesesuaian barang bantuan.</p>	<p>mengenai bantuan yang akan diberikan serta berperan untuk memberikan arahan, motivasi dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan usaha. Pendamping melakukan pengecekan kembali pada kesesuaian barang, penyerahan dilakukan oleh pemerintah desa dengan dibantu oleh sekretariat desa, pendamping desa dan pendamping kabupaten dengan dihadiri oleh KRTP.</p>
--	--	--	-----------------------------------	---

	<p>oleh ART yang menjalankan usahanya nanti, dan penyerahan bantuan pada KRTP ini diserahkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak dana masuk ke rekening kas desa, penyerahan bantuan barang pada KRTP juga didokumentasikan satu persatu dengan disertai bukti tanda terima”. (MA : 24 Maret 2019)</p>	<p>diserahkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak dana masuk ke rekening kas desa, penyerahan bantuan barang pada KRTP juga didokumentasikan satu persatu dengan disertai bukti tanda terima”. (MA : 24 Maret 2019)</p>		
<p>b. Bimbingan teknis</p>	<p>“Bimtek ini perlu dilakukan untuk bisa memberikan penyuluhan, asistensi, konsultasi, bimbingan, dan fasilitasi teknis kepada KRTP penerima bantuan agar dapat memanfaatkan serta mengembangkan bantuan usaha yang sudah diberikan secara optimal. Bimtek ini berbentuk seperti bimbingan usaha, dan peningkatan sumber daya manusia, teknologi, akses pada pemasaran, manajemen atau</p>	<p>“Bimtek perlu dilakukan untuk memberikan penyuluhan, asistensi, konsultasi, bimbingan, dan fasilitasi teknis kepada KRTP agar dapat memanfaatkan serta mengembangkan bantuan usaha yang sudah diberikan secara optimal. Bimtek berbentuk seperti bimbingan usaha, dan peningkatan sumber daya manusia, teknologi, akses pada pemasaran, manajemen atau kebutuhan dan bisa berbentuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek berbentuk bimbingan usaha dan peningkatan sumber daya manusia, akses pada pemasaran atau penanganan permasalahan yang sedang terjadi. - Pendamping bekerja sama dengan PKK desa. - Bimbingan usaha membuat olahan makanan berbahan 	<p>Tahap bimtek berbentuk bimbingan usaha dan peningkatan pada sumber daya manusia, akses pada pemasaran atau penanganan permasalahan yang terjadi pada KRTP. Ditahapan bimtek pendamping bekerja sama dengan PKK desa</p>

	<p>informasi lain yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa juga berbentuk seperti resolusi konflik atau penanganan terhadap permasalahan yang sedang terjadi kepada KRTP”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“Bimtek kemaren pelatihan pengelolaan olahan makanan berbahan ikan kolaborasi atau bekerja sama dengan PD dengan PKK, olahan itu bahannya dari lele karena disini itu banyak yang ternak lele kan mudah dicari juga nah lele itu tadi diolah dijadikan nugget, abon lele, bakso lele dan kerupuk juga ada”. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Jadi dalam bimtek ini PD berusaha untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan mengembangkan usaha yang diberikan kepada KRTP, sehingga kedepannya dapat</p>	<p>seperti resolusi konflik atau penanganan terhadap permasalahan yang sedang terjadi pada KRTP”. (LY: 22 Februari 2019)</p> <p>“Bimtek kemaren pelatihan pengelolaan olahan makanan berbahan ikan bekerja sama dengan PD dengan PKK, olahan itu bahannya dari lele karena disini itu banyak yang ternak, lele itu tadi diolah dijadikan nugget, abon lele, bakso lele dan kerupuk juga ada”. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Dalam bimtek PD berusaha untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan mengembangkan usaha yang diberikan kepada KRTP, sehingga kedepannya dapat memberikan manfaat yang optimal secara ekonomi”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Kemaren waktu bimtek</p>	<p>dasar lele.</p>	<p>untuk melakukan pelatihan usaha membuat olahan makanan berbahan dasar lele dijadikan sebagai nugget, kerupuk lele, bakso atau abon.</p>
--	--	--	--------------------	--

	<p>memberikan manfaat yang optimal secara ekonomi”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Kemaren waktu bimtek itu membuat olahan makanan dari bahan dasar ikan lele mbak, terus diolah dijadikan nuget terus ada yang dijadikan kerupuk lele juga, abon juga ada, lumayan mbak bisa buat isi warung selain dijadikan lauk lele goreng bisa buat cemilannya juga biasanya nuget lele juga saya jual dengan kemasan pakek mika plastik gitu lumayan penghasilannya”. (SI : 24 Maret 2019)</p> <p>“Pelatihannya kemaren membuat olahan makanan dari bahan dasar ikan lele dibuat menjadi olahan kerupuk terus nuget, sangat bermanfaat bagi saya karena saya sebelumnya tidak tau bagaimana membuat nuget, dan sekarang saya tau dan bisa membuatnya dan saya</p>	<p>membuat olahan makanan dari bahan dasar ikan lele, diolah dijadikan nuget ada yang dijadikan kerupuk lele, abon juga ada, lumayan bisa buat isi warung selain dijadikan lauk lele goreng bisa buat cemilannya juga biasanya nuget lele juga saya jual dengan kemasan pakek mika plastik gitu lumayan penghasilannya”. (SI : 24 Maret 2019)</p> <p>“Pelatihannya kemarin membuat olahan makanan dari lele dibuat menjadi olahan krupuk terus nuget, sangat bermanfaat bagi saya karena saya sebelumnya tidak tau bagaimana membuat nuget, dan sekarang saya bisa membuatnya dan saya jual di warung saya juga”. (RH : 24 Maret 2019)</p>		
--	--	--	--	--

	jual di warung saya juga”. (RH : 24 Maret 2019)			
<p>Penerapan Metode <i>Casework</i> :</p> <p>5. Evaluasi & terminasi</p> <p>a. Pengelola usaha</p>	<p>“Disini KRTP sendiri yang mengelola. Dalam satu keluarga ada yang masih satu rumah dengan ART, nanti masih bisa membantu menangani usahanya, kalau bantuan yang diberikan ke orang yang sudah tua dan sendirian kan yang dibutuhkan lebih ke konsumtif nah itu baru kita ganti, Karena program ini dituntut untuk bisa berkembang kalau habis kan repot. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Pada prinsipnya bantuan yang diterima adalah untuk KRTP dengan ART atau anak rumah tangga, sehingga pengelolaanya bisa dilakukan KRTP dalam satu keluarga. Tugas dari sekretariat desa dan pendamping desa itu memantau perkembangan usaha produktif KRTP atau usaha KRTP. Untuk</p>	<p>“Disini KRTP sendiri yang mengelola. Dalam satu keluarga ada yang masih satu rumah dengan ART, nanti bisa membantu menangani usahanya, kalau bantuan yang diberikan ke orang yang sudah tua dan sendirian yang dibutuhkan lebih ke konsumtif, itu baru kita ganti, karena program ini dituntut untuk bisa berkembang kalau habis kan repot. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Prinsipnya bantuan yang diterima adalah untuk KRTP dengan ART atau anak rumah tangga, sehingga pengelolaanya bisa dilakukan KRTP dalam satu keluarga. Tugas dari sekretariat desa dan pendamping desa memantau perkembangan usaha produktif KRTP. Untuk usaha yang sudah berkembang dapat difasilitasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan atau modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan dikelola secara mandiri dan diberikan pada RTS yang masih produktif serta tidak sebatang kara. - Sekretariat desa dan pendamping desa bertugas memantau perkembangan usaha produktif KRTP. - Pendamping menghubungkan pada koperasi desa atau lembaga keuangan desa untuk penambahan modal. 	<p>Bantuan diberikan pada RTS yang masih produktif dan diusahakan tidak sebatang kara atau KRTP punya anak. Usaha yang diberikan kepada KRTP dikelola secara mandiri. Pendamping membantu menghubungkan pada sistem bantuan usaha seperti bank desa atau koperasi desa untuk penambahan modal. Pendamping dan sekretariat desa bertugas untuk terus memantau</p>

	<p>usaha yang sudah berkembang dapat difasilitasi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atau modal yang melalui lembaga keuangan mikro yang ada ditingkat desa”. (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>“Tahap ini PD dan sekretariat desa terus memantau perkembangan usaha produktif dari KRTP ini, ada juga yang mendapatkan fasilitas permodalan dari bank desa, pendamping hanya sebagai perantara dan menghubungkan pada bank desa atau koperasi jadi kan lumayan bisa menambah modal KRTP nya”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Untuk pengelola usaha alhamdulillah usaha ini saya jalankan sendiri maksudnya saya yang mengelola langsung ya terkadang memang dibantu</p>	<p>melalui lembaga keuangan mikro yang ada ditingkat desa”. (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>“PD dan sekretariat desa terus memantau perkembangan usaha produktif dari KRTP, ada juga yang mendapatkan fasilitas permodalan dari bank desa, pendamping hanya sebagai perantara dan menghubungkan pada bank desa atau koperasi jadi kan lumayan bisa menambah modal KRTP nya”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Untuk pengelola usaha alhamdulillah usaha saya jalankan sendiri terkadang memang dibantu sama anak kalau pas ramai dan setelah program PFK ini selesai saya juga dapat bantuan pinjaman permodalan, jadi bisa lebih mengembangkan usahanya lagi”. (SI : 24 Maret 2019)</p>	<p>perkembangan dari usaha produktif KRTP.</p>
--	---	---	--

	<p>sama anak kalau pas ramai gitu. Dan setelah program PFK ini selesai saya juga dapat bantuan pinjaman permodalan alhamdulillah, jadi bisa lebih mengembangkan usahanya lagi”. (SI : 24 Maret 2019)</p> <p>“Jadi mbak usaha ini saya jalankan sendiri, saya kelola sendiri setiap harinya karena anak sekolah, tapi kalau pas ada dirumah dan saya lagi masak atau ngurus yang lain, anak saya baru yang meladeni pembeli”. (RH : 24 Maret 2019)</p>	<p>“Usaha ini saya jalankan sendiri saya kelola sendiri setiap harinya karena anak sekolah, tapi kalau pas ada dirumah dan saya lagi masak atau ngurus yang lain, anak saya yang meladeni”. (RH : 24 Maret 2019)</p>		
b. Monitoring & evaluasi	<p>“Monitoring dan evaluasi ini biasanya kita menyebutnya dengan monev, secara berjenjang oleh pendamping desa, sekretariat desa, sekretariat kabupaten, pendamping kabupaten, pendamping provinsi dan sekretariat provinsi. Monitoring dan evaluasi ini sebenarnya bisa dilakukan oleh tim</p>	<p>“Monitoring dan evaluasi kita menyebutnya dengan monev, secara berjenjang oleh pendamping desa, sekretariat desa, sekretariat kabupaten, pendamping kabupaten, pendamping provinsi dan sekretariat provinsi. Monitoring dan evaluasi sebenarnya bisa dilakukan oleh tim independen yang secara langsung ditunjuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monev dilakukan secara berjenjang. - Monev dilakukan oleh pendamping langsung datang kerumah-rumah KRTP. - Monev dari pendamping memonitoring dari awal pelaksanaan 	<p>Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh pendamping desa, sekretariat desa, sekretariat kabupaten, pendamping kabupaten, pendamping</p>

	<p>independen yang secara langsung ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jatim dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PFK tahun 2018, monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monev partisipatif juga dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk sekedar berbagi pengalaman secara terbuka yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan, serta masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.” (EP: 13 Maret 2019)</p> <p>“Monev nya kita pendamping datang kerumah-rumah KRTP menanyakan apakah sudah sesuai dengan permintaannya, ibunya puas apa tidak, ini ada perkembangan apa tidak dari</p>	<p>oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jatim dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PFK tahun 2018, monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat, partisipatif juga dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk sekedar berbagi pengalaman secara terbuka yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan, dan masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.” (EP: 13 Maret 2019)</p> <p>“Pendamping datang kerumah-rumah KRTP menanyakan apakah sudah sesuai dengan permintaannya, ibunya puas apa tidak, ini ada perkembangan apa tidak dari yang semula menjadi buruh tani saja sekarang ada pendapatan dari usaha Jalin matra “alhamdulillah sekarang sudah</p>	<p>hingga program selesai.</p>	<p>provinsi dan sekretariat provinsi. Monev dilakukan pendamping secara langsung dari rumah kerumah KRTP, dan memonitoring dari awal berjalannya program hingga program selesai dilakukan secara berdialog sekedar berbagi pengalaman secara terbuka yang berkaitan dengan perkembangan usaha, apakah bantuan usaha yang diberikan sudah sesuai,dapat bermanfaat atau tidak,</p>
--	---	--	--------------------------------	--

	<p>yang semula menjadi buruh tani saja sekarang ada pendapatan dari usaha Jalin matra “alhamdulillah sekarang sudah berkembang sekarang kerja di sawah buat saya makan dan pendapatan usaha ini saya sisihkan saya kembangkan bisa dibuat tabungan bu” gitu, jadi alhamdulillah ketika monev semuanya bilang sangat terbantu dengan adanya bantuan ini”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Kalau monev dari pendamping kabupaten ya kita memonitoring dari awal pelaksanaan rebug warga, verifikasi kelayakan calon RTS sampai perkembangan usaha KRTP yang sudah berjalan secara berjenjang”. (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>“Jadi intinya kita melakukan monitoring mengenai perkembangan usaha KRTP,</p>	<p>berkembang sekarang kerja di sawah buat saya makan dan pendapatan usaha ini saya sisihkan, saya kembangkan bisa dibuat tabungan bu” gitu, jadi alhamdulillah ketika monev semuanya bilang sangat terbantu dengan adanya bantuan ini”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Monev dari pendamping kabupaten ya kita memonitoring dari awal pelaksanaan rebug warga, verifikasi kelayakan calon RTS sampai perkembangan usaha KRTP yang sudah berjalan secara berjenjang”. (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>“Kita melakukan monitoring mengenai perkembangan usaha KRTP, berhasil atau tidak, atau mungkin stagnan, jadi usahanya tidak turun dan juga tidak naik atau berkembang. Pokoknya semua perkembangan dari KRTP</p>		<p>berkembang atau satgnan. Alhamdulillah KRTP sangat terbantu dengan adanya bantuan usaha ini dan usaha produktif yang dijalankan berhasil dan berkembang.</p>
--	--	---	--	---

	<p>berhasil atau tidak, atau mungkin stagnan, jadi usahanya tidak turun dan juga tidak naik atau berkembang. Pokoknya semua perkembangan dari KRTP itu kita pantau”. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Sering kalau pendamping datang ke sini, untuk sekedar makan sambil menanyakan usaha yang dijalankan apakah lancar atau apa ada kendala atau tidak. Terus juga waktu monev terakhir itu pendamping sama orang kabupaten juga datang untuk survey, apakah bantuannya sudah sesuai, bermanfaat atau tidak, terus usahanya berkembang atau stagnan. Alhamdulillah bantuan yang diberikan ke saya memang sesuai dengan yang saya inginkan serta yang saya butuhkan dan tentunya dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat sekali dan membantu banget mbak</p>	<p>itu kita pantau”. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Sering pendamping datang ke sini, untuk sekedar makan sambil menanyakan usaha yang dijalankan apakah lancar, apa ada kendala atau tidak. Terus juga waktu monev terakhir itu pendamping sama orang kabupaten juga datang untuk survey, apakah bantuannya sudah sesuai, bermanfaat atau tidak, terus usahanya berkembang atau stagnan. Alhamdulillah bantuan yang diberikan ke saya memang sesuai dengan yang saya inginkan serta saya butuhkan dan tentunya dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat sekali dan membantu banget mbak alhamdulillah dapat bantuan pinjaman modal lagi dengan bunga ringan”. (SI: 24 Maret 2019)</p> <p>“Pendamping dengan orang kabupaten datang untuk melakukan survey dan mengisi</p>		
--	--	---	--	--

	<p>alhamdulillah dapat bantuan pinjaman modal lagi dengan bunga ringan”. (SI: 24 Maret 2019)</p> <p>“Para pendamping dengan orang kabupaten datang untuk melakukan survey dan mengisi data mengenai kesesuaian barang yang dulu diberikan, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dan apakah pada saat pelaksana ada kendala, apa kendalanya”. (RH : 24 Maret 2019)</p>	<p>data mengenai kesesuaian barang yang diberikan apakah sudah sesuai atau tidak dan apakah ada kendala dan kalau ada kendala, apa kendalanya”. (RH :24 Maret 2019)</p>		
<p>c. Pelestarian & keberlanjutan program</p>	<p>“Untuk pelestarian kita perkuat modal jadi mereka kita bantu untuk chaneling atau menghubungkan pada pengambilan modal, ada juga yang bermitra jadi KRTP bermitra dengan PD, jadi KRTP kepingin alat seperti ini untuk meningkatkan pemasukannya, dia punya usaha jamu nah kemarin pelestarian kan pelatihannya bikin jamu instan, KRTP berminat sekali nah PD</p>	<p>“Untuk pelestarian kita perkuat modal mereka kita bantu untuk chaneling atau menghubungkan pada pengambilan modal, ada juga yang bermitra jadi KRTP bermitra dengan PD, KRTP kepingin alat untuk meningkatkan pemasukan usaha jamu, kemarin pelestarian pelatihannya bikin jamu instan, KRTP berminat sekali dan PD nya juga mau bermitra dengan KRTP hingga sampai sekarang berjalan dan</p>	<p>- Pendamping membantu menchanneling dan menghubungkan pada pengambilan modal untuk perkuat modal usaha KRTP.</p>	<p>Pendamping membantu KRTP untuk menghubungkan serta menchanneling pada pengambilan modal untuk perkuat modal usaha, seperti pendamping yang bekerja sama dengan KRTP</p>

	<p>nya juga mau bermitra dengan KRTP dan sampai sekarang berjalan dan sukses. Kemudian yang modal itu kita sudah sampaikan yaitu dari bank UMKM jatim dan BNI46 baru tahun ini 2019 mulai untuk permodalannya”. (LY:22 Februari 2019)</p> <p>“Setelah program ini selesai, alhamdulillah saya dapat bantuan pinjaman permodalan dengan bunga yang lumayan rendah, lumayan buat tambah-tambah mbak dan bisa nyisihkan uang sedikit-sedikit lumayan dari pada tidak sama sekali”. (SI : 24 Maret 2019)</p>	<p>sukses. Kemudian yang modal itu kita sudah sampaikan yaitu dari bank UMKM jatim dan BNI46 baru tahun ini 2019 mulai untuk permodalannya”. (LY:22 Februari 2019)</p> <p>“Setelah program ini selesai, alhamdulillah saya dapat bantuan pinjaman permodalan dengan bunga yang lumayan rendah, lumayan buat tambah-tambah dan bisa nyisihkan uang sedikit-sedikit lumayan dari pada tidak sama sekali”. (SI : 24 Maret 2019)</p>		<p>untuk mengembangkan usaha jamu mereka. Pendamping juga menyampaikan untuk usaha yang berkembang akan dapat bantuan perkuat modal dengan bunga ringan dari bank yang sudah bekerja sama seperti dari bank UMKM Jatim dan BNI46.</p>
<p>Peran pendamping a. Fasilitator</p>	<p>“Dapat dikatakan berperan sebagai fasilitator juga, karena kita memfasilitasi bagaimana kita pendamping kabupaten membantu menjembatani agar dapat mempermudah setiap pelaksanaannya dilapangan dari</p>	<p>“Dapat dikatakan berperan sebagai fasilitator, karena kita memfasilitasi bagaimana kita pendamping kabupaten membantu menjembatani agar dapat mempermudah setiap pelaksanaannya dilapangan dari</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping memfasilitasi untuk mempermudah setiap pelaksanaan program. - Pendamping 	<p>Pendamping berperan sebagai fasilitator karena pendamping memfasilitasi untuk menjembatani</p>

	<p>awal berjalannya program hingga program selesai”. (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>“Pendamping juga memberikan motivasi kepada KRTP, ya berupa semangat untuk terus berusaha gitulah, pendamping melakukan pendekatan secara langsung kepada KRTP atau RTS agar KRTP juga dapat merasa nyaman dan tidak malu untuk berkeluh kesah”. (MA: 24 Maret 2019)</p> <p>“Iya selain membantu dan memfasilitasi KRTP dalam pelaksanaan kegiatan, kita juga memberikan motivasi pada KRTP yang merasa tertekan atau merasa minder ya dengan orang-orang yang berada diluar sana, jadi kita memberikan motivasi bahwa banyak diluar sana yang hidupnya jauh dibawah kita, harus sering-sering bersyukur ya,</p>	<p>awal berjalannya program hingga program selesai”. (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>“Pendamping memberikan motivasi kepada KRTP, berupa semangat untuk terus berusaha, pendamping melakukan pendekatan secara langsung kepada KRTP agar KRTP merasa nyaman dan tidak malu untuk berkeluh kesah”. (MA: 24 Maret 2019)</p> <p>“Selain membantu dan memfasilitasi KRTP dalam pelaksanaan kegiatan, kita juga memberikan motivasi pada KRTP yang merasa tertekan atau merasa minder dengan orang-orang yang berada diluar sana, jadi kita memberikan motivasi bahwa banyak diluar sana yang hidupnya jauh dibawah kita, harus sering-sering bersyukur ya, alhamdulillah sekarang ibu dapat bantuan program PFK bisa buka</p>	<p>memberikan motivasi pada KRTP.</p>	<p>agar dapat mempermudah disetiap tahapan atau langkahnya. Pendamping juga selalu memberikan motivasi kepada KRTP untuk terus berusaha dan percaya diri.</p>
--	--	--	---------------------------------------	---

	<p>alhamdulillah sekarang ibu dapat bantuan program PFK bisa buka usaha juga kan alhamdulillah gitu. Jadi membuka pemikiran mereka dan memberikan motivasi”. (SQ : 24 Maret 2019)</p>	<p>usaha juga kan alhamdulillah gitu. Jadi membuka pemikiran mereka dan memberikan motivasi”. (SQ : 24 Maret 2019)</p>		
b. Educator	<p>“Pendamping Bukan sebagai guru ya tapi kayak lebih ke transfer pengetahuan terus pelatihan juga. jadi waktu itu juga diadakan pelatihan didesa yang mengikut sertakan KRTP”. (MA :24 Maret 2019)</p> <p>“Kita juga berperan aktif dalam memberikan masukan yang positif, bertukar pemikiran juga dengan KRTP mengenai keluhan atau keinginan dari KRTP, terus juga memberikan pengetahuan dengan cara kepelatihan pada KRTP”. (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>“Mendampingi saat pelatihan, kalau yang ngisi pelatihan dari</p>	<p>“Pendamping Bukan sebagai guru tapi lebih ke transfer pengetahuan terus pelatihan juga. jadi waktu itu juga diadakan pelatihan didesa yang mengikut sertakan KRTP”. (MA :24 Maret 2019)</p> <p>“Kita berperan aktif dalam memberikan masukan yang positif, bertukar pemikiran dengan KRTP mengenai keluhan kesah atau keinginan dari KRTP, juga memberikan pengetahuan dengan cara kepelatihan pada KRTP”. (LY : 22 Februari 2019)</p> <p>“Mendampingi saat pelatihan, pelatihan dari kabupaten soal management keuangan atau dari</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping bukan sebagai guru melainkan tranfer pengetahuan. - Pendamping berperan aktif dan mengajak bertukar pemikiran dengan KRTP. - Pendamping selalu mendampingi KRTP dalam melakukan pelatihan-pelatihan. 	<p>Pendamping berperan sebagai educator akan tetapi bukan sebagai guru melainkan lebih ke tranfer pengetahuan, bertukar pendapat dan pikiran. Pendamping selalu mendampingi KRTP dalam setiap melakukan pelatihan-pelatihan guna menambah pengetahuan dari KRTP.</p>

	<p>kabupaten soal management keuangan atau dari PKK, itu kita memberikan seperti pemahaman terkait manajemen tersebut kepada KRTP yang belum paham mengenai materi yang diberikan dan juga memberikan arahan pada saat pelatihan berlangsung dari PKK kita juga membantu terus dalam proses tersebut”. (SQ : 24 Maret 2019)</p>	<p>PKK, itu kita memberikan seperti pemahaman terkait manajemen tersebut kepada KRTP yang belum paham mengenai materi yang diberikan dan juga memberikan arahan pada saat pelatihan berlangsung dari PKK kita juga membantu terus dalam proses tersebut”. (SQ : 24 Maret 2019)</p>		
c. Broker	<p>“Pendamping terus mencoba dan berusaha menghubungkan KRTP pada sumber-sumber yang memang diperlukan oleh KRTP seperti kepada unit simpan pinjam atau koperasi desa yang dapat diajak bekerja sama agar usaha KRTP dapat lebih berkembang lagi”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Membantu ke akses pada pelayanan dasar ya seperti kesehatan, pendidikan. Juga memberikan akses pada</p>	<p>“Pendamping terus mencoba dan berusaha menghubungkan KRTP pada sumber-sumber yang memang diperlukan oleh KRTP seperti kepada unit simpan pinjam atau koperasi desa yang dapat diajak bekerja sama agar usaha KRTP dapat lebih berkembang lagi”. (MA : 24 Maret 2019)</p> <p>“Membantu akses pada pelayanan dasar ya seperti kesehatan, pendidikan. Juga memberikan akses pada pelatihan olahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping menghubungkan KRTP pada sistem sumber yang memang dibutuhkan oleh KRTP seperti simpan pinjam atau koperasi dengan bunga rendah. - Pendamping membantu ke akses pelayanan dasar, sebagai pendukung dalam pemenuhan 	<p>Pendamping menghubungkan KRTP kepada sistem sumber yang dibutuhkan seperti unit simpan pinjam atau koperasi desa dengan bunga rendah sehingga tidak akan memberatkan KRTP. Pendamping juga membantu KRTP</p>

	<p>pelatihan olahan makanan yang dilakukan oleh PKK atau kabupaten, yang nantinya dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan hidup KRTP”. (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>“Pendamping juga berperan sebagai <i>quality control</i> atau pengawas dalam pengembangan usaha yang dijalankan oleh KRTP atau RTS, maka perlu adanya monitoring terus dalam berjalannya program”. (LY : 22 Februari 2019)</p>	<p>makanan yang dilakukan oleh PKK atau kabupaten, yang nantinya dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan hidup KRTP”. (SQ: 24 Maret 2019)</p> <p>Pendamping berperan sebagai <i>quality control</i> atau pengawas dalam pengembangan usaha yang dijalankan oleh KRTP atau RTS, maka perlu adanya monitoring terus dalam berjalannya program”. (LY : 22 Februari 2019)</p>	<p>kebutuhan dasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendamping berperan sebagai <i>quality control</i> atau pengawas dalam pengembangan usaha. 	<p>pada akses ke pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, akses pada pelatihan olahan makanan atau pelatihan lainnya, untuk bisa mendukung usaha produktif dalam pemenuhan kebutuhan dasar KRTP dengan peran pendamping sebagai <i>quality control</i> dalam pengembangan usaha.</p>
d. Peran-peran teknis	<p>“Pendamping yang lebih mengacu kepada ketrampilan ya, ketrampilan bagaimana dapat melakukan tugasnya dengan berbagai cara dan ketrampilan yang pendamping punya untuk bisa mengetahui yang sedang diinginkan atau dikeluhkan oleh KRTP. Seperti</p>	<p>“Pendamping lebih mengacu kepada ketrampilan, ketrampilan bagaimana dapat melakukan tugasnya dengan berbagai cara dan ketrampilan yang pendamping punya untuk bisa mengetahui yang sedang diinginkan atau dikeluhkan oleh KRTP. Seperti cara pendamping berkomunikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping lebih mengacu kepada ketrampilan yang pendamping miliki. - Pendamping membangun relasi dan dapat bernegosiasi pada KRTP. 	<p>Pendamping lebih mengacu kepada ketrampilan teknis yang pendamping miliki seperti membangun relasi dengan KRTP, dapat</p>

	<p>cara pendamping berkomunikasi dengan KRTP, bernegosiasi, atau sekedar konsultasi mengenai permasalahannya apa dan keinginannya gimana seperti itu”. (LY : 22 Maret 2019)</p> <p>“Pendamping memang dituntut untuk bisa bernegosiasi, membangun relasi pada KRTP karena itu salah satu pendekatannya kita ke KRTP agar kita itu tau masalah yang sedang dihadapi oleh KRTP apa gitu”. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Ada KRTP yang memang punya keinginan mau usaha apa, kita membantu memberikan konsultasi seperti kemarin ada yang ingin membeli kulkas, kita tanyakan kembali mengenai listrik dirumah cukup apa tidak kan bantuan ini sekali lagi untuk meringankan ya bukan</p>	<p>dengan KRTP, bernegosiasi, atau sekedar konsultasi mengenai permasalahannya apa dan keinginannya gimana seperti itu”. (LY : 22 Maret 2019)</p> <p>“Pendamping dituntut untuk bisa bernegosiasi, membangun relasi pada KRTP karena itu salah satu pendekatannya kita ke KRTP agar kita itu tau masalah yang sedang dihadapi oleh KRTP apa gitu”. (SQ : 24 Maret 2019)</p> <p>“Ada KRTP yang memang punya keinginan mau usaha apa, kita membantu memberikan konsultasi seperti kemarin ada yang ingin membeli kulkas, kita tanyakan kembali mengenai listrik dirumah cukup apa tidak, bantuan ini sekali lagi untuk meringankan bukan memberatkan. Terus ada yang ingin bantuannya dirupakan berupa sepeda motor kita juga menanyakan dan memberi konsultasi pada KRTP,</p>	<p>bernegosiasi pada KRTP mengenai penting tidaknya bantuan yang akan dipilih oleh KRTP, membantu mempertimbangan- mempertimbangan usaha yang sesuai dengan kondisi KRTP agar tidak memberatkan.</p>
--	---	--	--

	<p>memberatkan. Terus ada yang ingin bantuannya dirupakan berupa sepeda motor kita juga menanyakan dan memberi konsultasi pada KRTP, memberikan pertimbangan kalau misalkan bantuannya diganti sepeda angin dan sisanya bisa buat modal usahanya gimana kan lebih enak karena tidak perlu ada biaya perawatan yang intens seperti sepeda motor, tapi tetap keputusan ada di KRTP kita hanya memberi pertimbangan. Tapi alhamdulillah karena KRTPnya juga enak dapat diajak untuk diskusi dan mempertimbangkan ini dan itu, akhirnya tidak jadi membeli motor karena kalau dipikir kedepan belum bayar pajaknya, bensin dan perawatannya itu pasti juga memberatkan". (MA : 24 Maret 2019)</p>	<p>memberikan pertimbangan kalau misalkan bantuannya diganti sepeda angin dan sisanya bisa buat modal usahanya gimana kan lebih enak karena tidak perlu ada biaya perawatan yang intens seperti sepeda motor, tapi tetap keputusan ada di KRTP kita hanya memberi pertimbangan. Tapi alhamdulillah karena KRTPnya juga enak diajak untuk diskusi dan mempertimbangkan ini dan itu, akhirnya tidak jadi membeli motor karena kalau dipikir kedepan belum bayar pajaknya, bensin dan perawatannya itu pasti juga memberatkan". (MA : 24 Maret 2019)</p>		
--	---	---	--	--



LAMPIRAN E

DOKUMENTASI



Sosialisasi



Sosialisasi



Pra Rembug Warga



Rembug Warga



Rembug Warga



Klarifikasi & Identifikasi Usulan Kebutuhan



Klarifikasi & Identifikasi Usulan Kebutuhan



Pengajuan Pencairan Dana BKK



Pengajuan Pencairan Dana BKK



Rembug Pokmas Persiapan Realisasi Bantuan



Rembug Pokmas Persiapan Realisasi Bantuan



Penyerahan Bantuan Barang Kepada KRTP



Penyerahan Bantuan Barang Kepada KRTP



Penyerahan Bantuan Barang Kepada KRTP



Bimbingan Teknis



Bimbingan teknis



Pengelola Usaha



Pengelola Usaha



Pengelola Usaha



Monitoring & Evaluasi



Monitoring & Evaluasi



Pelestarian & Keberlanjutan Program



Pelestarian & Keberlanjutan Program



Pelestarian & Keberlanjutan Program



Pelestarian & Keberlanjutan Program



Wawancara informan



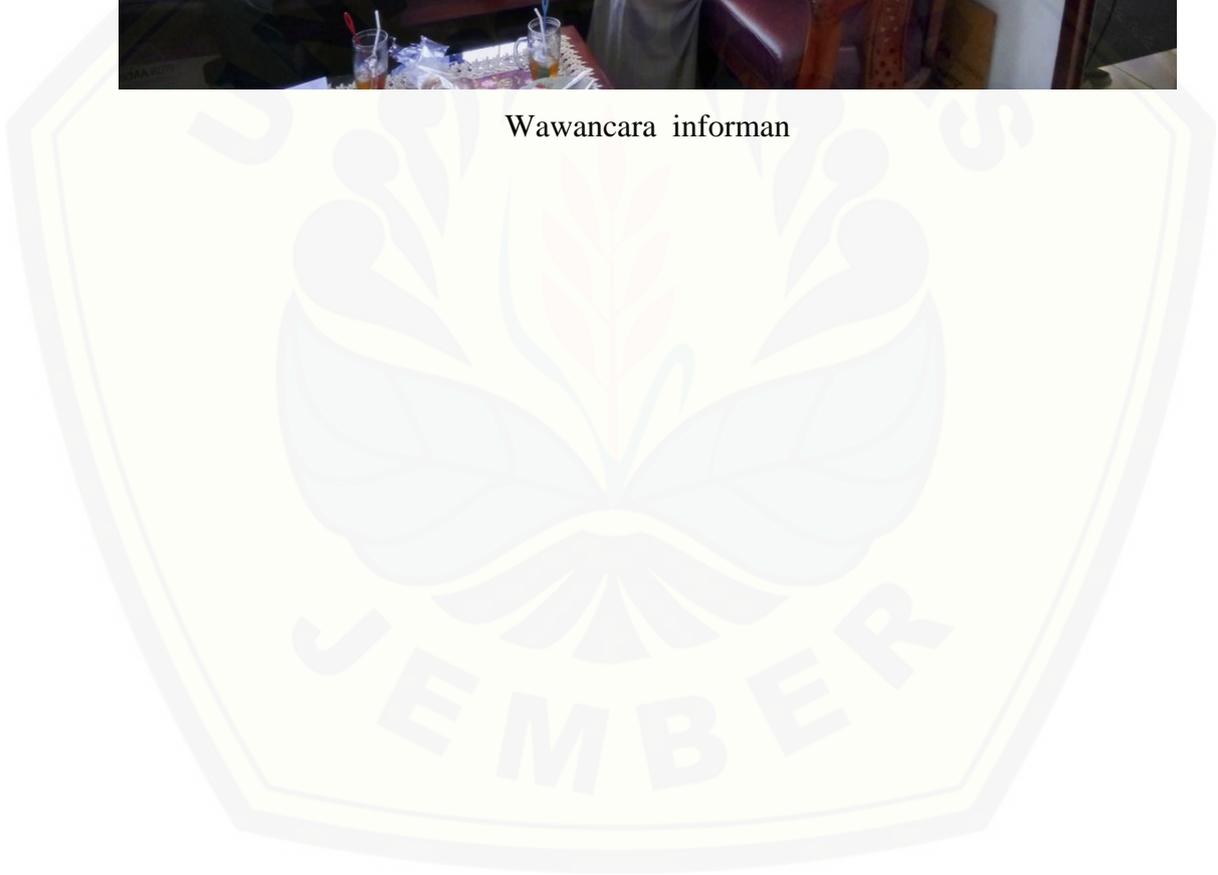
Wawancara informan



Wawancara informan



Wawancara informan



LAMPIRAN F

SURAT IZIN DARI LEMBAGA PENELITIAN



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 262 /UN25.3.1/LT/2019 11 Januari 2019
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang
Di
Jombang

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 93/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

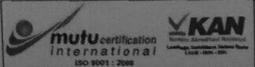
Nama : Wandha Dini Arinta
NIM : 150910301031
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Bangka 01 No.17 Sumbersari-Jember
Judul Penelitian : "Metode Pendampingan kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (K RTP) melalui Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)"
Lokasi Penelitian : Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang
Lama Penelitian : 4 Bulan (18 Januari-30 April 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


Dr. Susanto, M.Pd.
 NIP. 196106161988021001

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Universitas Jember;
2. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.


 CERTIFICATE NO. QMS/173

LAMPIRAN G

SURAT REKOMENDASI DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
J O M B A N G

SURAT IZIN
Nomor : 072/ 012- 1415. 35/2019

TENTANG
IZIN PENELITIAN

Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
c. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember tertanggal 11 Januari 2019 nomor : 262/UN25.3.1/LT/2019 perihal permohonan izin Penelitian.

MENGIZINKAN

Kepada

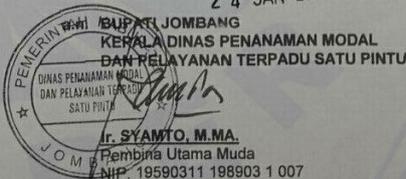
Nama : WANDHA DINI ARINTA
NIM : 150910301031
Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Kesejahteraan Sosial
Perguruan Tinggi : Universitas Jember
Kegiatan : Penelitian
Waktu : 28 Januari s/d 30 April 2019
Judul Penelitian : Metode Pendampingan Kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membawa manfaat bagi semua pihak;
2. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait;
3. Mentaati tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan survey yang dimaksud;
5. Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan survey yang dimaksud;
6. Bertanggung Jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan survey dimaksud.

Demikian untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan pekerjaan Penelitian supaya melaporkan hasil pekerjaannya pada pemerintah kabupaten jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 24 JAN 2019


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ir. SYAMTO, M.MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590311 198903 1 007

Tembusan, Yth Saudara :

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jombang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN H

INSTRUMEN KLARIFIKASI DAN IDENTIFIKASI USULAN
KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SASARAN (RTS)

FORM 2 Klarifikasi Identifikasi usulan RTS)

**INSTRUMEN KLARIFIKASI DAN IDENTIFIKASI USULAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SASARAN (RTS)
PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017**

A PROFIL LOKASI

1 Kabupaten/kota :
 2 Kecamatan :
 3 Desa/Kelurahan :
 Tgl pelaksanaan :/...../2017

B PROFIL RTS

1 ID KTP, KRTP :
 2 Nama KRTP :
 3 Alamat :
 4 Tlp/ HP :
 5 Tgl/Bln/Th lahir :/...../..... Usia : Th
 6 Mata pencaharian

a Perdagangan	<input type="checkbox"/> A1 Kios/pedagang sembako	<input type="checkbox"/> A3 Pedagang Obrog/Miljo	<input type="checkbox"/> A5 Warung Makan/Kopi
	<input type="checkbox"/> A2 Makanan/Minuman Rombong	<input type="checkbox"/> A4 Pedagang keliling/asongan	
b Pertanian	<input type="checkbox"/> B1 Buruh Tani	<input type="checkbox"/> B2 Pendega (sewa lahan)	<input type="checkbox"/> B3 Petani Pemilik
c Peternakan	<input type="checkbox"/> C1 Penggaduh	<input type="checkbox"/> C2 Peternak	
d Perikanan	<input type="checkbox"/> D1 Perikanan tangkap	<input type="checkbox"/> D2 perikanan budidaya	
e Pengrajin	<input type="checkbox"/> E1 Pengrajin	<input type="checkbox"/> E2 Penjahit	
f Jasa	<input type="checkbox"/> F1 Pijat	<input type="checkbox"/> F2 Laundry	<input type="checkbox"/> F3 Bengkel
g UMKM pengolahan Makanan			
h Lainnya	keterangan		

7 Pemasukan Total Rumah tangga (/bln) : Rp.
 Pemasukan dari usaha yg dijalankan (/bln) : Rp.
 Pengeluaran Rumah tangga (/bln) : Rp.

C KETEPATAN CEBAGA. RTS

1 Kategori data : RTS PBDT 2015 RTS non PBDT 2015/ Pengganti
 2 Kepala Rumah Tangga Perempuan : Ya Tidak
 3 Status KRTP : Cerai Ditelantarkan suami
 Suami meninggal Suami difabel/cacat/ sakit menahun

4 RTS Produktif : Ya Tidak
ket produktif: bila KRTP dan atau ART berusia antara 15 – 65 tahun/ secara biktual masih bisa menjalankan aktifitas produktif;

5 RTS Sebatang kara & Produktif : Ya Tidak

6 Jumlah ART (termasuk KRTP) : 1 2 3 4 5 6 ≥ 7

D USULAN KEBUTUHAN

1 Pedagang Kios/pedagang sembako	7 Pertanian
2 Pedagang Makanan/Minuman Rombong	8 Peternakan
3 Pedagang Obrog/Miljo	9 Perikanan
4 Pedagang keliling/asongan	10 Pengrajin/Tulcang
5 Warung Makan/Kopi	11 Penjahit
6 UMKM Makanan	12 Jasa

ket : Isian rindan usulan kebutuhan pada lampiran 2

Mengetahui :
 Kepala Desa _____ Pendamping Desa _____ Rumah Tangga Sasaran _____
 (Nama/TT/stempel) _____ (Nama/TT/Cap Jempol)